

**PENGARUH TRANSPARANSI, KOMPETENSI, DAN SISTEM AKUNTANSI
KEUANGAN TERHADAP AKUNTABILITAS PENGELOLAAN
KEUANGAN DAERAH DENGAN PENERAPAN SISTEM
PENGENDALIAN INTERNAL PEMERINTAH SEBAGAI
VARIABEL MODERASI (STUDI KASUS
KANTOR WALIKOTA LANGSA)**

TESIS

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Magister Akuntansi (M.Ak)
Dalam Bidang Ilmu Akuntansi*

Oleh :

AINUL ALFI SYAHRIN
2320050021



**PROGRAM STUDI MAGISTER AKUNTANSI
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2025**

PENGESAHAN TESIS

Nama : **Ainul Alfi Syahrin**
Nomor Pokok Mahasiswa : **2320050021**
Prodi/Konsentrasi : **Magister Akuntansi/Akuntansi Sektor Publik**
Judul Tesis : **Pengaruh Transparansi, Kompetensi, Dan Sistem Akuntansi Keuangan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Dengan Penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Sebagai Variabel Moderasi (Studi Kasus Kantor Walikota Langsa)**

Pengesahan Tesis:

Medan, 21 Agustus 2025

Komisi Pembimbing

Pembimbing I



Assoc. Prof. Dr. Irfan. S.E., M.M

Pembimbing II



Assoc. Prof. Dr. Januri. S.E., M.M., M.Si

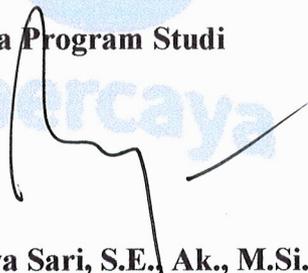
Diketahui

Direktur



Prof. Dr. Triono Eddy, S.H., M.Hum

Ketua Program Studi



Prof. Dr. Maya Sari, S.E., Ak., M.Si., CA

PENGESAHAN

**PENGARUH TRANSPARANSI, KOMPETENSI, DAN SISTEM AKUNTANSI
KEUANGAN TERHADAP AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN
DAERAH DENGAN PENERAPAN SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL
PEMERINTAH SEBAGAI VARIABEL MODERASI (STUDI KASUS
KANTOR WALIKOTA LANGSA)**

Ainul Alfi Syahrin
NPM :2320050021

Program Studi : Magister Akuntansi

Tesis ini telah Dipertahankan di Hadapan Penguji yang Dibentuk oleh Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Dinyatakan Lulus dalam Ujian Tesis pada Hari Senin, 04 Agustus 2025

Komisi Penguji

1. **Assoc. Prof. Dr. Syafrida Hani, S.E., M.Si**
Ketua

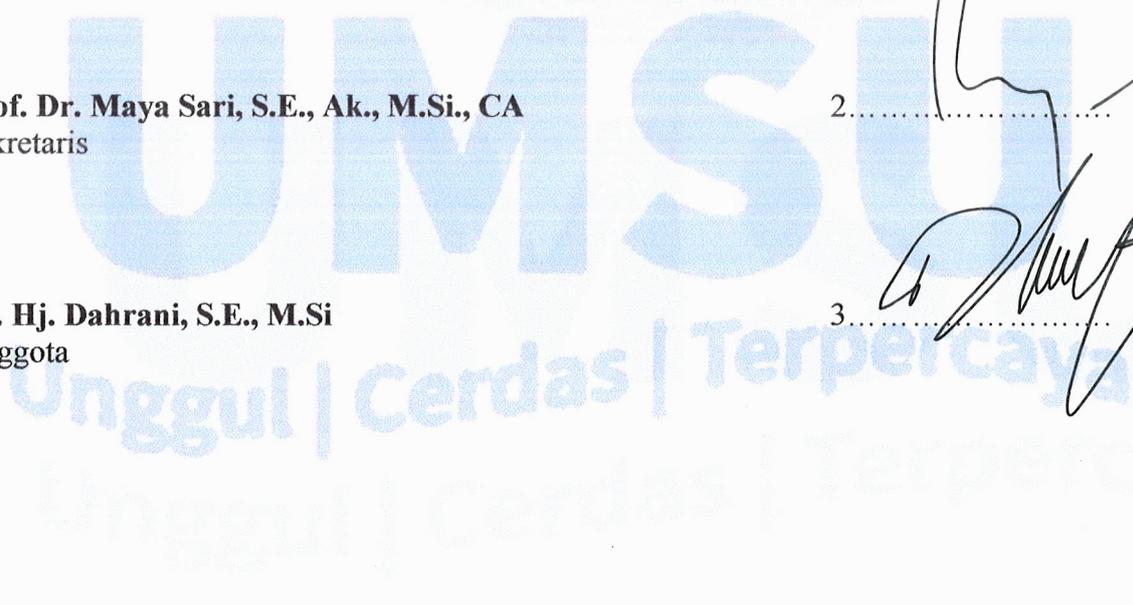
1.....

2. **Prof. Dr. Maya Sari, S.E., Ak., M.Si., CA**
Sekretaris

2.....

3. **Dr. Hj. Dahrani, S.E., M.Si**
Anggota

3.....



Three handwritten signatures in black ink are positioned to the right of the committee members' names. The first signature is at the top, the second is in the middle, and the third is at the bottom. Each signature is written over a dotted line corresponding to the member's name.

PERNYATAAN

PENGARUH TRANSPARANSI, KOMPETENSI, DAN SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN TERHADAP AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DENGAN PENERAPAN SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL PEMERINTAH SEBAGAI VARIABEL MODERASI (STUDI KASUS KANTOR WALIKOTA LANGSA)

Dengan ini penulis menyatakan bahwa:

1. Tesis ini disusun sebagai syarat untuk memperoleh gelar Magister pada Program Magister Akuntansi Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara benar merupakan hasil karya peneliti sendiri
2. Tesis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (sarjana, magister, dan/atau doktor), baik di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara maupun di perguruan tinggi lain.
3. Tesis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Komisi Pembimbing dan masukan Tim Penguji.
4. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
5. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila di kemudian hari ternyata ditemukan seluruh atau sebagian tesis ini bukan hasil karya penulis sendiri atau adanya plagiat dalam bagian-bagian tertentu, penulis bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang penulis sandang dan sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Medan, 25 Agustus 2025

Penulis,



(Ainul Alfi Syahrin)
2320050021

ABSTRAK

PENGARUH TRANSPARANSI, KOMPETENSI, DAN SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN TERHADAP AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DENGAN PENERAPAN SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL PEMERINTAH SEBAGAI VARIABEL MODERASI (STUDI KASUS KANTOR WALIKOTA LANGSA)

Ainul Alfi Syahrin

Program Studi Magister Akuntansi

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh transparansi, kompetensi, dan sistem akuntansi keuangan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah dengan penerapan sistem pengendalian internal pemerintah (SPIP) sebagai variabel moderasi, studi kasus di Kantor Walikota Langsa. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif asosiatif dengan analisis menggunakan SmartPLS 4. Hasil penelitian menunjukkan bahwa transparansi berpengaruh signifikan dengan arah positif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, dengan koefisien jalur sebesar 0,589 dan p-value 0,000 ($< 0,05$), yang menunjukkan bahwa peningkatan transparansi dapat meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah sebesar 58,9%. Kompetensi aparatur pemerintah daerah juga berpengaruh signifikan dengan arah positif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, dengan koefisien jalur sebesar 0,472 dan p-value 0,002 ($< 0,05$), yang artinya peningkatan kompetensi dapat meningkatkan akuntabilitas sebesar 47,2%. Selain itu, sistem akuntansi keuangan berpengaruh signifikan dengan arah positif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, dengan koefisien jalur sebesar 0,202 dan p-value 0,032 ($< 0,05$), yang menunjukkan bahwa peningkatan efektivitas sistem akuntansi keuangan dapat meningkatkan akuntabilitas sebesar 20,2%. Adapun pengaruh moderasi SPIP, transparansi menunjukkan pengaruh yang tidak signifikan, sedangkan kompetensi dan sistem akuntansi keuangan menunjukkan pengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah yang dimoderasi oleh SPIP, dengan pengaruh masing-masing sebesar 9,6% dan 9,7%. Hasil ini mengindikasikan bahwa SPIP memperkuat hubungan antara kompetensi, sistem akuntansi keuangan, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Kata kunci: Transparansi, Kompetensi, Sistem Akuntansi Keuangan, Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah, Sistem Pengendalian Internal Pemerintah, SPIP.

ABSTRACT

THE EFFECT OF TRANSPARENCY, COMPETENCY, AND FINANCIAL ACCOUNTING SYSTEMS ON THE ACCOUNTABILITY OF REGIONAL FINANCIAL MANAGEMENT WITH THE IMPLEMENTATION OF THE GOVERNMENT'S INTERNAL CONTROL SYSTEM AS A MODERATING VARIABLE (CASE STUDY OF LANGSA CITY GOVERNMENT OFFICE)

Ainul Alfi Syahrin

Master's Program in Accounting

This study aims to analyze the impact of transparency, competency, and financial accounting systems on the accountability of regional financial management, with the implementation of the government's internal control system (SPIP) as a moderating variable, using a case study of the Langsa City Government Office. The research method used is quantitative associative analysis with SmartPLS 4. The results show that transparency has a significant positive effect on the accountability of regional financial management, with a path coefficient of 0.589 and a p-value of 0.000 (<0.05), indicating that an increase in transparency can improve the accountability of regional financial management by 58.9%. The competency of regional government officials also has a significant positive effect on the accountability of regional financial management, with a path coefficient of 0.472 and a p-value of 0.002 (<0.05), meaning that an increase in competency can improve accountability by 47.2%. Additionally, the financial accounting system has a significant positive effect on the accountability of regional financial management, with a path coefficient of 0.202 and a p-value of 0.032 (<0.05), indicating that improvements in the effectiveness of the financial accounting system can increase accountability by 20.2%. As for the moderating effect of SPIP, transparency showed no significant effect, while competency and the financial accounting system showed significant effects on the accountability of regional financial management when moderated by SPIP, with impacts of 9.6% and 9.7%, respectively. These results suggest that SPIP strengthens the relationship between competency, financial accounting systems, and the accountability of regional financial management.

Keywords: Transparency, Competency, Financial Accounting System, Accountability Of Regional Financial Management, Government's Internal Control System, SPIP.

KATA PENGANTAR



Assalamualaikum Wr.Wb

Alhamdulillah rabbil'alamin puji dan syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT yang telah memberikan kesehatan dan rahmatnya yang berlimpah sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis ini. Selanjutnya tidak lupa pula peneliti mengucapkan sholawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa risalahnya kepada seluruh umat manusia dan menjadi suri tauladan bagi kita semua. Penelitian ini merupakan kewajiban bagi peneliti guna melengkapi tugas-tugas serta memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan Pendidikan Program Magister (S2) Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU, untuk memperoleh gelar Magister Akuntansi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Adapun judul peneliti yaitu : **“Pengaruh Transparansi, Kompetensi, Dan Sistem Akuntansi Keuangan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Dengan Penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Sebagai Variabel Moderasi (Studi Kasus Kantor Walikota Langsa)”**.

Penghargaan dan terimakasih yang setulus-tulusnya kepada Ayahanda **Ihwanul Hidayat S.E** dan Ibunda **Elida** tercinta yang saya sayangi yang telah mecurahkan segenap cinta dan kasih sayang serta perhatian yang luar biasa. Semoga Allah SWT selalu melimpahkan Rahmat, Kesehatan. Karunia dan Keberkahan di dunia dan di akhirat atas budi baik yang telah diberikan kepada penulis.

Penulis menyadari bahwa penyusunan Tesis ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya, kepada :

1. Bapak **Prof. Dr. Agussani M,AP** selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
2. Bapak **Dr. Muhammad Arifin, SH.,M.Hum** Wakil Rektor I Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak **Assoc. Prof. Dr. Akrim, S.H.,M.Pd** Wakil Rektor II Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak **Assoc. Prof. Dr. Ruianto, S.Sos.,M.Si.,** Wakil Rektor III Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
5. Bapak **Prof. Dr. Triono Eddy, S.H., M.Hum** selaku Direktur Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Ibu **Dr. Eka Nurmala Sari, S.E., M.Si., Ak., CA** selaku Ketua Program Studi Magister Akuntansi Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
7. Ibu **Assoc. Prof. Dr. Maya Sari, S.E., M.Si., Ak., CA.,** selaku Sekretaris Program Studi Magister Akuntansi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
8. Bapak **Dr. Irfan. S.E., M.M.** selaku Komisi Pembimbing 1 yang telah memberikan arahan serta masukan sehingga Proposal ini dapat diselesaikan.

9. Bapak **Dr. H. Januri, S.E., M.M., M.Si.** selaku Komisi Pembimbing 2 yang telah memberikan arahan serta masukan sehingga Proposal ini dapat diselesaikan.
10. Seluruh Staf Pengajar dan Staf Administrasi di Pascasarjana Program Studi Magister Akuntansi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
11. Kepada sahabat saya di Magister Akuntansi Konsentrasi Akuntansi Sektor Publik yang telah turut membantu peneliti dalam penyusunan tesis ini.

Penulis menyadari bahwa Tesis ini masih jauh dari kata kesempurnaan dan masih terdapat kekurangan serta kesalahan serta kesalahan dari materi ataupun cara penyajiannya. Oleh karena itu, Penulis mengharapkan saran dan kritik dari semua pihak demi kesempurnaan Tesis ini. Semoga Tesis ini dapat bermanfaat dan berguna bagi para pembaca.

Wassalamualaikum Wr.Wb

Medan, Agustus 2025

AINUL ALFI SYAHRIN
2320050021

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR GAMBAR	ix
DAFTAR TABEL	x
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Identifikasi Masalah	21
1.3 Rumusan Masalah	22
1.4 Tujuan Penelitian	23
1.5 Manfaat Penelitian	24
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	26
2.1.1 <i>Teori Enterprise</i>	26
2.1.1.1 Pengertian <i>Teori Enterprise</i>	26
2.1.2 Transparansi	28
2.1.2.1 Pengertian Transparansi	28
2.1.2.2 Tujuan dan Manfaat Transparansi	30
2.1.2.3 Indikator Transparansi	31
2.1.2.4 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Transparansi	33
2.1.3 Kompetensi	34
2.1.3.1 Pengertian Kompetensi	34
2.1.3.2 Tujuan dan Manfaat Kompetensi	37
2.1.3.3 Indikator Kompetensi	41
2.1.3.4 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kompetensi	42
2.1.4 Sistem Akuntansi Keuangan	44
2.1.4.1 Pengertian SAK	44
2.1.4.2 Tujuan dan Manfaat SAK	46
2.1.4.3 Indikator SAK	47
2.1.4.4 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi SAK	48

2.1.5 Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah	49
2.1.5.1 Pengertian Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah ...	49
2.1.5.2 Tujuan dan Manfaat Akuntabilitas Keuangan Daerah	52
2.1.5.3 Indikator Akuntabilitas Keuangan Daerah.....	54
2.1.5.4 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Akuntantabilitas	55
2.1.6 Sistem Pengendalian Internal Pemerintah	57
2.1.6.1 Pengertian SPIP	57
2.1.6.2 Tujuan dan Manfaat SPIP	59
2.1.6.3 Indikator SPIP	60
2.1.6.4 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi SPIP	62
2.2 Penelitian Terdahulu	64
2.3 Kerangka Konseptual	68
2.4 Hipotesis	77
BAB III METODE PENELITIAN	79
3.1 Pendekatan Penelitian	79
3.2 Tempat dan Waktu Penelitian	79
3.3 Populasi dan Sampel	80
3.3.1 Populasi	80
3.3.2 Sampel	80
3.4 Definisi Operasional	81
3.5 Teknik Pengumpulan Data	82
3.5.1 Angket/Kuesioner	82
3.5.2 Dokumentasi	83
3.6. Pengujian Validitas Reabilitas Instrumen	83
3.7 Teknik Analisis Data	85
3.7.1 Analisis Statistik Deskriptif	86
3.7.2 Analisis Structural Modeling	86
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	92
4.1 Gambaran Umum	92
4.2 Karakteristik Responden	95
4.3 Hasil Analisis Deskriptif Variabel Penelitian	96

4.3.1 Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah	96
4.3.2 Transparansi	102
4.3.3 Kompetensi	109
4.3.4 Sistem Akuntansi Keuangan	115
4.3.5 SPIP	122
4.4 Hasil Analisis SEM	130
4.4.1 Analisis Model Pengukuran	132
4.4.2 Analisis Model Strukturan	139
4.5 Pembahasan	148
BAB V PENUTUP	186
5.1 Kesimpulan	186
5.2 Saran	187
DAFTAR PUSTAKA	190

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Tabel Kekurangan Volume Pembangunan Kota Langsa	10
Gambar 2.1 Kerangka Konseptual	77
Gambar 4.1 Deskriptif Jawaban Responden Akuntabilitas PKD.....	98
Gambar 4.2 Deskriptif Jawaban Responden Transparansi	104
Gambar 4.3 Deskriptif Jawaban Responden Kompetensi.....	111
Gambar 4.4 Deskriptif Jawaban Responden Sistem Akuntansi Keuangan.....	118
Gambar 4.5 Deskriptif Jawaban Responden SPIP	125
Gambar 4.6 Output Smartpls.....	131

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 APBD Kota Langsa (2020-2024)	5
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	64
Tabel 3.1 Waktu Penelitian	80
Tabel 3.2 Definisi Operasional Variabel	81
Tabel 3.3 Klasifikasi Besaran Koefisien Validitas	84
Tabel 3.4 Ukuran Kemantapan Alpha	85
Tabel 3.5 Evaluasi Model Pengukuran	88
Tabel 3.6 Evaluasi Model Struktural	89
Tabel 4.1 Karakteristik Responden	95
Tabel 4.2 Jabatan Responden	95
Tabel 4.3 Deskriptif Jawaban Responden Akuntabilitas PKD	96
Tabel 4.4 Deskriptif Jawaban Responden Transparansi	102
Tabel 4.5 Deskriptif Jawaban Responden Kompetensi.....	109
Tabel 4.6 Deskriptif Jawaban Responden Sistem Akuntansi Keuangan	116
Tabel 4.7 Deskriptif Jawaban Responden SPIP	122
Tabel 4.8 Loading Factor	133
Tabel 4.9 Cross Loading	135
Tabel 4.10 Nilai AVE	136
Tabel 4.11 Reabilitas.....	138
Tabel 4.12 Koefisien Determinasi.....	140
Tabel 4.13 Uji Signifikansi Pengaruh Langsung	142
Tabel 4.14 Uji Signifikansi Pengaruh Moderasi	143
Tabel 4.15 Rangkuman Hasil Uji Hipotesis.....	146

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pengelolaan keuangan daerah merupakan komponen vital dalam tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) (Saragih & Alpi, 2023). Hasibuan dalam Hanum et al., (2024) menjelaskan bahwa pengelolaan atau manajemen adalah ilmu seni dan seni mengatur proses pemanfaatan sumber daya lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan tertentu. Di era otonomi daerah dan tuntutan reformasi birokrasi yang semakin tinggi, akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah menjadi sorotan utama publik dan pemangku kepentingan. Hal ini sejalan dengan pendapat Mardiasmo (2021) yang menyatakan bahwa akuntabilitas publik merupakan kewajiban pemerintah untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang terkait dengan penggunaan sumber daya publik kepada pemberi mandat.

Menurut Mardiasmo (2009), organisasi sektor publik memiliki tiga fungsi utama: (1) Melakukan pelayanan publik yang sangat penting demi kepentingan umum, (2) Menetapkan prinsip operasional yang berlaku bagi masyarakat, dan (3) Menyediakan dan melaksanakan pelayanan publik yang tidak dapat ditangani oleh sektor swasta atau nirlaba. Sebagai bagian dari sektor publik, pemerintah daerah diharapkan memiliki kinerja yang mengutamakan kepentingan masyarakat dengan mempertanggungjawabkan penyelenggaraan pemerintah yang transparan dan berkualitas.

Pertanggungjawaban ini sangat penting untuk meningkatkan pelayanan publik dan untuk melakukan evaluasi terhadap kinerja tahun sebelumnya, yang menjadi dasar dalam perencanaan untuk tahun yang akan datang. Namun, dalam praktiknya, masih terdapat penyimpangan yang dilakukan oleh oknum-oknum pemerintah. Salah satu masalah yang sering terjadi adalah lemahnya pengendalian dalam proyek pembangunan, serta penyelewengan dana yang digunakan untuk kegiatan yang tidak sesuai dengan rencana pembangunan. Akibatnya, beberapa tujuan yang telah ditetapkan oleh instansi pemerintah tidak tercapai. Menurut Dahrani et al. (2022) dalam mengukur keberhasilan pengelolaan keuangan dapat ditentukan dari kompetensi, transparansi, agency dan akuntabilitas.

Dalam konteks pengelolaan keuangan daerah, akuntabilitas menjadi tuntutan utama masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan. *Accountability* dapat diartikan sebagai suatu bentuk kewajiban mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi suatu perusahaan dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan (Lestari & Sari, 2021). Hal ini sejalan dengan pendapat Mahmudi (2019) yang menyatakan bahwa akuntabilitas merupakan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Akuntabilitas tidak hanya terbatas pada pelaporan keuangan yang jujur dan wajar, tetapi mencakup kemampuan menunjukkan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah menjadi isu sentral dalam tata kelola pemerintahan di era otonomi daerah. Seiring dengan meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*), pemerintah daerah dituntut untuk dapat mengelola keuangan daerah secara transparan, efektif, efisien dan dapat dipertanggungjawabkan. Menurut Mardiasmo (2021), akuntabilitas publik adalah kewajiban pihak pemegang amanah (*agent*) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut.

Dalam perspektif yang lebih luas, Mahmudi (2019) menjelaskan bahwa akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah tidak hanya mencakup pertanggungjawaban secara formal, tetapi juga mencakup pertanggungjawaban kepada masyarakat (*public accountability*). Hal ini menegaskan pentingnya peran masyarakat dalam mengawasi pengelolaan keuangan daerah sebagai manifestasi dari prinsip demokrasi. Implementasi akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah di Indonesia diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, salah satunya adalah Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Bastian (2019) menekankan bahwa regulasi tersebut mengamanatkan pemerintah daerah untuk menerapkan prinsip-prinsip tata kelola yang baik dalam pengelolaan keuangan daerah, termasuk akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi publik.

Namun dalam implementasinya, akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah di Indonesia masih menghadapi berbagai kendala. Hal ini tercermin dari berbagai temuan dan kasus yang terjadi di berbagai daerah. Berdasarkan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan (IHPS) BPK Semester I Tahun 2023, dari hasil pemeriksaan atas 542 Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), BPK menemukan 9.575 kelemahan dalam sistem pengendalian internal dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan senilai Rp5,15 triliun. Selain itu berdasarkan laporan Kinerja Kementerian Dalam Negeri tahun 2023, dari 542 pemerintah daerah, masih terdapat 157 daerah yang belum mencapai target Indeks Reformasi Birokrasi, dimana salah satu komponennya adalah akuntabilitas pengelolaan keuangan.

Pengelolaan keuangan daerah akan mempengaruhi peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat serta bangsa Indonesia. Peran dan fungsi pengelolaan keuangan daerah Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah memiliki tugas untuk melakukan koordinasi, mediasi, dan fasilitasi dalam merumuskan kebijakan, memberikan bimbingan, serta pembinaan dalam rangka menyelenggarakan program kegiatan di bidang pengelolaan keuangan daerah. Potensi kekayaan daerah yang besar merupakan salah satu modal dasar untuk mewujudkan cita-cita Kota Langsa pada masa depan. Sebagai salah satu kota di Indonesia, Kota Langsa juga menghadapi permasalahan dalam pengelolaan keuangan daerah. Hal ini dapat dilihat dari perkembangan penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Langsa pada tabel di bawah ini.

Tabel 1.1 APBD Kota Langsa (Tahun 2020-2024)

Tahun	Pendapatan	Realisasi	Persentase
2020	852.159.752.831	850.143.521.349	99,76%
2021	907.250.000.000	901.223.487.103	99,34%
2022	933.600.000.000	911.368.587.564	97,62%
2023	935.000.000.000	921.254.782.147	98,53%
2024	946.000.000.000	923.152.487.453	97,58%

Berdasarkan data APBD Kota Langsa tahun 2020-2024, dapat diidentifikasi beberapa permasalahan dalam pengelolaan keuangan daerah yang perlu mendapat perhatian serius. Meskipun secara keseluruhan tingkat realisasi pendapatan masih berada dalam kategori baik dengan persentase di atas 97%, namun terdapat tren penurunan yang konsisten sejak tahun 2021. Pada tahun 2020, realisasi pendapatan mencapai 99,76% yang merupakan pencapaian tertinggi, namun kemudian mengalami penurunan menjadi 99,34% di tahun 2021, dan terus menurun hingga mencapai titik terendah 97,58% pada tahun 2024. Permasalahan utama yang dapat diidentifikasi adalah adanya kesenjangan yang semakin membesar antara target pendapatan dengan realisasi yang dicapai. Selisih antara anggaran dan realisasi meningkat dari hanya Rp.2,016 miliar pada tahun 2020 menjadi Rp.22,847 miliar pada tahun 2024. Hal ini mengindikasikan adanya masalah dalam perencanaan anggaran yang kurang realistis atau optimalisasi sumber pendapatan daerah yang belum maksimal. Fenomena ini juga dapat menunjukkan lemahnya sistem monitoring dan evaluasi dalam pelaksanaan program-program peningkatan pendapatan asli daerah. Tren penurunan realisasi pendapatan ini berpotensi berdampak pada kemampuan keuangan daerah dalam membiayai program pembangunan dan pelayanan publik. Kondisi ini juga dapat mengindikasikan adanya masalah

transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah, di mana target yang ditetapkan tidak didasarkan pada analisis yang mendalam terhadap potensi riil daerah. Oleh karena itu, diperlukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pengelolaan keuangan daerah untuk memastikan pencapaian target yang lebih optimal dan berkelanjutan.

Pelaksanaan otonomi daerah merupakan suatu proses yang melibatkan berbagai unsur masyarakat, terutama di Kota Langsa, serta memberikan wewenang kepada pemerintah daerah untuk mengelola keuangan daerah secara akuntabel. Dalam hal ini, peran pemerintah adalah sebagai penggerak dan penyedia fasilitator, karena pemerintah lebih memahami sasaran dan tujuan pembangunan yang ingin dicapai. Sebagai penggerak dan penyedia fasilitator, pemerintah membutuhkan berbagai sarana dan fasilitas pendukung agar pembangunan dapat berjalan secara berkelanjutan (Mustofa, 2012). Akuntabilitas dalam pengelolaan belanja langsung adalah salah satu alternatif untuk mendorong keberlanjutan dan konsistensi pembangunan di Kota Langsa menuju pencapaian sasaran yang telah disepakati bersama. Oleh karena itu, kegiatan langsung yang akan dilaksanakan menjadi salah satu faktor penentu keberhasilan pembangunan daerah. Akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah dapat berkembang dalam lingkungan yang transparan dan demokratis, serta dengan adanya kebebasan untuk menyampaikan pendapat. Pemerintah harus sepenuhnya menyadari bahwa penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat adalah hal yang tidak bisa dipisahkan dari

kepentingan publik. Terwujudnya akuntabilitas keuangan daerah akan menjadi dasar yang kokoh bagi tata kelola pemerintahan yang lebih baik, dan segala bentuk pertanggungjawaban keuangan yang bersumber dari dana masyarakat akan berjalan lancar, seiring dengan meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dalam pengelolaan keuangan daerah (Sains, 2018).

Sampai saat ini berbagai kebijakan telah diambil oleh pemerintah Kota Langsa untuk mengembangkan dan meningkatkan kemampuan daerah di bidang pengelolaan keuangan daerah khususnya Kota Langsa, karena aspek keuangan daerah menjadi sesuatu yang penting, sebab untuk menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan daerah dibutuhkan dana atau biaya yang cukup besar sehingga kepada daerah diberi hak untuk mengatur dan mengurus rumahtangganya sendiri dalam arti menggali dan mengelola Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah daerah. Keberhasilan penyelenggaraan otonomi daerah tidak dapat dilepaskan dari cukup tidaknya kemampuan daerah dalam bidang keuangan, karena kemampuan keuangan ini merupakan salah satu indikator penting guna mengukur tingkat otonomi suatu daerah. Hal inii mudah dipahami, karena adalah mustahil bagi daerah–daerah untuk dapat menjalankan berbagai tugas dan pekerjaannya dengan efesien dan efektif dan dapat melaksanakan pelayanan dan pembangunan bagi masyarakatnya (Fauziyah dan Handayani, 2017).

Mahmudi (2019) mengidentifikasi beberapa kendala utama dalam akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah yaitu keterbatasan kompetensi

SDM dimana banyak daerah masih kekurangan tenaga akuntansi yang memahami standar akuntansi pemerintahan dan sistem pengelolaan keuangan daerah, sistem informasi yang belum optimal meskipun sudah ada sistem informasi pengelolaan keuangan daerah namun implementasinya sering terkendala infrastruktur dan pemahaman penggunaan sistem, serta lemahnya pengawasan internal dimana peran APIP (Aparat Pengawasan Intern Pemerintah) belum optimal dalam mencegah dan mendeteksi penyimpangan. Selain itu, transparansi juga memainkan peran penting dalam menciptakan akuntabilitas dengan memberikan aksesibilitas informasi keuangan kepada publik secara jelas, akurat, dan dapat dibandingkan (Defana & Rahayu, 2023). Berbicara mengenai kompetensi pada dasarnya tidak dapat dilepaskan dari aspek profesionalisme. Profesionalisme mencerminkan sikap, perilaku, dan kualitas yang melekat pada seseorang dalam menjalankan profesinya, sedangkan kompetensi menunjukkan kemampuan nyata yang dimiliki individu untuk melaksanakan tugas sesuai standar tertentu. Dengan kata lain, profesionalisme menekankan sikap dan etika kerja, sementara kompetensi menekankan kapasitas teknis dan keahlian (Dahrani, 2021). Keterkaitan antara kompetensi, profesionalisme, dan akuntabilitas membentuk sebuah triad yang saling menguatkan dalam konteks pengelolaan organisasi, khususnya dalam sektor pendidikan. Akuntabilitas, sebagai kewajiban untuk bertanggung jawab atas tindakan dan keputusan yang diambil, memerlukan fondasi kompetensi yang solid dan sikap profesionalisme yang tinggi untuk dapat diimplementasikan secara efektif.

Salah satu faktor yang mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah adalah transparansi. Transparansi menurut Mardiasmo (2021) didefinisikan sebagai keterbukaan pemerintah dalam membuat kebijakan-kebijakan terkait keuangan daerah agar dapat diketahui dan diawasi oleh DPRD dan juga masyarakat. Dalam konteks pemerintahan transparansi sebagai keterbukaan yang menjamin hak masyarakat untuk memantau perilaku pejabat publik, memperoleh informasi, berpartisipasi dalam kebijakan publik, kebebasan berekspresi, serta hak untuk mengajukan keberatan terhadap pelanggaran hak tersebut (Mas Achmad Santosa, 2003). Sementara Samuel Paul dalam (Adisasmita, 2011) menyebutkan transparansi sebagai prinsip kunci untuk menciptakan akuntabilitas dalam pelayanan publik. Hal ini melibatkan penyampaian informasi yang relevan, tepat waktu, dan akurat kepada masyarakat, sehingga memungkinkan mereka untuk mengevaluasi kinerja pemerintah atau institusi secara objektif. Akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah adalah kewajiban untuk memberikan laporan atas tindakan yang dilakukan atau tidak dilakukan kepada pihak yang berkepentingan. Hal ini mencakup tanggung jawab kepada semua pemangku kepentingan terkait. Dengan adanya transparansi yang tinggi, tingkat akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah dapat ditingkatkan secara signifikan, sehingga proses pertanggungjawaban menjadi lebih efektif dan kredibel (Herlina *et al.*, 2021).

Dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah, transparansi menjadi elemen kunci yang memastikan penggunaan dana publik sesuai dengan

peruntukannya. Namun, temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia menunjukkan adanya kekurangan volume pekerjaan pada Proyek Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Pagar di Kawasan Wisata Hutan Kota Langsa yang dilaksanakan oleh CV ICP, berdasarkan kontrak nomor 14/SP/PPK-DISPORAPAR/VIII/2022 dengan nilai Rp4.356.130.000,00. Proyek ini telah dilunasi melalui beberapa tahapan pembayaran sesuai Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D). Meskipun demikian, hasil pemeriksaan fisik pada 7 Februari 2023 menunjukkan bahwa terdapat kekurangan volume pekerjaan sebesar Rp102.721.096,34. Temuan ini menyoroti potensi kurang optimalnya pengawasan dan transparansi dalam proses pelaksanaan proyek, yang berpengaruh pada akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah (kabartamiang, 2023).

Tabel 55. Kekurangan Volume Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Pagar di Kawasan Wisata Hutan Kota Langsa

No.	Uraian	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Volume			Jumlah Harga (Rp)
				Kontrak	Hasil Pemeriksaan	Selisih	
A. PEKERJAAN PONDASI							
1	Pek. Pondasi Batu Gunung		1.606.583,00	249,47	231,39	18,08	29.047.020,64
2	Pek. Pondasi Tapak						
	- Beton Tapak K 200	M ²	1.600.421,00	74,85	65,32	9,53	15.252.012,13
	- Pembesian Tapak	Kg	18.107,00	3.895,98	3.863,43	32,55	589.382,85
	- Bekisting Tapak	M ²	142.303,00	333,44	296,74	36,70	5.222.520,10
	- Pekerjaan Cerucuk Bawah Tapak		30.000,00	890,00		890,00	
3	Pek. Pedestal						
	- Beton Pedestal K 200	M3	1.600.421,00	37,98	34,36	3,62	5.793.524,02
	- Beton Pedestal K 200 (volume > 10 %)	M3	1.509.195,00	16,66	15,07	1,59	2.399.620,05
	- Pembesian Pedestal	Kg	18.107,00	2.229,12	981,27	1.247,85	22.594.819,95
	- Pembesian Pedestal (volume > 10 %)	Kg	17.286,18	708,66	311,96	396,70	6.857.427,61
	- Bekisting Pedestal	M2	251.551,00	585,35	525,86	59,49	14.964.768,99
Total Kekurangan Volume Pekerjaan (Sebelum PPN)							102.721.096,34

Sumber: Kontrak dan Hasil Perhitungan

Gambar 1.1 Tabel Kekurangan Volume Pembangunan Kota Langsa

Kasus yang terjadi di Proyek Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Pagar di Kawasan Wisata Hutan Kota Langsa tersebut mengungkapkan adanya masalah dalam pengelolaan keuangan daerah, khususnya dalam hal transparansi dan akuntabilitas. Temuan BPK terkait kekurangan volume pekerjaan pada proyek yang sudah dibayar lunas menunjukkan bahwa terdapat ketidaksesuaian antara anggaran yang dikeluarkan dan hasil pekerjaan yang sebenarnya. Hal ini mencerminkan adanya kekurangan dalam pengawasan dan pengelolaan yang transparan, yang memengaruhi tingkat akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Herlina *et al.*, (2021) dan Sukmawati (2019) menunjukkan bahwa transparansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Hal tersebut berarti bahwa semakin tinggi tingkat transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah, semakin besar pula kemungkinan terjadinya peningkatan dalam akuntabilitas pengelolaan keuangan tersebut. Transparansi, dalam konteks ini, merujuk pada keterbukaan dalam pelaporan keuangan dan pengelolaan anggaran, yang memungkinkan pihak-pihak terkait, termasuk masyarakat dan lembaga pengawas, untuk memantau dan mengevaluasi penggunaan dana publik. Dengan adanya transparansi yang baik, dapat terhindar dari potensi penyalahgunaan anggaran dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah, sehingga akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah juga meningkat (Sukmawati & Nurfitriani, 2019).

Adapun faktor-faktor yang berkontribusi terhadap fenomena ketidakselesaian proyek meskipun pembayaran telah dilakukan secara penuh

disebabkan oleh lemahnya perencanaan, pelaksanaan yang tidak sesuai dengan standar teknis, dan tidak berfungsinya mekanisme monitoring dan evaluasi. Lebih lanjut, ketidakefektifan mekanisme enforcement terhadap kontraktor yang melakukan wanprestasi serta potensi praktik kolusi antara pelaksana proyek dan pihak-pihak tertentu dalam birokrasi juga dapat dianalisis sebagai variabel penghambat dalam pencapaian target penyelesaian pekerjaan. Secara komprehensif, kasus ini memberikan bukti empiris bahwa tanpa implementasi prinsip transparansi dan akuntabilitas yang optimal, sistem pengelolaan keuangan daerah akan menghadapi problematika yang signifikan, yang pada akhirnya berdampak negatif terhadap stakeholder utama yaitu masyarakat sebagai beneficiary dari program-program pembangunan daerah. Temuan ini memperkuat argumen teoretis mengenai pentingnya penerapan good governance dalam konteks manajemen keuangan sektor publik untuk mencapai efektivitas dan efisiensi alokasi sumber daya daerah.

Sementara itu, studi komparatif oleh Santoso et al. (2024) yang membandingkan pemerintah daerah dengan tingkat transparansi tinggi dan rendah di 5 provinsi di Indonesia tidak menemukan perbedaan signifikan dalam akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah yang dihasilkan. Hasil ini bertentangan dengan asumsi umum bahwa transparansi yang lebih tinggi akan menghasilkan akuntabilitas pengelolaan keuangan yang lebih baik. Meskipun telah banyak penelitian membahas pengelolaan keuangan daerah, terdapat celah riset yang belum tereksplorasi secara komprehensif, khususnya dalam

konteks spesifik pengaruh simultan transparansi dan kompetensi SDM terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah di Indonesia.

Selain transparansi, kompetensi turut mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan keuangan (Kuncahyo & Dharmakarja, 2022). Kompetensi adalah karakteristik dasar seseorang yang mempengaruhi cara berpikir dan bertindak, membuat generalisasi terhadap situasi yang dihadapi, serta bertahan cukup lama dalam diri manusia (Spencer, 2018). Kompetensi sumber daya manusia sangat diperlukan agar laporan keuangan yang dihasilkan dapat memenuhi karakteristik kualitatif laporan keuangan (Sari et al., 2020). Dalam konteks pengelolaan keuangan daerah kompetensi merupakan kemampuan yang harus dimiliki oleh pengelola keuangan dalam merencanakan, melaksanakan, menatausahakan, melaporkan, dan mempertanggungjawabkan keuangan daerah secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, dan transparan (Dahrani & Rosady, 2023).

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester II (IHPS) 2023 mengungkapkan berbagai permasalahan dalam pengelolaan keuangan dan tata kelola pemerintah daerah yang disampaikan kepada DPD RI pada 5 Juni 2024. Permasalahan ini mencakup aspek tematik atas dua prioritas nasional, yakni pengembangan wilayah serta revolusi mental dan pembangunan kebudayaan. Dalam pemeriksaan terkait pengembangan wilayah, ditemukan bahwa banyak pemerintah daerah belum menetapkan Peraturan Daerah (Perda) atau Peraturan Kepala Daerah (Perkada) mengenai insentif pajak dan retribusi daerah, serta belum mampu menyediakan layanan

dasar seperti sistem penyediaan air bersih, sarana prasarana jalan, dan instalasi pengolahan akhir yang mendukung kawasan strategis. Selain itu, terdapat permasalahan terkait belum adanya evaluasi penggunaan Dana Desa dan pembinaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), yang menjadi penghambat pengembangan daerah tertinggal dan perdesaan (wartapemeriksa, 2024).

Permasalahan ini tidak lepas dari keterbatasan kompetensi sumber daya manusia (SDM) di pemerintah daerah. SDM yang kurang kompeten menyebabkan berbagai masalah, seperti ketidakmampuan dalam penyusunan regulasi, implementasi kebijakan yang lemah, serta kurangnya pengawasan dan evaluasi dalam pengelolaan anggaran dan layanan publik. Bahkan, pada aspek teknis, ditemukan ketidaksesuaian spesifikasi pekerjaan, kekurangan volume pekerjaan, dan pemborosan anggaran pada banyak pemerintah daerah, yang semuanya menunjukkan lemahnya kapasitas teknis dan manajerial SDM yang bertanggung jawab. Pengelolaan keuangan yang efektif dan akuntabel sangat bergantung pada kompetensi SDM yang terlibat dalam proses tersebut, mulai dari perencanaan anggaran, pelaksanaan, hingga pelaporan keuangan (Estrilia et al., 2023).

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Kusuma et al., (2021) dan Pratama (2019) menunjukkan bahwa kompetensi SDM berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Hal tersebut berarti bahwa semakin tinggi tingkat kompetensi SDM dalam pengelolaan keuangan daerah, semakin besar pula kemungkinan terjadinya peningkatan dalam akuntabilitas pengelolaan keuangan tersebut. Kompetensi SDM, dalam

konteks ini, merujuk pada kemampuan dan keahlian aparatur daerah dalam mengelola keuangan, yang memungkinkan pelaksanaan tugas secara efektif dan efisien sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan. Dengan adanya kompetensi SDM yang memadai, dapat terhindar dari kesalahan pencatatan dan pelaporan keuangan serta meningkatkan kualitas pertanggungjawaban keuangan daerah, sehingga akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah juga meningkat (Pratama, 2019).

Sementara itu, studi komparatif oleh Wijaya et al. (2024) yang tidak menemukan perbedaan signifikan dalam akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah yang dihasilkan. Hasil ini bertentangan dengan asumsi umum bahwa kompetensi SDM yang lebih tinggi akan menghasilkan akuntabilitas pengelolaan keuangan yang lebih baik. Meskipun telah banyak penelitian membahas pengelolaan keuangan daerah, terdapat celah riset yang belum tereksplorasi secara komprehensif, khususnya dalam konteks spesifik pengaruh simultan kompetensi SDM dan sistem pengendalian internal terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah di Indonesia.

Sistem akuntansi keuangan daerah adalah seperangkat prosedur yang digunakan oleh pemerintah daerah dalam mengelola anggaran, mencatat penerimaan dan pengeluaran, serta menyusun laporan keuangan yang akurat dan transparan. Sistem ini harus mengacu pada ketentuan yang berlaku di sektor publik agar dapat memberikan informasi yang dapat dipercaya dan dipertanggungjawabkan (Fahmi, 2019). Secara umum, sistem akuntansi keuangan dalam pemerintahan daerah bertujuan untuk memastikan penggunaan

anggaran yang efisien dan akuntabel, serta untuk memberikan laporan keuangan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik (Fahmi, 2019). Sistem akuntansi keuangan memiliki dampak yang signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Akuntabilitas dalam hal ini berarti kewajiban pemerintah daerah untuk mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran dan pengelolaan keuangan secara transparan kepada publik dan pihak-pihak yang berkepentingan (Surjono & Firdaus, 2017). Sistem akuntansi keuangan merupakan faktor kunci dalam mendukung akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Sistem akuntansi yang baik membantu memastikan bahwa pengelolaan keuangan daerah dilakukan dengan transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas. Hal ini terutama berlaku dalam konteks pengelolaan anggaran publik, di mana keakuratan dan keandalan laporan keuangan menjadi sangat penting. Sistem akuntansi yang efektif memastikan bahwa semua transaksi keuangan tercatat dengan benar, sehingga memungkinkan pemerintah daerah untuk memberikan pertanggungjawaban yang jelas kepada masyarakat dan lembaga pengawas seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) (Ningsih, 2021).

Pada tahun 2024 Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I (IHPS I), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengungkapkan adanya 1.045 permasalahan ketidakpatuhan dalam pemeriksaan Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga (LKKL) dan Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LKBUN) Tahun 2023. Dari jumlah tersebut, 652 permasalahan memiliki dampak finansial dengan nilai mencapai

Rp5,03 triliun, sementara 393 lainnya merupakan penyimpangan administrasi yang tidak berdampak finansial. Permasalahan ketidakpatuhan berdampak finansial mencakup kerugian sebesar Rp1,12 triliun (469 permasalahan), potensi kerugian sebesar Rp466,11 miliar (41 permasalahan), serta kekurangan penerimaan sebesar Rp3,44 triliun (142 permasalahan). Beberapa entitas telah menindaklanjuti temuan ini dengan menyerahkan aset dan/atau menyetorkan uang ke kas negara senilai Rp854,42 miliar selama proses pemeriksaan. Salah satu permasalahan signifikan yang diungkapkan adalah kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang yang terjadi pada 64 kementerian/lembaga. Salah satu kasus ini termasuk pekerjaan pemeliharaan gedung pada Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah serta UIN Ar-Raniry Banda Aceh. Selain itu, kelebihan pembayaran juga ditemukan pada 48 kementerian/lembaga, termasuk pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dan Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg), akibat kekurangan pemotongan uang muka, kesalahan perhitungan item pekerjaan, dan pengadaan jasa konsultasi yang tidak sesuai dengan Kerangka Acuan Kerja (KAK) (wartapemeriksa, 2024).

Permasalahan ini menunjukkan kelemahan mendasar dalam implementasi sistem akuntansi keuangan yang tidak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), seperti pencatatan yang tidak akurat, kelemahan pengendalian internal, ketidaksesuaian data dengan realisasi fisik, serta pemanfaatan sistem informasi akuntansi yang tidak optimal, sehingga diperlukan penguatan kompetensi SDM, pemanfaatan teknologi yang sesuai

standar, dan peningkatan pengawasan internal untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Molle dan Manafe (2023) dan Ningsih (2021) menunjukkan bahwa sistem akuntansi keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Hal tersebut menandakan bahwa penerapan sistem akuntansi yang baik dapat meningkatkan tingkat akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan di daerah. Dengan sistem akuntansi yang tepat, transparansi dalam penggunaan dana publik akan lebih terjaga, laporan keuangan menjadi lebih akurat dan tepat waktu, serta memungkinkan pihak terkait untuk lebih mudah mempertanggungjawabkan anggaran yang digunakan. Penelitian ini menegaskan pentingnya sistem akuntansi yang efektif sebagai salah satu faktor penentu dalam meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, yang pada akhirnya akan meningkatkan kepercayaan publik dan mencegah penyalahgunaan anggaran daerah.

Namun demikian, temuan kontradiktif diungkapkan dalam studi komparatif Rahman et al. (2024) yang menunjukkan tidak adanya perbedaan signifikan dalam akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, meskipun terdapat variasi dalam tingkat implementasi sistem akuntansi keuangan daerah. Hasil ini menantang paradigma yang selama ini diyakini bahwa implementasi sistem akuntansi keuangan daerah yang lebih baik akan secara otomatis meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan. Di tengah berkembangnya berbagai penelitian tentang pengelolaan keuangan daerah, masih terdapat ruang

eksplorasi yang belum tersentuh secara mendalam, terutama dalam mengkaji bagaimana sistem akuntansi keuangan daerah berinteraksi dengan pengawasan internal dalam mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah di Indonesia. Transparansi, kompetensi, dan sistem akuntansi keuangan merupakan faktor-faktor yang secara langsung mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Transparansi dalam pengelolaan anggaran dan laporan keuangan, kompetensi aparat pemerintah dalam menyusun laporan keuangan, serta penerapan sistem akuntansi yang tepat, semuanya berperan dalam meningkatkan tingkat akuntabilitas. Namun, pengaruh ketiga faktor ini dapat dipengaruhi oleh keberadaan SPIP sebagai pengendali internal yang menjamin bahwa pengelolaan keuangan dilakukan dengan tata kelola yang baik dan sesuai dengan standar yang ditetapkan.

Sistem pengendalian intern pemerintah dalam penelitian ini digunakan sebagai variabel moderasi, dimana variabel moderasi ini akan menunjukkan apakah Sistem pengendalian intern pemerintah dapat memperkuat atau memperlemah pengaruh transparansi, kompetensi, dan sistem akuntansi keuangan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Pengendalian suatu organisasi dari suatu satuan usaha terdiri dari kebijakan dan prosedur yang diciptakan untuk memberikan jaminan yang memadai agar tujuan dapat dicapai (Hafsah et al., 2019). SPIP merupakan mekanisme yang penting dalam mengawasi dan mengendalikan jalannya kegiatan keuangan pemerintah daerah untuk memastikan bahwa semua kegiatan tersebut dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan dapat dipertanggungjawabkan (Herlina *et al.*,

2021). SPIP diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, bertujuan untuk memastikan bahwa pengelolaan keuangan negara dilakukan secara efisien, efektif, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dalam penelitian ini, diusulkan bahwa SPIP tidak hanya bertindak sebagai pengendalian, tetapi juga sebagai variabel moderasi yang dapat memperkuat atau memperlemah hubungan antara transparansi, kompetensi, dan sistem akuntansi keuangan dengan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Herlina et al., (2021) menunjukkan bahwa SPIP mampu memoderasi hubungan transparansi dan sistem akuntansi keuangan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, sementara dalam penelitian Pratama (2017) menunjukkan bahwa SPIP mampu memoderasi hubungan kompetensi terhadap pengelolaan keuangan daerah. Namun dalam penelitian Herlina et al., (2021) SPIP belum dapat memoderasi pengaruh kompetensi terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Berdasarkan latar belakang dan fenomena permasalahan yang terdapat dalam penelitian ini mengenai akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah yang dipengaruhi oleh transparansi, kompetensi, dan sistem akuntansi keuangan dengan sistem pengendalian intern pemerintah sebagai variabel moderasi. Maka penelitian ini akan dilakukan dengan judul **“Pengaruh Transparansi, Kompetensi, Dan Sistem Akuntansi Keuangan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Dengan Penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Sebagai Variabel Moderasi”**.

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang dan fenomena yang telah diuraikan maka dalam penelitian ini terdapat identifikasi masalah yaitu sebagai berikut:

1. Adanya temuan BPK mengenai kekurangan volume pekerjaan pada Proyek Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Pagar di Kawasan Wisata Hutan Kota Langsa senilai Rp102.721.096,34, yang mengindikasikan masalah dalam transparansi terkait pelaksanaan proyek, khususnya volume pekerjaan yang sebenarnya dilaksanakan, tidak disampaikan secara terbuka kepada publik atau pemangku kepentingan terkait.
2. Adanya temuan BPK mengenai kekurangan volume pekerjaan pada Proyek Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Pagar di Kawasan Wisata Hutan Kota Langsa senilai Rp102.721.096,34, ini juga menunjukkan lemahnya akuntabilitas selama proses pelaksanaan proyek. Kekurangan volume pekerjaan berarti output fisik proyek tidak sesuai dengan anggaran yang telah dikeluarkan, sehingga tanggung jawab pelaksana tidak terpenuhi.
3. Masih terdapat permasalahan terkait kompetensi SDM di pemerintah daerah yang ditunjukkan oleh temuan BPK dalam IHPS 2023, termasuk ketidakmampuan dalam penyusunan regulasi, implementasi kebijakan yang lemah, serta kurangnya pengawasan dan evaluasi dalam pengelolaan anggaran.
4. Masih ditemukannya permasalahan dalam implementasi sistem akuntansi keuangan yang ditunjukkan oleh temuan BPK berupa 1.045

permasalahan ketidakpatuhan dalam pemeriksaan Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga (LKKL) dan Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LKBUN) Tahun 2023.

5. Belum optimalnya penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang ditunjukkan oleh temuan BPK mengenai berbagai kelemahan dalam sistem pengendalian internal dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Adanya indikasi permasalahan dalam pengelolaan APBD Kota Langsa yang ditunjukkan oleh data realisasi pendapatan yang belum mencapai 100% (dari data tahun 2020-2024 rata-rata realisasi 98,17%), yang mengindikasikan belum optimalnya pengelolaan keuangan daerah. Sisa 1,83% pendapatan daerah yang belum terealisasi disebabkan oleh adanya kelebihan target pajak daerah yang menjadi faktor penyebab rendahnya realisasi APBD.

1.3. Rumusan Masalah

1. Apakah transparansi berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah pada kantor Walikota Langsa ?
2. Apakah kompetensi berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah pada kantor Walikota Langsa ?
3. Apakah sistem akuntansi keuangan berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah pada kantor Walikota Langsa ?

4. Apakah sistem pengendalian intern pemerintah memoderasi pengaruh transparansi terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah pada kantor Walikota Langsa ?
5. Apakah sistem pengendalian intern pemerintah memoderasi pengaruh kompetensi terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah pada kantor Walikota Langsa ?
6. Apakah sistem pengendalian intern pemerintah memoderasi pengaruh sistem akuntansi keuangan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah pada kantor Walikota Langsa .

1.4. Tujuan Penelitian

1. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh transparansi terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah pada kantor Walikota Langsa.
2. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh kompetensi terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah pada kantor Walikota Langsa.
3. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh sistem akuntansi keuangan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah di kantor Walikota Langsa pada kantor Walikota Langsa.
4. Untuk menguji dan menganalisis sistem pengendalian intern pemerintah memoderasi pengaruh transparansi terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah pada kantor Walikota Langsa.

5. Untuk menguji dan menganalisis sistem pengendalian intern pemerintah memoderasi pengaruh kompetensi terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah pada kantor Walikota Langsa.
6. Untuk menguji dan menganalisis sistem pengendalian intern pemerintah memoderasi pengaruh sistem akuntansi keuangan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah pada kantor Walikota Langsa.

1.5. Manfaat Penelitian

Penelitian ini memiliki manfaat yang terbagi menjadi dua kategori yaitu manfaat secara teoritis dan manfaat secara praktis yang dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam memperkaya dan memperdalam teori-teori terkait akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Melalui kajian faktor-faktor seperti transparansi, kompetensi, dan sistem akuntansi keuangan, serta penerapan sistem pengendalian internal, penelitian ini akan menguji bagaimana faktor-faktor tersebut mempengaruhi akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan di tingkat pemerintah daerah.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini dapat memberikan dasar bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan transparansi, kompetensi, dan penerapan sistem akuntansi yang lebih baik. Dengan demikian, pengelolaan keuangan daerah dapat lebih terarah dan dapat dipertanggungjawabkan kepada

publik. Hal ini penting untuk memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1. Teori *Enterprise*

2.1.1.1. Pengertian Teori *Enterprise*

Menurut Harahap (1997) dalam Triyuwono (2006) *teori enterprise* lebih lengkap dibandingkan dengan teori lainnya, karena menyangkup aspek sosial dan aspek pertanggungjawaban. Berbeda dengan *entity theory* yang hanya memusatkan perhatiannya pada kelompok pemilik, sehingga hampir seluruh aktivitas perusahaan diarahkan untuk kesejahteraan pemilik perusahaan saja. *Enterprise theory* dalam hal ini tidak hanya memiliki sifat egois, tapi juga mulai mengadopsi sifat altruistik. Sebuah perusahaan dalam konteks teori enterprise dapat dijadikan bagian dari suatu komunitas sosial. Suatu lembaga membuat sebuah keputusan dipengaruhi oleh beberapa kelompok, dan tidak lagi terpengaruh hanya pada *stakeholder*. Dalam *Teori Enterprise* mengungkapkan bahwa peran sebenarnya akuntansi pada sebuah perusahaan dalam pengambilan keputusan yaitu membuat suatu laporan untuk dibagikan pada beberapa kelompok yang berkepentingan disebuah perusahaan.

Hubungan antara teori enterprise dan akuntansi sektor publik dapat dilihat dalam cara organisasi sektor publik, seperti pemerintah dan lembaga terkait, mengelola sumber daya, menyusun anggaran, serta melakukan pelaporan keuangan untuk mencapai tujuan yang efisien dan efektif. *Teori*

enterprise dalam akuntansi mengacu pada prinsip-prinsip dan praktik manajerial yang digunakan dalam sektor bisnis atau organisasi swasta, yang lebih fokus pada profitabilitas, efisiensi operasional, dan pengelolaan sumber daya yang optimal. Dalam konteks ini, keputusan keuangan berorientasi pada penciptaan nilai tambah bagi pemegang saham dan keuntungan perusahaan (Sudiby, 2002).

Sementara itu, akuntansi sektor publik berbeda karena tujuannya bukan untuk memperoleh keuntungan, tetapi untuk menyediakan layanan publik, menjaga keadilan sosial, dan mendukung pembangunan yang berkelanjutan. Oleh karena itu, akuntansi sektor publik lebih berfokus pada pengelolaan anggaran publik, transparansi, akuntabilitas, serta penyusunan laporan keuangan yang mencerminkan penggunaan sumber daya negara untuk kepentingan masyarakat. Meskipun tidak berorientasi pada keuntungan, efisiensi dalam pengelolaan anggaran publik tetap menjadi hal yang penting dalam sektor publik.

Penerapan prinsip-prinsip dari teori *enterprise*, seperti pengelolaan anggaran berbasis hasil (*outcome-based budgeting*) dan evaluasi kinerja, dapat meningkatkan efisiensi dalam sektor publik. Hal ini juga relevan dalam konteks akuntabilitas dan transparansi yang harus dijaga oleh sektor publik dalam pengelolaan dana publik. Prinsip transparansi dalam teori *enterprise* dapat diadopsi untuk memastikan pengeluaran negara sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Selain itu, pengelolaan kinerja juga menjadi aspek yang

penting. *Teori enterprise* menekankan pentingnya pengukuran kinerja dalam organisasi, dan pendekatan berbasis kinerja ini dapat diterapkan dalam sektor publik untuk menilai efektivitas program pemerintah dan kebijakan yang diambil. Dengan demikian, meskipun sektor publik tidak berorientasi pada profit, banyak konsep dalam teori *enterprise* yang dapat diadopsi untuk meningkatkan efisiensi, akuntabilitas, dan transparansi dalam pengelolaan anggaran dan laporan keuangan sektor publik (Triyuwono, 2001).

2.1.2. Transparansi

2.1.2.1. Pengertian Transparansi

Transparansi adalah prinsip yang memastikan setiap individu dapat mengakses informasi terkait penyelenggaraan pemerintahan, seperti kebijakan, proses pembuatan, dan hasil yang dicapai (Lalolo, 2003 dalam Adianto, 2017). Sedangkan menurut Mustopa Didjaja dalam (Adianto, 2017) mengatakan bahwa transparansi merupakan keterbukaan pemerintah dalam mendefinisikan kebijakan yang dapat diketahui oleh masyarakat, yang pada akhirnya memperkuat akuntabilitas antara pemerintah dan rakyat. Kristianten dalam (Adianto, 2017) menambahkan bahwa transparansi memberikan dampak positif pada tata pemerintahan, meningkatkan pertanggungjawaban para pembuat kebijakan, dan memastikan kontrol masyarakat terhadap pemegang otoritas berjalan dengan efektif.

Menurut Mardiasmo dalam (Novianti, 2019) transparansi dapat didefinisikan sebagai sikap terbuka dari pemerintah dalam menyertakan informasi terkait pengelolaan sumber daya publik kepada pihak-pihak yang

memerlukannya. Transparansi dalam pengelolaan keuangan merujuk pada prinsip keterbukaan dan akuntabilitas dalam mengelola sumber daya keuangan, baik di sektor publik maupun swasta. Dengan transparansi, setiap keputusan dan kebijakan yang diambil dalam pengelolaan keuangan dapat diawasi dan dipertanggungjawabkan. Tujuannya adalah untuk mengurangi praktik korupsi, meningkatkan kepercayaan masyarakat, serta memastikan bahwa dana yang digunakan benar-benar dipergunakan pada kepentingan publik.

Transparansi adalah salah satu prinsip penting dalam *good governance*. Prinsip ini didasarkan pada aliran informasi yang bebas, di mana seluruh proses pemerintahan, lembaga-lembaga, dan informasi terkait harus dapat diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Selain itu, informasi yang disediakan harus cukup lengkap dan mudah dipahami agar dapat dipantau dengan efektif (Coryanata, 2011). Transparansi berperan penting dalam meningkatkan akuntabilitas antara pemerintah dan rakyat, serta dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Melalui transparansi, pengelolaan sumber daya publik, terutama keuangan negara, dapat dipantau untuk mengurangi potensi korupsi, meningkatkan kepercayaan publik, dan memastikan bahwa dana digunakan untuk kepentingan masyarakat. Selain itu, informasi yang disediakan harus cukup lengkap, mudah dipahami, dan dapat diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan agar pengawasan dan kontrol terhadap pemegang otoritas dapat berjalan dengan efektif.

Berdasarkan berbagai definisi yang dikemukakan oleh para ahli, dapat disimpulkan bahwa transparansi merupakan prinsip keterbukaan yang mengharuskan pemerintah untuk menyediakan informasi yang jelas, terbuka, dan dapat diakses oleh masyarakat terkait dengan kebijakan, proses pembuatan kebijakan, serta hasil yang dicapai dalam penyelenggaraan pemerintahan. Transparansi tidak hanya berfokus pada penyediaan informasi, tetapi juga pada akuntabilitas, di mana setiap keputusan yang diambil oleh pemerintah dapat diawasi, dipertanggungjawabkan, dan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk melakukan kontrol.

2.1.2.2. Tujuan dan Manfaat Transparansi

Transparansi merujuk pada keterbukaan yang memberikan akses kepada semua pihak yang berkepentingan terhadap informasi penting, seperti peraturan, kebijakan, dan kegiatan pemerintah yang dapat diakses oleh masyarakat. Dengan adanya transparansi, arus informasi menjadi lebih bebas dan tersedia secara memadai untuk dipahami serta diawasi oleh publik. Hal ini juga mengurangi ketidakpastian dalam pembuatan kebijakan, memungkinkan masyarakat untuk memberikan masukan dalam pengambilan keputusan, meskipun hanya pada aspek-aspek tertentu. Selain itu, transparansi berfungsi sebagai langkah pencegahan terhadap praktik-praktik kecurangan, termasuk korupsi, karena setiap langkah dan hasil dari kebijakan pemerintah dapat dipantau oleh publik (Edowai, 2021).

Manfaat transparansi dapat membangun kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi yang

mudah diakses, serta menjamin kemudahan dalam memperoleh informasi yang akurat dan jelas. Menurut Andrianto (2007), ada beberapa manfaat penting dari transparansi, di antaranya:

1. Mencegah korupsi yang mungkin terjadi di antara para pemangku kepentingan dalam sebuah organisasi.
2. Mempermudah identifikasi kelemahan dan kekuatan dari kebijakan yang ada.
3. Meningkatkan akuntabilitas dalam pelayanan publik, sehingga memungkinkan masyarakat untuk menilai kinerja lembaga pemerintahan.
4. Meningkatkan kepercayaan terhadap komitmen lembaga dalam pengambilan keputusan kebijakan.
5. Memperkuat hubungan sosial antara masyarakat dengan masyarakat, serta antara masyarakat dengan pemerintah sebagai pengambil kebijakan, karena adanya kepercayaan terhadap pemerintahan.
6. Mendorong terciptanya suasana investasi yang lebih baik dan meningkatkan kepastian usaha.

2.1.2.3. Indikator Transparansi

Menurut Kristianten dalam (Fitriana, 2011) menjelaskan bahwa indikator transparansi adalah sebagai berikut:

1. Ketersediaan dan aksesibilitas dokumen

Ketersediaan dan aksesibilitas dokumen oleh pemerintah desa merupakan langkah penting untuk mewujudkan transparansi, sehingga

dapat mencegah terjadinya kecurangan atau penyalahgunaan Anggaran Dana Desa. Informasi tersebut harus tersedia dan dapat diakses oleh masyarakat dalam bentuk dokumen, baik berupa gambar maupun dokumen tertulis.

2. Kejelasan dan kelengkapan informasi

Informasi adalah sumber daya pengetahuan dan keterampilan yang dapat digunakan oleh individu untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi, kekuatan politik, serta status sosialnya. Keberadaan informasi sangat penting bagi masyarakat, agar mereka dapat memahami dengan jelas dan lengkap mengenai keterbukaan pemerintah desa. Masyarakat harus mengetahui, terlibat, dan menerima informasi yang tepat dan akurat tentang siapa yang menjalankan program, kapan program tersebut dilaksanakan, di mana lokasi pelaksanaannya, serta berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikannya. Selain itu, masyarakat juga berperan sebagai pengawas untuk memastikan bahwa pelaksanaan program pemerintah desa berjalan sesuai dengan yang direncanakan.

3. Keterbukaan proses

Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menyatakan bahwa badan publik wajib menyediakan informasi publik yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan. Penyampaian informasi yang transparan dan jujur tentang pengelolaan anggaran merupakan hak masyarakat untuk

mendapatkan pemahaman secara terbuka dan menyeluruh mengenai pengelolaan Anggaran Dana Desa. Keterbukaan atau transparansi merujuk pada kesediaan pemerintah desa untuk memberikan informasi yang faktual terkait berbagai hal yang berkaitan dengan proses penyelenggaraan pemerintahan.

4. Kerangka regulasi yang menjamin transparansi

Sebagai pemegang kekuasaan dalam pengelolaan keuangan daerah, Walikota harus mampu mengelola dana yang diterima sesuai dengan peraturan yang berlaku dan dapat mempertanggung jawabkannya kepada masyarakat. Pemerintah daerah juga berperan dalam mengawasi pelaksanaan program kegiatan yang dibiayai dengan anggaran daerah.

2.1.2.4 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Transparansi

Menurut Mardiasmo et al., (2008) dalam (Maulana J, 2023) menyatakan faktor-faktor yang mempengaruhi transparansi adalah:

1. *Informativeness* (informatif) merujuk pada pemberian informasi yang lengkap dan jelas kepada pemangku kepentingan, dengan memastikan bahwa data yang disampaikan akurat dan sesuai dengan fakta yang ada.
2. *Disclosure* (pengungkapan) berarti proses menyampaikan informasi kepada masyarakat atau publik (pemangku kepentingan) mengenai aktivitas, kebijakan, dan kinerja, terutama yang terkait dengan aspek

keuangan dan operasional, untuk memastikan adanya transparansi dalam pengelolaan sumber daya.

Transparansi dipengaruhi oleh dua faktor utama, yaitu informativeness yang menekankan pentingnya pemberian informasi yang lengkap, jelas, dan akurat kepada pemangku kepentingan agar data yang disampaikan dapat dipercaya dan sesuai dengan fakta, serta disclosure yang merujuk pada pengungkapan informasi mengenai aktivitas, kebijakan, dan kinerja, terutama dalam hal keuangan dan operasional, kepada masyarakat atau publik untuk memastikan pengelolaan sumber daya yang transparan, di mana kedua faktor ini berperan penting dalam menciptakan transparansi yang efektif dalam pengelolaan pemerintahan atau organisasi serta meningkatkan akuntabilitas dan kepercayaan publik.

2.1.3. Kompetensi

2.1.3.1. Pengertian Kompetensi

Kompetensi diartikan sebagai kecakapan, keterampilan, dan kemampuan. Kompetensi juga merupakan pengetahuan, keterampilan dan kemampuan yang berhubungan dengan pekerjaan (Sari et al., 2020). Secara etimologi, kompetensi dipahami sebagai dimensi perilaku yang mencakup keahlian, keunggulan, dan perilaku yang baik. Kompetensi merupakan sekumpulan atribut dalam diri individu hasil kombinasi dari pengetahuan, keahlian dan perilaku yang dapat meningkatkan kinerja individu itu sendiri (Gasperz, 2019). Kompetensi pada dasarnya merujuk pada karakteristik individu yang berhubungan langsung dengan hasil yang dicapai dalam

pekerjaan. Kompetensi tidak hanya mencakup pengetahuan dan keterampilan, tetapi juga bagian dari kepribadian yang mendalam, melekat, serta memengaruhi perilaku seseorang dalam berbagai situasi dan tugas pekerjaan (Rosanti, 2014). Dengan demikian, kompetensi menjadi indikator penting dalam menilai sejauh mana seseorang mampu menjalankan peran dan tanggung jawabnya secara efektif.

Dalam konteks manajemen sumber daya manusia (MSDM), kompetensi memiliki posisi yang sangat strategis. MSDM merupakan bagian dari ilmu manajemen yang memfokuskan perhatiannya pada pengaturan, pengelolaan, dan pengembangan peranan sumber daya manusia dalam kegiatan suatu organisasi. Keberhasilan organisasi tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan sumber daya manusia, tetapi juga oleh sejauh mana individu dalam organisasi tersebut memiliki kompetensi yang sesuai dengan tuntutan pekerjaannya (Zafira & Dahrani).

Atmadja & Saputra (2017) menyatakan bahwa kompetensi aparatur memiliki peran yang sangat penting dalam pengelolaan keuangan desa untuk mencapai tujuan bersama, yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan di bidang ekonomi, sosial, budaya, dan lainnya. Selain itu, aparatur desa akan diawasi dan bekerja langsung dengan badan pengawas keuangan yang independen, yang ditunjuk oleh pemerintah pusat untuk mengawasi penggunaan dana desa dan memastikan pertanggungjawabannya. Sementara itu, Wirakusuma & Setiawan (2019) berpendapat bahwa kompetensi berpengaruh negatif terhadap

kecenderungan kecurangan akuntansi, yang berarti semakin tinggi kompetensi seseorang, semakin rendah kemungkinan terjadinya tindakan kecurangan akuntansi.

Dalam Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Sipil No. 46a Tahun 2003 mengenai Pedoman Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan Struktural Pegawai Negeri Sipil, dijelaskan bahwa kompetensi merujuk pada kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh seorang pegawai negeri sipil. Kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan, serta sikap dan perilaku yang diperlukan dalam menjalankan tugas jabatannya, sehingga pegawai negeri sipil dapat melaksanakan tugasnya dengan cara yang profesional, efektif, dan efisien. Kompetensi menggambarkan keterampilan atau pengetahuan yang mencerminkan profesionalisme dalam suatu bidang tertentu, yang dianggap sebagai hal terpenting dan unggul dalam bidang tersebut. Kompetensi juga merujuk pada kemampuan seseorang untuk mencapai hasil yang memadai di tempat kerja, termasuk kemampuan untuk mentransfer dan menerapkan keterampilan serta pengetahuan dalam situasi baru, serta meningkatkan manfaat yang telah disepakati (Wibowo, 2018).

Berdasarkan dari beberapa definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa kompetensi merujuk pada sekumpulan kemampuan, keahlian, dan perilaku yang dimiliki oleh individu, yang berperan penting dalam meningkatkan kinerja dan mencapai hasil yang diinginkan, baik dalam pekerjaan maupun tugas lainnya. Kompetensi melibatkan kombinasi pengetahuan,

keterampilan, dan sikap yang dapat diprediksi dan diterapkan dalam berbagai situasi. Dalam konteks aparatur negara, kompetensi memiliki peran krusial dalam pengelolaan keuangan dan pelaksanaan tugas, yang berhubungan langsung dengan akuntabilitas dan pengawasan. Semakin tinggi tingkat kompetensi seseorang, semakin rendah kecenderungannya untuk melakukan kecurangan, sehingga kompetensi juga berkontribusi pada integritas dan profesionalisme dalam pelaksanaan tugas. Kompetensi yang baik memungkinkan individu untuk mencapai hasil yang efektif, efisien, dan profesional dalam pekerjaannya.

2.1.3.2. Tujuan dan Manfaat Kompetensi

Kompetensi adalah kombinasi dari pengetahuan, keterampilan, sikap, dan perilaku yang diperlukan untuk melaksanakan tugas atau pekerjaan tertentu dengan efektif dan efisien. Kompetensi mencakup kemampuan teknis, kecerdasan emosional, serta sikap dan perilaku yang mendukung pencapaian hasil yang optimal dalam pekerjaan. Di dalam konteks profesional, kompetensi menggambarkan sejauh mana seseorang mampu melaksanakan tanggung jawab dalam pekerjaannya, serta bagaimana kemampuan tersebut dapat diaplikasikan dalam berbagai situasi yang relevan (Husna dan Maryam, 2022).

Kompetensi yang mencakup kombinasi pengetahuan, keterampilan, sikap, dan perilaku berperan sebagai foundation yang memungkinkan motivasi untuk diwujudkan dalam tindakan nyata. Ketika seseorang memiliki kompetensi yang memadai, mereka akan merasa lebih percaya diri

dan mampu untuk menghadapi tantangan pekerjaan, yang pada gilirannya akan meningkatkan motivasi intrinsik mereka (Dahrani, 2024). Kemampuan teknis yang solid, kecerdasan emosional yang baik, serta sikap profesional yang tepat memberikan individu tools yang diperlukan untuk mentransformasikan motivasi menjadi hasil yang konkret. Sebaliknya, keterbatasan kompetensi dapat menjadi barrier yang menghambat realisasi motivasi, bahkan dapat menurunkan tingkat motivasi karena individu merasa tidak mampu mencapai tujuan yang diinginkan.

Menurut Alam (2019), ada beberapa tujuan penting dari kompetensi, di antaranya:

1. Meningkatkan Kinerja Individu dan Organisasi

Tujuan utama kompetensi adalah untuk meningkatkan kinerja baik pada level individu maupun organisasi. Kompetensi yang tinggi memungkinkan seseorang untuk mencapai hasil kerja yang lebih baik, lebih cepat, dan lebih tepat, yang secara langsung berdampak pada keberhasilan organisasi.

2. Pencapaian Tujuan Profesional

Kompetensi bertujuan untuk membantu individu dalam mencapai tujuan karier dan profesional mereka. Seseorang yang memiliki kompetensi yang baik akan lebih siap menghadapi tantangan di dunia kerja, membuka peluang untuk kemajuan karier, dan mampu mengambil keputusan yang tepat.

3. Meningkatkan Kemampuan Adaptasi

Salah satu tujuan kompetensi adalah meningkatkan kemampuan individu untuk beradaptasi dengan perubahan yang terjadi di lingkungan kerja, seperti teknologi baru atau perubahan pasar. Kompetensi memungkinkan seseorang untuk tetap relevan dan efektif dalam menghadapi perubahan tersebut.

4. Meningkatkan Produktivitas dan Efisiensi

Kompetensi membantu meningkatkan produktivitas dan efisiensi kerja. Dengan memiliki keterampilan yang sesuai dan pengetahuan yang memadai, individu dapat menyelesaikan tugas dengan lebih cepat dan dengan kualitas yang lebih baik, yang meningkatkan efisiensi operasional.

5. Mengurangi Kesalahan dan Risiko

Dengan kompetensi yang memadai, individu dapat lebih mengurangi risiko kesalahan dalam pekerjaan, baik dalam pengambilan keputusan maupun dalam pelaksanaan tugas. Pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki membantu menghindari kesalahan yang dapat merugikan organisasi atau individu itu sendiri.

6. Meningkatkan Kepuasan Kerja

Kompetensi juga bertujuan untuk meningkatkan kepuasan kerja. Ketika seseorang merasa mampu dan percaya diri dalam menyelesaikan tugas-tugasnya, mereka cenderung lebih puas dengan pekerjaan yang dilakukan dan lebih termotivasi untuk terus berkembang.

Sementara Menurut Manao K (2020), ada beberapa manfaat penting dari kompetensi, di antaranya:

1. Peningkatan Efisiensi dan Produktivitas

Dengan kompetensi yang sesuai, individu dapat menyelesaikan tugas dengan lebih cepat dan lebih tepat, sehingga meningkatkan efisiensi dan produktivitas kerja.

2. Mengurangi Risiko Kesalahan

Individu yang kompeten memiliki kemampuan untuk meminimalkan kesalahan atau kegagalan dalam pekerjaan. Pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki membantu dalam pengambilan keputusan yang lebih baik dan tepat.

3. Peningkatan Kepuasan Kerja

Kompetensi yang baik memungkinkan seseorang untuk merasa lebih percaya diri dalam pekerjaannya, yang dapat meningkatkan kepuasan kerja dan motivasi untuk terus berkembang.

4. Meningkatkan Daya Saing

Kompetensi yang kuat membuat individu atau organisasi lebih unggul dibandingkan dengan pesaing. Dengan keterampilan dan pengetahuan yang relevan, individu lebih siap bersaing dalam pasar kerja yang kompetitif.

5. Kepemimpinan yang Efektif

Kompetensi tidak hanya penting untuk anggota tim, tetapi juga untuk para pemimpin. Pemimpin yang kompeten mampu mengelola tim

secara efektif, memotivasi anggota tim, dan mengarahkan mereka untuk mencapai tujuan organisasi.

2.1.3.3. Indikator Kompetensi

Menurut Liestyodono dalam (Manao K, 2020) menjelaskan bahwa indikator kompetensi adalah sebagai berikut:

1. Pengalaman kerja

Pengalaman kerja menjadi landasan bagi seorang pegawai untuk menempatkan diri dalam situasi yang tepat, mengambil risiko dengan keberanian, menghadapi tantangan dengan rasa tanggung jawab, serta berkomunikasi secara efektif dengan berbagai pihak. Hal ini penting untuk menjaga produktivitas dan kinerja, serta membentuk individu yang kompeten di bidangnya.

2. Pendidikan

Pendidikan merupakan suatu proses yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman teori dan keterampilan dalam menyelesaikan masalah-masalah terkait kegiatan guna mencapai tujuan. Upaya ini dilakukan untuk meningkatkan kontribusi produktif pegawai serta mengembangkan sumber daya manusia agar dapat menghadapi berbagai kemungkinan yang timbul akibat perubahan lingkungan.

3. Pengetahuan

Pengetahuan (*knowledge*) merupakan pengetahuan atau informasi seseorang dalam bidang spesifik tertentu.

4. Keterampilan

Ketrampilan (*skills*) merupakan kemampuan dalam melaksanakan tugas fisik atau tugas mental tertentu.

2.1.3.4. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kompetensi

Menurut Zwell dalam (Manao K, 2020) menjelaskan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi kompetensi adalah sebagai berikut:

1. Keyakinan dan nilai-nilai

Perilaku seseorang begitu dipengaruhi oleh keyakinannya terhadap diri sendiri dan orang lain. Ketika seseorang percaya pada kemampuannya untuk melakukan suatu tugas, maka tugas tersebut akan terasa lebih mudah untuk diselesaikan.

2. Karakteristik kepribadian

Kepribadian bukanlah sesuatu yang tetap dan tidak dapat diubah; kepribadian seseorang akan memengaruhi cara-cara individu tersebut dalam mengatasi berbagai permasalahan hidup, yang pada gilirannya akan meningkatkan kompetensinya. Seseorang akan merespons dan beradaptasi dengan lingkungan serta faktor-faktor di sekitarnya, yang akan berkontribusi pada peningkatan kompetensinya.

3. Motivasi

Motivasi merupakan dorongan yang mendorong seseorang untuk melakukan suatu hal. Dorongan psikologis ini dapat meningkatkan energi fisik, yang pada gilirannya mempermudah pelaksanaan tugas dan meningkatkan kompetensi individu. Selain itu, motivasi yang

diberikan oleh atasan kepada bawahan juga memiliki pengaruh positif terhadap kinerja staf.

4. Isu Emosional

Kondisi emosional seseorang mempengaruhi cara dia tampil, termasuk dalam kinerja kerja. Rasa percaya diri dapat mendorong seseorang untuk melaksanakan tugas dengan lebih baik, sementara gangguan emosional seperti rasa takut dan malu dapat menurunkan kinerja dan berdampak negatif pada kompetensinya.

5. Kemampuan Intelektual

Kompetensi dipengaruhi oleh kemampuan intelektual, kognitif, analitis, dan konseptual. Tingkat intelektual seseorang dipengaruhi oleh pengalaman dan proses pembelajaran, yang pada gilirannya akan meningkatkan kompetensi individu tersebut.

6. Budaya Organisasi

Budaya organisasi memiliki dampak terhadap kompetensi individu dalam berbagai aktivitas, karena budaya tersebut memengaruhi kinerja, hubungan antar karyawan, motivasi kerja, dan hal-hal lainnya yang pada akhirnya akan berpengaruh pada kompetensi orang tersebut.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa kompetensi dipengaruhi oleh faktor-faktor yang saling terkait, seperti keyakinan dan nilai-nilai, karakteristik kepribadian, motivasi, kondisi emosional, kemampuan intelektual, dan budaya organisasi, yang semuanya

berperan penting dalam meningkatkan kemampuan individu dan mencapai kinerja optimal.

2.1.4. Sistem Akuntansi Keuangan

2.1.4.1. Pengertian Sistem Akuntansi Keuangan

Sistem akuntansi adalah serangkaian prosedur yang digunakan untuk menghasilkan informasi yang berguna baik bagi pihak internal maupun eksternal suatu instansi. Bockholdt dalam Lesmana & Lufriansyah (2019) menyebutkan sistem pengendalian akunting sangat penting bagi perusahaan sebagai salah satu tujuannya untuk menyelamatkan aset organisasi. Setiap instansi memiliki kebebasan untuk merancang dan menerapkan prosedur-prosedur yang diperlukan (Erni et al., dalam Aprisyah & Yuliati, 2021). Pengelolaan keuangan dalam suatu negara atau daerah, pemerintah membutuhkan sistem akuntansi yang dapat mengelola keuangan dan transaksi ekonomi yang semakin kompleks dan beragam. Menurut Halim dalam (Leunupun et al. (2022) yang mengutip Kepmendagri No. 29 Tahun 2002 pasal 70 ayat (1), sistem akuntansi keuangan daerah adalah sistem yang mencakup proses pencatatan, penggolongan, penafsiran, peringkasan transaksi atau kejadian keuangan, serta pelaporan keuangan terkait pelaksanaan APBD, yang dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku secara umum.

Menurut Utami et al. (2020), Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) adalah serangkaian subsistem yang masing-masing memiliki tahapan, prosedur, perangkat, dan peraturan yang harus diikuti untuk

mengumpulkan dan mencatat data keuangan. Sementara menurut Rasdianto (2019), yang dimaksud dengan sistem akuntansi keuangan daerah adalah sistem yang melingkupi proses pencatatan, penggolongan, penafsiran, peringkasan transaksi atau kejadian keuangan, serta penyusunan laporan keuangan dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). Sistem akuntansi keuangan daerah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrua pada Pemerintah Daerah. Menurut peraturan tersebut, Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (Sistem Akuntansi Keuangan Daerah) adalah rangkaian prosedur, penyelenggaraan, peralatan, dan elemen lainnya yang sistematis dalam melaksanakan fungsi akuntansi, mulai dari analisis transaksi hingga pelaporan keuangan di lingkungan pemerintah daerah.

Permendagri No. 13 Tahun 2006 mengatur bahwa sistem akuntansi keuangan daerah mencakup serangkaian proses, mulai dari pengumpulan data, pencatatan, penyusunan ringkasan, hingga pelaporan keuangan yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. Proses ini dapat dilakukan secara manual atau dengan menggunakan perangkat lunak komputer (Gustina, 2021).

Berdasarkan berbagai pendapat yang dikemukakan oleh para ahli, dapat disimpulkan bahwa Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) merupakan serangkaian prosedur yang digunakan untuk mengelola dan menghasilkan informasi keuangan yang akurat dan transparan dalam rangka

pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). Sistem ini mencakup proses pengumpulan data, pencatatan, penggolongan, penyusunan ringkasan, dan pelaporan keuangan terkait transaksi atau kejadian keuangan di lingkungan pemerintah daerah. Secara keseluruhan, SAKD merupakan elemen penting dalam pengelolaan keuangan negara atau daerah, yang memungkinkan pemerintah untuk mengelola transaksi ekonomi yang semakin kompleks dan beragam dengan cara yang terstruktur dan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku.

2.1.2.3. Tujuan dan Manfaat Sistem Akuntansi Keuangan

Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) adalah serangkaian prosedur, aturan, dan perangkat yang digunakan oleh pemerintah daerah untuk mengelola dan mencatat seluruh transaksi keuangan yang terjadi dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Sistem ini mencakup proses pencatatan, penggolongan, pelaporan, serta pengendalian terhadap segala aktivitas keuangan yang dilakukan oleh pemerintah daerah. SAKD bertujuan untuk menghasilkan informasi keuangan yang transparan, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan, yang nantinya digunakan untuk perencanaan, pengawasan, serta evaluasi pengelolaan keuangan daerah.

Menurut Nordiawan dalam (Izzati K, 2021) Sistem akuntansi keuangan pemerintah daerah (sektor publik) memiliki tiga tujuan utama yaitu:

1. Pertanggungjawaban

Akuntansi pemerintah harus menyediakan informasi keuangan yang lengkap, akurat, dalam format yang tepat, dan dalam waktu yang sesuai, yang berguna bagi pihak yang bertanggung jawab pada masing-masing unit pemerintahan.

2. Manajerial

Tujuan manajerial ini bertujuan agar organisasi pemerintah, baik di tingkat atas maupun menengah, dapat menggunakan informasi keuangan dari pelaksanaan sebelumnya untuk mendukung pengambilan keputusan dan perencanaan untuk masa depan.

3. Pengawasan

Akuntansi pemerintah harus memungkinkan pelaksanaan pemeriksaan oleh aparat pengawasan secara efisien dan efektif. Salah satu tujuan dari SAKD adalah untuk menyediakan informasi keuangan yang lengkap, akurat, dan tepat, sehingga menghasilkan laporan keuangan yang dapat dipercaya, dapat dipertanggungjawabkan, dan dapat digunakan oleh berbagai pihak eksternal.

2.1.4.3. Indikator Sistem Akuntansi Keuangan

Menurut Permadi (2013) dalam (Izzati K, 2021) menjelaskan bahwa indikator sistem akuntansi keuangan daerah adalah sebagai berikut:

1. Kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintah

Sistem akuntansi keuangan daerah harus mengikuti Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang berlaku, dengan menggunakan basis akrual.

Basis akrual mengharuskan pengakuan transaksi keuangan pada saat terjadinya peristiwa ekonomi, yaitu ketika hak atau kewajiban sudah muncul, meskipun kasnya belum diterima atau dibayarkan.

2. Prosedur Pencatatan Akuntansi Berdasarkan Standar Umum

Setiap transaksi yang terjadi harus dicatat sesuai dengan standar pencatatan yang berlaku secara umum. Selain itu, setiap transaksi harus dianalisis dan dilengkapi dengan bukti transaksi yang sah.

3. Penyusunan Laporan Keuangan Secara Periodik

Laporan keuangan daerah disusun dengan tujuan untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai kondisi keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik. Laporan tersebut harus disusun dan disampaikan secara periodik untuk mendukung pengambilan keputusan yang tepat di masa depan.

2.1.4.4. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Sistem Akuntansi Keuangan

Menurut Zwell dalam (Manao K, 2020) menjelaskan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi sistem akuntansi keuangan daerah adalah sebagai berikut:

1. Kompetensi Aparatur Pemerintah

Keberhasilan penerapan sistem akuntansi keuangan daerah sangat bergantung pada kompetensi aparatur yang terlibat dalam pengelolaan keuangan. Aparatur yang memiliki pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman yang memadai dalam akuntansi akan lebih mampu

mengimplementasikan sistem akuntansi dengan baik, meminimalkan kesalahan dalam pencatatan dan pelaporan, serta memastikan kepatuhan terhadap standar yang berlaku.

2. Akuntabilitas

Akuntabilitas menciptakan dasar yang kuat untuk pengelolaan keuangan yang transparan, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan. Ketika akuntabilitas menjadi fokus utama, sistem akuntansi daerah dirancang agar dapat menghasilkan laporan yang sesuai dengan standar ini, sehingga memastikan pengelolaan keuangan yang transparan dan akurat.

3. Peraturan dan Kebijakan Pemerintah

Sistem akuntansi keuangan daerah sangat dipengaruhi oleh peraturan dan kebijakan yang berlaku, baik di tingkat pusat maupun daerah. Peraturan seperti Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan Peraturan Pemerintah terkait pengelolaan keuangan daerah memberikan pedoman tentang bagaimana transaksi keuangan harus dicatat, dilaporkan, dan diaudit. Sistem akuntansi harus sesuai dengan standar yang ditetapkan untuk memastikan transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan terhadap hukum.

2.1.5. Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah

2.1.5.1. Pengertian Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah

Akuntabilitas, yang berasal dari kata "*accountability*" dalam bahasa Inggris, merujuk pada kewajiban atau tanggung jawab individu untuk

memberikan penjelasan atau pertanggungjawaban atas tindakan atau keputusan yang diambilnya (Silvia & Hanum, 2024). Menurut Mardiasmo (2016) dalam (Avisha, 2023), akuntabilitas adalah kewajiban pihak yang diberi amanah (agen) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak yang memberi amanah (prinsipal), yang memiliki hak dan wewenang untuk meminta pertanggungjawaban tersebut. Sementara itu, Ulum (2010) dalam (Avisha, 2023) berpendapat bahwa akuntabilitas adalah kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi, dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui laporan pertanggungjawaban yang dilakukan secara berkala.

Keuangan daerah mencakup seluruh hak dan kewajiban daerah yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan, yang dapat dinilai dengan uang, termasuk segala bentuk kekayaan yang terkait dengan hak dan kewajiban tersebut. Pengelolaan keuangan daerah adalah rangkaian kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pencatatan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan terhadap keuangan daerah (Hehanussa, 2015).

Akuntabilitas keuangan daerah merupakan kewajiban bagi pihak yang mengelola keuangan daerah untuk memberikan penjelasan, pertanggungjawaban, dan laporan yang transparan mengenai pengelolaan keuangan tersebut kepada pihak yang berwenang, seperti pemerintah pusat,

DPRD, dan masyarakat. Hal ini mencakup seluruh aktivitas yang terkait dengan pengelolaan keuangan daerah, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pencatatan, pelaporan, hingga pengawasan, dengan tujuan untuk memastikan bahwa pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara efisien, efektif, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Akuntabilitas ini juga mencakup pertanggungjawaban atas keberhasilan atau kegagalan dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam pengelolaan keuangan daerah.

Menurut Mardiasmo (2004) dalam (Avisha, 2023) akuntabilitas publik terdiri atas dua macam, yaitu Akuntabilitas vertikal dan Akuntabilitas horizontal. Adapun jenis-jenis akuntabilitas publik tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Akuntabilitas vertikal (*vertical accountability*) adalah kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dana kepada otoritas yang lebih tinggi. Contohnya, pertanggungjawaban unit kerja (dinas) kepada pemerintah daerah, pemerintah daerah kepada pemerintah pusat, dan pemerintah pusat kepada MPR. Ini berlaku di setiap tingkat organisasi dalam penyelenggaraan negara, termasuk pemerintahan. Setiap pejabat atau petugas publik, baik individu maupun kelompok, secara hierarkis wajib memberikan laporan mengenai perkembangan kinerja atau hasil pelaksanaan tugasnya secara berkala atau ketika diperlukan kepada atasan langsung.

2. Akuntabilitas horizontal (*horizontal accountability*) adalah kewajiban untuk mempertanggungjawabkan kepada masyarakat luas. Akuntabilitas ini melekat pada setiap lembaga negara yang bertugas untuk mempertanggungjawabkan amanat yang telah diterima dan dilaksanakan, serta menyampaikan perkembangan atau hasilnya kepada pihak eksternal dan masyarakat.

2.1.5.2. Tujuan dan Manfaat Akuntabilitas Keuangan Daerah

Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah merujuk pada sejauh mana pemerintah daerah bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan yang mencakup kebijakan dan penggunaan anggaran, serta dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Instrumen utama yang mendukung akuntabilitas tersebut meliputi anggaran pemerintah, laporan tahunan, data yang dipublikasikan secara periodik, serta hasil investigasi dan laporan umum lainnya (Vidyasari & Suryono, 2021).

Tujuan dan manfaat dari akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah adalah untuk memastikan bahwa seluruh proses pengelolaan keuangan dilakukan secara transparan, efisien, dan bertanggung jawab. Beberapa tujuan dan manfaat utama dari akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah menurut Zeyn (2014) meliputi:

1. Menentukan Tujuan yang Tepat

Akuntabilitas bertujuan untuk memastikan bahwa tujuan yang ditetapkan dalam kebijakan keuangan daerah jelas, terukur, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Ini penting agar anggaran yang

dialokasikan dapat digunakan dengan maksimal untuk mencapai tujuan pembangunan yang telah ditetapkan.

2. Mengembangkan Standar yang Dibutuhkan untuk Mencapai Tujuan

Akuntabilitas membantu dalam mengembangkan dan menerapkan standar yang jelas terkait dengan penggunaan anggaran dan pengelolaan keuangan daerah. Standar ini akan memandu seluruh proses pengelolaan keuangan untuk memastikan penggunaan dana yang tepat sesuai dengan tujuan yang telah disepakati.

3. Secara Efektif Mempromosikan Penerapan Standar

Agar tujuan dan standar yang telah ditetapkan dapat tercapai, akuntabilitas juga mendorong penerapan standar tersebut secara efektif dalam setiap proses pengelolaan keuangan daerah. Hal ini mencakup penerapan prosedur yang sesuai dalam penyusunan anggaran, pelaporan, dan pengawasan anggaran.

4. Mengembangkan Pengelolaan yang Ekonomis dan Efisien

Salah satu tujuan dari akuntabilitas adalah untuk memastikan bahwa sumber daya keuangan yang ada digunakan dengan cara yang paling efisien dan ekonomis. Ini berarti bahwa dana yang tersedia digunakan secara optimal untuk mencapai hasil yang diinginkan tanpa pemborosan.

2.1.5.3. Indikator Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah

Menurut Mudjiyono (2018) dalam (Avisha, 2023), indikator akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah sektor publik terdiri dari empat poin utama, yaitu:

1. Akuntabilitas Kejujuran dan Hukum

Akuntabilitas kejujuran berkaitan dengan upaya menghindari penyalahgunaan kekuasaan, sementara akuntabilitas hukum berfokus pada kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku dalam pengelolaan keuangan.

2. Akuntabilitas Proses

Merupakan penerapan prosedur administrasi, sistem informasi akuntansi, dan manajemen yang baik dalam pelaksanaan tugas pengelolaan keuangan.

3. Akuntabilitas Program

Berkaitan dengan penilaian efektivitas dan efisiensi tujuan serta program yang telah dilaksanakan, dimana hasil yang dicapai harus maksimal dengan biaya yang minim.

4. Akuntabilitas Kebijakan

Mengharuskan semua kebijakan pemerintah untuk dipertanggung jawabkan kepada DPR dan masyarakat.

Dapat disimpulkan bahwa indikator akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah sektor publik terdiri dari empat poin utama diatas yang mengharuskan pemerintah mempertanggungjawabkan kebijakan kepada

DPR dan masyarakat. Keempat indikator ini dapat menjadi tolak ukur tercapainya transparansi dan efisiensi pengelolaan keuangan daerah.

2.1.5.4. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Akuntabilitas Keuangan Daerah

Faktor-faktor yang mempengaruhi akuntabilitas keuangan daerah dapat meliputi beberapa aspek penting, antara lain:

1. Transparansi

Transparansi adalah salah satu faktor utama yang mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah mengacu pada keterbukaan pemerintah daerah dalam menyajikan informasi yang jelas, akurat, dan dapat diakses oleh publik mengenai penggunaan anggaran dan alokasi sumber daya keuangan. Penerapan transparansi yang baik memastikan bahwa setiap keputusan dan proses dalam pengelolaan keuangan dapat dipantau, dievaluasi, dan dipertanggungjawabkan.

2. Kompetensi

Kompetensi aparatur sebagai aktor sangat berperan dalam mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Aparatur yang memiliki kompetensi yang baik, baik dari segi pengetahuan, keterampilan, maupun pengalaman, mampu menjalankan tugasnya dengan lebih efektif dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kompetensi ini mencakup kemampuan untuk memahami regulasi, prosedur, serta prinsip-prinsip akuntansi dan manajemen keuangan

daerah (Riska, 2020). Dengan kompetensi yang memadai, aparatur dapat memastikan bahwa pengelolaan anggaran dan penggunaan dana daerah dilaksanakan dengan transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas. Selain itu, mereka dapat mengidentifikasi potensi masalah atau penyimpangan dalam pengelolaan keuangan dan melakukan tindakan yang tepat untuk mengatasinya. Sebaliknya, kurangnya kompetensi dapat menyebabkan kesalahan dalam pengelolaan, yang dapat berakibat pada temuan negatif dalam audit dan merusak kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah (Herlina et al., 2021).

3. Sistem Akuntansi Keuangan

Sistem akuntansi keuangan daerah adalah faktor krusial yang mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Sistem ini mencakup seluruh prosedur, aturan, dan teknologi yang digunakan untuk mencatat, mengklasifikasikan, mengelola, dan melaporkan transaksi keuangan daerah. Pengelolaan keuangan yang baik dan akuntabel bergantung pada keberhasilan penerapan sistem akuntansi yang tepat dan sesuai standar.

4. Sistem Pengendalian Internal

Sistem pengendalian internal pemerintah memegang peran penting sebagai aktor yang mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Pengendalian internal yang efektif memastikan bahwa seluruh kegiatan pemerintahan, terutama yang terkait dengan pengelolaan keuangan daerah, dilaksanakan sesuai dengan peraturan dan prosedur

yang berlaku. Pengendalian internal diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, yang menetapkan bahwa sistem pengendalian internal pemerintah harus diterapkan baik di tingkat pemerintah pusat maupun daerah, dengan ketentuan lebih lanjut yang diatur melalui Peraturan Gubernur atau Peraturan Bupati/Walikota berdasarkan pedoman dari peraturan tersebut. Dengan penerapan pengendalian internal yang baik, penyelenggaraan pemerintahan akan berjalan sesuai aturan yang berlaku, sehingga meningkatkan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah (Luqyana & Islahuddin, 2022).

2.1.6. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

2.1.6.1. Pengertian Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

Menurut PP No. 60 Tahun 2008 sistem pengendalian internal adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan (Januri & Alpi, 2024). Sistem pengendalian internal pemerintah yang diterapkan di Indonesia mengacu pada sistem pengendalian internal yang dikembangkan oleh GAO (*Government Accountability Office*), lembaga Badan Pemeriksa Keuangan di Amerika Serikat, serta oleh COSO (*Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission*), sebuah komisi yang bergerak

di bidang manajemen organisasi (Khasanah, 2013 dalam Makatita, 2022). Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 mendeskripsikan sistem pengendalian internal sebagai suatu proses yang terintegrasi dari tindakan dan kegiatan yang dilaksanakan secara berkelanjutan oleh pengelola dan seluruh pegawai, untuk memberikan kepastian yang wajar terkait pencapaian tujuan organisasi, pengelolaan kekayaan negara, serta kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku. Sementara itu, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) adalah sistem pengendalian internal yang diterapkan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan daerah (Nilam Sari, 2016 dalam Ridzal et al, 2022).

Menurut BPKP, sistem pengendalian internal merupakan bagian dari manajemen yang dirancang untuk memberikan keyakinan yang memadai bahwa pengelolaan keuangan negara berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola yang baik, serta mengurangi risiko penyalahgunaan dan kebocoran keuangan negara (Bpkp, 2024). Sistem pengendalian internal pemerintah diterapkan untuk mencapai tujuan organisasi melalui proses yang menyeluruh dalam tindakan dan aktivitas oleh pimpinan serta seluruh pegawai secara berkelanjutan. Tujuan utamanya adalah memberikan keyakinan yang memadai melalui pelaksanaan kegiatan yang efektif dan efisien, penyajian laporan keuangan yang dapat dipercaya, perlindungan terhadap aset negara, serta kepatuhan terhadap peraturan dan perundang-undangan yang berlaku (Bpkp.go.id, 2019).

Dari beberapa definisi diatas disimpulkan bahwa sistem pengendalian internal pemerintah (SPIP) di Indonesia merupakan mekanisme yang mengacu pada standar internasional GAO dan COSO, diterapkan secara terintegrasi dan berkelanjutan oleh seluruh pegawai pemerintah untuk memastikan efektivitas, efisiensi, dan kepatuhan terhadap peraturan, serta untuk melindungi aset negara dan mengelola keuangan negara dengan baik guna mencegah penyalahgunaan dan kebocoran.

2.1.6.2. Tujuan dan Manfaat Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

Secara umum, tujuan dari sistem pengendalian intern adalah untuk membantu suatu organisasi mencapai tujuan operasional, yang meliputi efektivitas dan efisiensi kegiatan, keandalan laporan keuangan, serta kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku. Secara lebih rinci, menurut Makatita (2022) tujuan dari SPIP mencakup beberapa aspek penting, yaitu:

1. Meningkatkan Efektivitas dan Efisiensi Kegiatan Pemerintahan

SPIP bertujuan untuk memastikan bahwa semua kegiatan pemerintahan dilakukan dengan cara yang efektif dan efisien. Hal ini mencakup penggunaan sumber daya yang optimal, pencapaian tujuan yang telah ditetapkan, serta penyelesaian tugas-tugas pemerintahan secara tepat waktu dan sesuai rencana.

2. Meningkatkan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan

SPIP bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah, yang mencakup pertanggungjawaban yang jelas dan terbuka terhadap penggunaan anggaran dan sumber daya publik.

Sistem ini memastikan bahwa setiap penggunaan dana publik dapat dipertanggungjawabkan dengan tepat, dan masyarakat dapat mengetahui bagaimana anggaran digunakan.

3. Mencegah Terjadinya Kecurangan dan Penyalahgunaan

Salah satu tujuan utama SPIP adalah untuk mencegah terjadinya penyimpangan atau kecurangan dalam pengelolaan keuangan dan administrasi pemerintahan. Dengan adanya kontrol yang baik, diharapkan potensi korupsi, kolusi, dan nepotisme dalam pemerintahan dapat diminimalisir.

2.1.6.3. Indikator Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

Menurut Karim & Mursalim (2019), sistem pengendalian internal (SPIP) memiliki beberapa indikator yang berperan dalam mendukung pengelolaan akuntabilitas daerah. Indikator-indikator tersebut meliputi: lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, serta informasi dan komunikasi. Dalam (Menkumham RI, 2008: 4-20), sistem pengendalian intern pemerintah terdiri atas 5 (lima) indikator, dimana kelima indikator tersebut dipakai sebagai tolak ukur dalam implementasi sistem pengendalian intern pemerintah pada penelitian ini yaitu:

1. Lingkungan Pengendalian

Lingkungan pengendalian merupakan dasar dari sistem pengendalian internal yang mencakup sikap, kesadaran, dan nilai-nilai yang diterapkan oleh pimpinan dan seluruh anggota organisasi. Lingkungan ini mencakup budaya organisasi dan etika kerja yang mendukung

penerapan kontrol internal yang baik. Dalam konteks pemerintahan, lingkungan pengendalian mencakup komitmen pimpinan untuk menciptakan suasana yang mendukung integritas, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan.

2. Penilaian Risiko

Penilaian risiko adalah proses untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan mengevaluasi risiko yang mungkin terjadi dalam pengelolaan keuangan daerah, baik yang bersifat internal maupun eksternal. Risiko ini bisa berkaitan dengan ketidakpastian dalam pencapaian tujuan pengelolaan keuangan atau potensi penyalahgunaan anggaran. Dengan melakukan penilaian risiko, pemerintah dapat menentukan prioritas dalam pengelolaan pengendalian internal dan merencanakan langkah-langkah mitigasi yang tepat.

3. Kegiatan Pengendalian

Kegiatan pengendalian merujuk pada serangkaian kebijakan dan prosedur yang diterapkan untuk mengurangi atau mengendalikan risiko yang telah diidentifikasi. Kegiatan pengendalian ini meliputi prosedur untuk memastikan bahwa transaksi keuangan tercatat dengan benar, anggaran digunakan sesuai dengan tujuan, dan pengeluaran keuangan mengikuti aturan yang telah ditetapkan.

4. Informasi dan Komunikasi

Informasi dan komunikasi dalam konteks SPIP mengacu pada pentingnya menyediakan informasi yang akurat, tepat waktu, dan

relevan untuk mendukung pengambilan keputusan dalam pengelolaan keuangan daerah. Selain itu, komunikasi yang baik antar bagian dan pihak terkait juga sangat penting untuk memastikan bahwa seluruh komponen organisasi dapat bekerja sama dalam melaksanakan pengendalian internal dengan efektif.

5. Pemantauan Pengendalian Intern

Pemantauan pengendalian intern adalah kegiatan untuk mengevaluasi efektivitas sistem pengendalian internal secara terus-menerus. Pemantauan ini bisa dilakukan melalui audit internal, evaluasi kinerja, dan feedback dari para pemangku kepentingan. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa sistem pengendalian yang ada berjalan dengan baik dan mampu mengidentifikasi kekurangan atau masalah yang perlu diperbaiki. Pemantauan yang efektif akan memberikan informasi untuk perbaikan sistem pengendalian dan memastikan bahwa pengelolaan keuangan daerah tetap sesuai dengan peraturan yang berlaku.

2.1.2.3. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

Berikut adalah faktor-faktor yang mempengaruhi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) menurut berbagai ahli:

1. Komponen dan Struktur Organisasi

Menurut COSO (*Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission*), salah satu faktor utama yang mempengaruhi

sistem pengendalian internal adalah struktur organisasi dan lingkungan pengendalian. Lingkungan pengendalian meliputi kebijakan, prosedur, budaya, dan komitmen organisasi dalam mengimplementasikan SPIP.

2. Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM)

Karim & Mursalim (2019) mengemukakan bahwa salah satu faktor penting yang mempengaruhi SPIP adalah kompetensi sumber daya manusia (SDM) yang terlibat dalam pengelolaan keuangan pemerintah. Aparat yang memiliki pengetahuan dan keterampilan yang memadai akan lebih mampu menjalankan prosedur pengendalian dengan baik.

3. Sistem Informasi dan Teknologi

Mediaswati (2013) menekankan bahwa teknologi informasi (TI) yang digunakan dalam pengelolaan keuangan pemerintah berperan penting dalam mendukung SPIP. Teknologi yang terintegrasi dengan baik memudahkan dalam pelaksanaan pengendalian, pencatatan transaksi, dan pelaporan yang akurat serta tepat waktu.

4. Pengawasan dan Audit

Wahyudi & Fitriani (2015) menyatakan bahwa pengawasan internal dan eksternal sangat mempengaruhi efektivitas SPIP. Pengawasan internal oleh auditor internal dan tim pengawasan sangat penting untuk memastikan bahwa prosedur dan kebijakan diikuti dengan benar. Sementara itu, audit eksternal oleh lembaga independen seperti

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memberikan objektivitas dalam menilai penerapan SPIP dan mendorong perbaikan terus-menerus.

5. Kepemimpinan dan Komitmen

Mentu & Sondakh (2016) mengungkapkan bahwa komitmen dari pimpinan di setiap level pemerintahan merupakan aktor yang sangat berpengaruh terhadap penerapan SPIP. Pimpinan yang mendukung dan konsisten dalam menerapkan kebijakan dan prosedur akan menciptakan lingkungan yang memadai untuk implementasi SPIP.

2.2. Penelitian Terdahulu

Pada bagian ini, akan disajikan hasil kajian atau penelitian sebelumnya yang relevan dengan penelitian yang akan dilaksanakan. Tujuan mencantumkan kajian terdahulu adalah untuk menunjukkan adanya kesamaan antara penelitian yang sudah ada dengan penelitian yang akan dilakukan, sehingga posisi permasalahan yang akan diteliti dapat lebih jelas terlihat (Azhar et al., 2021).

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

Peneliti	Judul	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
Dewi Asfiryati, Enni Savitri, Al Azhar A (2017)	Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Dan Penyajian Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Dengan Sistem Pengendalian Intern Sebagai Variabel Intervening (Studi Pada Skpd Kota Dumai)	Variabel Dependen: Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Variabel Independen: – Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah – Penyajian Laporan Keuangan Variabel Intervening: Sistem Pengendalian Intern	Hasil dari pengujian hipotesis dalam penelitian ini menunjukkan bidang sistem akuntansi keuangan pelaksanaan dan penyajian laporan keuangan tidak secara langsung mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan keuangan. Namun, wilayah tersebut penerapan sistem akuntansi keuangan dan penyajian keuangan pernyataan berpengaruh terhadap sistem
	<i>Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Riau, Hal 1986-1999</i>		

	https://www.neliti.com/publications/186633/pengaruh-penerapan-sistem-akuntansi-keuangan-daerah-dan-penyajian-laporan-keuang		<p>pengendalian internal. Sistem pengendalian internal mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan keuangan. Implementasi bidang sistem akuntansi keuangan berpengaruh tidak langsung terhadap pengelolaan keuangan akuntabilitas melalui sistem pengendalian internal sebagai mediasi atau intervensi variabel. Dan penyajian laporan keuangan berpengaruh tidak langsung atau finansial akuntabilitas manajemen melalui sistem pengendalian internal sebagai mediasi atau variabel intervening.</p>
<p>Zamzami & Gowon (2021)</p>	<p>Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Dengan Kesuksesan Penerapan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah Sebagai Variabel Intervening</p> <p><i>Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Universitas Jambi</i>, Hal 136-48</p> <p>https://mail.online-journal.unja.ac.id/jaku/article/view/16111/12337</p>	<p>Variabel Dependen: Kualitas Laporan Keuangan</p> <p>Variabel Independen: – Kompetensi Sumber Daya Manusia – Sistem Pengendalian Internal</p> <p>Variabel Intervening: Kesuksesan Penerapan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah</p>	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Keberhasilan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah berpengaruh positif signifikan secara parsial maupun simultan terhadap kualitas laporan keuangan. Sistem Pengendalian Intern berpengaruh negatif signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan. Kompetensi Sumber Daya Manusia berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan. kualitas laporan keuangan melalui keberhasilan penerapan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah sebagai variabel intervening. Sedangkan Sistem Pengendalian Intern tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan melalui keberhasilan penerapan Sistem Informasi Manajemen Keuangan</p>

			Daerah sebagai variabel intervening.
Ria Herlina, Taufeni Taufik, Azwir Nasir (2021)	<p>Pengaruh Transparansi, Kompetensi, Dan Sistem Akuntansi Keuangan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Dengan Penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Sebagai Variabel Moderasi</p> <p><i>Journal of Economic, Bussines and Accounting (COSTING)</i>, Hal 419-433 https://journal.ipm2kpe.or.id/index.php/COSTING/article/view/1965/1264</p>	<p>Variabel Dependen: Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah</p> <p>Variabel Independen: – Transparansi – Kompetensi – Sistem Akuntansi Keuangan</p> <p>Variabel Moderating: Penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah</p>	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa transparansi, kompetensi, dan sistem akuntansi keuangan berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, penerapan sistem pengendalian internal pemerintah dapat memoderasi pengaruh transparansi dan sistem akuntansi keuangan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, dan penerapan sistem akuntansi keuangan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, dan penerapan sistem akuntansi keuangan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. sistem pengendalian internal pemerintah tidak dapat memoderasi pengaruh kompetensi terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.</p>
Mulyanto et al. (2021)	<p>Pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Penyajian Laporan Keuangan Daerah, Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah, Dan Desentralisasi Fiskal Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Dengan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Sebagai Variabel Moderating</p> <p><i>Jurnal Bingkai Ekonomi</i>, Hal 1-17 https://d1wqtxs1xzle7.cloudfront.net/102843621/75-libre.pdf?1685508494=&response-content-disposition=inline%3B+filename%3DPengaruh Sistem Akuntansi</p>	<p>Variabel Dependen: Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah</p> <p>Variabel Independen: – Sistem Akuntansi Keuangan Daerah – Penyajian Laporan Keuangan Daerah – Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah – Desentralisasi Fiskal</p> <p>Variabel Moderating: Sistem Pengendalian Intern</p>	<p>Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel system akuntansi keuangan daerah dan penyajian laporan keuangan daerah berpengaruh negatif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, variabel aksesibilitas laporan keuangan daerah tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, dan variabel desentralisasi fiskal berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, sedangkan sistem pengendalian internal pemerintah memperkuat hubungan antara sistem</p>

	<p>nsi_Kuangan_Daera.pdf&Expires=1731038692&Signature=crdqfpEifGZTqKBvJn1jhzZkkG~WZvdg6rYINl85FZPtK8jLmGllnD_HrFCOPrq2tGxYog70kOws7puEkQ3qSZ7ilcERg~Vw5tSjKMdwabBcFJGo3ZTSiuF6r6tDT5IRVWvzsK3Yc1aOUoreDgYgRzS14H15-RCnAzFoy7qrnr0YLF8rIaNsNTfToEy3YNOOWdblwZ8TOZZKVi34r8xTRSht1BhhIuK8H5zJKKLdM97eyViaycgMXlbuZXFloQTzTDFq9P4nu-tHOZbR1bnPAJR3EYmVyOMTpdzx95DJL9B-p48JyuA8AYUYOqNbZIL4N8r0YBaeFvbyMyTOo6DCJg_&Key-Pair-Id=APKAJLOHF5GGSLRBV4ZA</p>		<p>akuntansi keuangan daerah dan penyajian laporan keuangan daerah terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, sistem pengendalian internal pemerintah tidak memoderasi hubungan antara aksesibilitas laporan keuangan daerah terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, dan system pengendalian internal pemerintah memperlemah hubungan antara desentralisasi fiskal terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.</p>
<p>Pebriani (2019)</p>	<p>Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Di Kabupaten Banyuasin Dengan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Sebagai Variabel Moderasi</p> <p><i>Jurnal Ilmiah Ekonomi Global Masa Kini</i>, Hal 55-62</p> <p>https://ejournal.uigm.ac.id/index.php/EGMK/article/view/744/88Z</p>	<p>Variabel Dependen: Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah</p> <p>Variabel Moderating: Sistem Pengendalian Intern</p>	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa kompetensi sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, penerapan standar akuntansi pemerintahan, peran audit internal berpengaruh secara simultan dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Namun apabila diuji secara parsial, penerapan standar akuntansi pemerintahan ternyata tidak signifikan. Selain itu, peran internal yang dimoderasi oleh sistem pengendalian intern pemerintah tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, diperlukan perbaikan terus-menerus pada sistem pengendalian internal</p>

			pemerintah. diperlukan. pemerintah perlu meningkatkan kualitas audit internal dengan meningkatkan peran pengawasan, pembinaan, pemantauan, dan penelaahan laporan keuangan sehingga mampu bekerja secara profesional, objektif dan independen.
Surjono & Firdaus (2017)	<p>Pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Akuntabilitas Laporan Keuangan Pada Satuan Kerja Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan (DPPK) Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung</p> <p>Jurnal Riset Akuntansi & Keuangan, Hal 1357-1368</p> <p>https://ejournal.upi.edu/index.php/JRAK/article/view/6737/4619#</p>	<p>Variabel Dependen: Akuntabilitas Laporan Keuangan</p> <p>Variabel Independen: – Sistem Akuntansi Keuangan Daerah</p>	<p>Hasil penelitian menggambarkan bahwa koefisien korelasi adalah sebesar 0,738, yang berarti terdapat arah positif dan tingkat pengaruh yang kuat antara sistem akuntansi keuangan daerah terhadap akuntabilitas laporan keuangan daerah. Koefisien determinasi (Kd) adalah sebesar 0,5446 atau 54,46%, hal ini dapat diartikan bahwa sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh terhadap akuntabilitas laporan keuangan daerah sebesar 54,46%, dan sisanya sebesar 45,54% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain. Uji signifikansi yang didapat adalah t hitung sebesar 8,885, dengan dk=66 pada α 5% diperoleh t tabel sebesar 1,998, karena hitung $t >$ tabel t ($8,885 > 1,998$), berarti H_0 ditolak dan H_a diterima, sehingga terdapat pengaruh antara sistem akuntansi keuangan daerah terhadap akuntabilitas laporan keuangan daerah.</p>

2.3. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual adalah suatu model konseptual yang menggambarkan hubungan antara teori dan berbagai faktor yang telah

diidentifikasi sebagai masalah penting (Sugiyono, 2017). Sebuah kerangka berpikir yang baik akan memberikan penjelasan teoritis mengenai keterkaitan antara variabel-variabel yang akan diteliti. Oleh karena itu, hubungan antara variabel independen, moderator, dan dependen perlu dijelaskan secara teoritis.

Adapun yang merupakan variabel independen dalam penelitian ini adalah Transparansi (X1), Kompetensi (X2), dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (X3). Sedangkan variabel dependen adalah Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Y) dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Z) sebagai variabel moderasi.

2.3.1. Pengaruh Transparansi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah

Transparansi dan akuntabilitas merupakan dua elemen yang saling berkaitan dalam tata kelola keuangan daerah. Transparansi menciptakan kondisi di mana informasi terkait pengelolaan keuangan dapat diakses oleh masyarakat, sehingga memungkinkan adanya pengawasan publik. Hal ini secara langsung mendukung akuntabilitas, di mana pemerintah daerah wajib mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangannya secara jujur dan sesuai dengan peraturan (Prasetya dan Mariani, 2019). Transparansi menciptakan kepercayaan publik yang lebih besar terhadap pemerintah daerah. Hal ini penting dalam meningkatkan legitimasi dan tanggung jawab pemerintah dalam menggunakan dana publik. Pemerintah daerah yang transparan lebih mudah mengidentifikasi risiko atau penyimpangan

keuangan, sehingga dapat memperkuat sistem akuntabilitas (Maulana *et al.*, 2021).

Beberapa penelitian terdahulu menunjukkan bahwa transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah memiliki pengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan tersebut. Studi oleh Dwi *et al.* (2024) menemukan bahwa semakin tinggi tingkat transparansi, semakin besar akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan, dengan individu yang menerapkan prinsip transparansi cenderung lebih bertanggung jawab dan akurat dalam laporan keuangan. Penelitian Siti & Budi (2023) lebih lanjut mendukung bahwa transparansi yang baik berkorelasi positif dengan akuntabilitas, terutama dalam konteks pemerintahan daerah, di mana keterbukaan informasi menjadi faktor kunci dalam meningkatkan kepercayaan publik dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

2.3.2. Pengaruh Kompetensi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah

Kompetensi merupakan salah satu faktor kunci dalam menentukan tingkat akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Kompetensi, yang mencakup kemampuan, keahlian, dan pemahaman teknis aparatur pemerintah, memainkan peran penting dalam memastikan pengelolaan keuangan yang akurat, sesuai aturan, dan bertanggung jawab. Kompetensi yang memadai dari pengelola keuangan daerah memungkinkan pelaksanaan tugas secara profesional dan transparan, yang pada akhirnya meningkatkan akuntabilitas (Putri, 2022). Aparatur yang kompeten lebih mampu

mengambil keputusan berdasarkan data dan analisis yang akurat, sehingga mendukung akuntabilitas dalam pengelolaan dana publik (Erliyanti et al., 2022).

Berbagai penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa kompetensi dalam pengelolaan keuangan daerah memiliki pengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan tersebut. Studi oleh Joko et al. (2024) menemukan bahwa semakin tinggi tingkat kompetensi, semakin besar akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan, dengan individu yang memiliki kompetensi yang baik cenderung lebih efektif dan teliti dalam menyusun laporan keuangan. Penelitian Rina & Adam (2023) lebih lanjut memperkuat bahwa kompetensi yang tinggi berkorelasi positif dengan akuntabilitas, terutama dalam konteks pemerintahan daerah, di mana keahlian dalam pengelolaan keuangan menjadi faktor utama dalam meningkatkan akurasi dan transparansi laporan keuangan.

2.3.3. Pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah

Sistem akuntansi keuangan adalah serangkaian prosedur, metode, dan alat yang digunakan oleh organisasi, termasuk pemerintah daerah, untuk mencatat, mengklasifikasikan, menganalisis, dan melaporkan data keuangan. Dalam konteks pemerintah daerah, sistem akuntansi keuangan yang baik mendukung pelaksanaan pengelolaan keuangan yang akuntabel. Sistem akuntansi keuangan mendorong kepatuhan terhadap aturan keuangan yang berlaku, sehingga memperkuat akuntabilitas pemerintah daerah dalam

pengelolaan dana publik. Dengan sistem akuntansi yang terstruktur, pemerintah daerah dapat memantau aliran keuangan secara lebih efektif, meminimalkan risiko penyimpangan atau korupsi, dan meningkatkan akuntabilitas (Putri dan Nugroho, 2019).

Beberapa penelitian terdahulu menunjukkan bahwa sistem akuntansi keuangan yang efektif memiliki pengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Studi oleh Andi et al. (2024) menemukan bahwa penerapan sistem akuntansi yang baik dapat meningkatkan akuntabilitas, dengan organisasi yang mengimplementasikan sistem akuntansi yang terstruktur cenderung lebih transparan dan akurat dalam pelaporan keuangan. Penelitian oleh Rina & Jaya (2023) lebih lanjut mendukung bahwa sistem akuntansi keuangan yang efektif berkorelasi positif dengan akuntabilitas, terutama dalam konteks pemerintahan daerah, di mana keandalan sistem akuntansi menjadi faktor kunci dalam memperkuat pengelolaan dan pertanggungjawaban masyarakat terhadap penggunaan anggaran dan sumber daya keuangan.

2.3.4. Pengaruh Transparansi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah dengan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Sebagai Variabel Moderasi

Transparansi, dalam konteks pengelolaan keuangan daerah, mengacu pada keterbukaan informasi keuangan yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada publik. Hal ini memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan memahami bagaimana dana publik digunakan. Akuntabilitas adalah

tanggung jawab pemerintah untuk menjelaskan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan anggaran sesuai dengan peraturan dan tujuan yang telah ditetapkan. Hubungan antara transparansi dan akuntabilitas dapat diperkuat dengan adanya Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) sebagai variabel moderasi. SPIP memberikan kerangka kerja yang memastikan bahwa setiap tahapan pengelolaan keuangan, mulai dari perencanaan hingga pelaporan, diawasi secara sistematis (Yuliani dan Wijaya, 2020). SPIP memastikan bahwa pengelolaan keuangan berjalan sesuai dengan aturan, meminimalkan risiko kesalahan atau penyalahgunaan, dan meningkatkan kepercayaan publik. Mardiasmo (2021) menemukan bahwa transparansi keuangan memiliki pengaruh langsung terhadap peningkatan akuntabilitas, terutama ketika didukung oleh sistem pengendalian yang kuat.

Beberapa penelitian terdahulu menunjukkan bahwa transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah, dengan sistem pengendalian intern pemerintah sebagai variabel moderasi, memiliki pengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan. Studi oleh Fajar et al. (2025) menemukan bahwa tingkat transparansi yang tinggi dapat memperkuat akuntabilitas, terutama jika didukung oleh keberadaan sistem pengendalian intern yang efektif, di mana individu dalam pengelolaan keuangan cenderung lebih bertanggung jawab dan akurat dalam laporan mereka. Penelitian oleh Lani & Tono (2024) lebih lanjut mendukung bahwa kombinasi antara transparansi yang baik dan sistem pengendalian intern

yang solid berkolerasi positif dengan akuntabilitas, di mana keterbukaan informasi dan pengendalian yang kuat menjadi faktor kunci dalam meningkatkan kepercayaan publik serta memperkuat akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

2.3.5. Pengaruh Kompetensi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah dengan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Sebagai Variabel Moderasi

Kompetensi dalam pengelolaan keuangan daerah mengacu pada kemampuan, pengetahuan, dan keterampilan yang dimiliki oleh aparatur pemerintah daerah dalam melaksanakan tugas-tugas keuangan. Kompetensi ini mencakup pemahaman aturan keuangan, penerapan teknologi informasi, serta pengambilan keputusan berbasis data. Akuntabilitas keuangan daerah dapat ditingkatkan jika pelaksana pengelolaan keuangan memiliki kompetensi yang memadai. Hubungan antara kompetensi dan akuntabilitas dapat diperkuat dengan adanya Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) sebagai variabel moderasi. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang bertindak sebagai variabel moderasi. SPIP memastikan pelaksanaan tugas dan fungsi berjalan sesuai prosedur, mengurangi risiko penyimpangan, dan mendukung terciptanya tata kelola keuangan yang lebih baik. SPIP memberikan struktur kontrol yang memastikan kompetensi diterapkan secara efektif dan efisien. Dengan adanya SPIP, kesalahan akibat kurangnya kompetensi atau penyalahgunaan kewenangan dapat diminimalkan (Putri dan Hidayat, 2020).

Hasil penelitian yang dilakukan Yusuf & Ramdhani (2018) menyatakan bahwa kompetensi sumber daya manusia (SDM) memiliki pengaruh signifikan terhadap akuntabilitas keuangan daerah, terutama jika didukung oleh sistem pengendalian internal yang efektif. Sejalan dengan itu Lestari & Sari (2021) dalam penelitiannya menyatakan bahwa kompetensi aparatur menjadi faktor utama dalam meningkatkan akuntabilitas keuangan daerah, tetapi hasil yang optimal hanya tercapai jika SPIP diterapkan secara konsisten. Maka dapat disimpulkan bahwa kompetensi aparatur yang baik adalah faktor penting dalam meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Namun, efektivitas kompetensi ini menjadi lebih signifikan jika didukung oleh SPIP. SPIP bertindak sebagai kerangka pengendalian yang memperkuat pelaksanaan tugas keuangan, memastikan bahwa pengelolaan berjalan sesuai aturan, dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah. Penelitian sebelumnya mendukung pentingnya sinergi antara kompetensi dan SPIP dalam menciptakan akuntabilitas yang lebih tinggi.

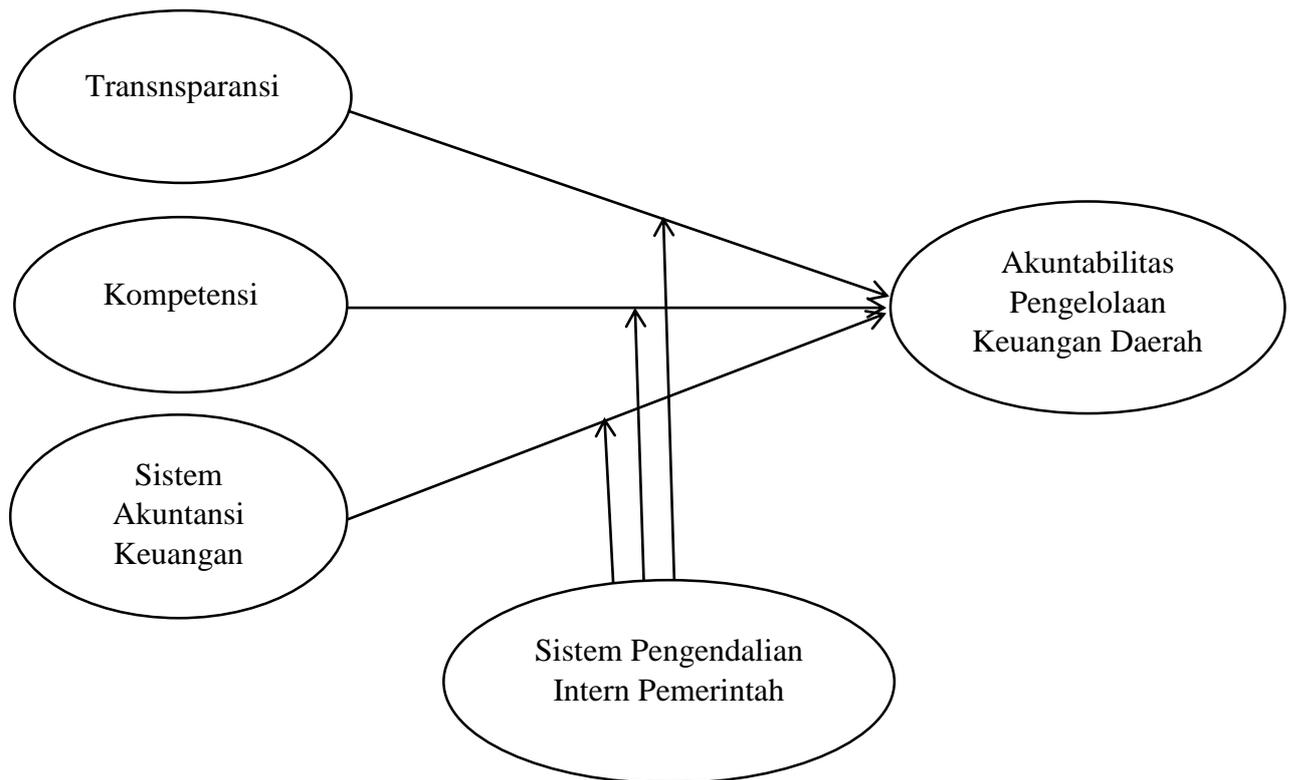
2.3.6. Pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah dengan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Sebagai Variabel Moderasi

Sistem Akuntansi Keuangan memainkan peran penting dalam mendukung akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Sistem Akuntansi Keuangan adalah metode atau prosedur yang digunakan untuk mencatat, mengelola, dan melaporkan informasi keuangan secara transparan dan

akurat. Sistem Akuntansi Keuangan yang baik memastikan bahwa laporan keuangan daerah dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan standar yang berlaku. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) sebagai variabel moderasi dapat memperkuat hubungan antara Sistem Akuntansi Keuangan dan akuntabilitas dengan menyediakan mekanisme pengawasan dan kontrol terhadap implementasi sistem tersebut. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah memastikan bahwa Sistem Akuntansi Keuangan diterapkan dengan konsistensi dan integritas dalam setiap proses pengelolaan keuangan daerah.

Hasil penelitian yang dilakukan Yuliani & Handayani (2020) menunjukkan bahwa sistem pengendalian intern pemerintah memperkuat hubungan antara sistem akuntansi keuangan dan akuntabilitas dengan meningkatkan efektivitas kontrol dalam pelaksanaan anggaran. Maka dapat disimpulkan bahwa penerapan Sistem Akuntansi Keuangan yang baik berkontribusi besar terhadap peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Namun, efektivitas SAK sangat bergantung pada keberadaan SPIP sebagai kerangka pengawasan dan pengendalian. SPIP membantu memastikan bahwa semua proses yang terkait dengan sistem akuntansi berjalan sesuai dengan standar yang berlaku, mengurangi risiko kesalahan atau penyalahgunaan, dan memperkuat kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan pemerintah daerah. Penelitian-penelitian sebelumnya mendukung pentingnya integrasi antara SAK dan SPIP untuk mencapai tata kelola keuangan yang lebih akuntabel.

Secara teoritis hubungan antar variabel yang akan diteliti dijelaskan dalam kerangka pemikiran. Kerangka berpikir penelitian dipaparkan dalam Gambar 2.1



Gambar 2.1 Kerangka Konseptual

2.4. Hipotesis

Hipotesis adalah suatu pernyataan atau dugaan sementara tentang hubungan antara dua variabel atau lebih yang dapat diuji kebenarannya melalui penelitian. Hipotesis ini bersifat sementara karena penelitian dilakukan untuk menguji apakah penyirfanataan tersebut dapat dibuktikan atau tidak (Sugiyono, 2019). Hipotesis dalam penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Transparansi berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah
2. Kompetensi berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah
3. Sistem Akuntansi Keuangan berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah
4. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dapat memoderasi pengaruh transparansi terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah
5. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dapat memoderasi pengaruh kompetensi terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah
6. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dapat memoderasi pengaruh sistem akuntansi keuangan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan asosiatif yang termasuk dalam kategori penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif adalah metode yang didasarkan pada filosofi postpositivisme dan digunakan untuk menyelidiki fenomena pada populasi atau sampel tertentu (Irfan et al., 2024). Pengumpulan data dilakukan dengan instrumen penelitian, dan analisis data menggunakan metode kuantitatif atau statistik. Permasalahan dalam penelitian kuantitatif dapat ditentukan di awal penelitian sehingga bersifat sebagai hipotesis atau dugaan awal terhadap permasalahan berdasarkan apa yang dikatakan teori (Irfan et al., 2024). Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan sebelumnya (Sugiyono, 2019). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Transparansi, Kompetensi, Sistem Akuntansi Keuangan, terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah dengan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah sebagai variabel moderasi.

3.2. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kantor Walikota Langsa dan periode pelaksanaan penelitian ini dilakukan pada bulan November 2024 s.d.. Waktu penelitian disajikan pada tabel 3.1 sebagai berikut :

Tabel 3.1 Waktu Penelitian

No.	Tahap Penelitian	Jan-25				Mar-25				Mei-25				Jul-25				Agus-25			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Pengajuan Judul	■																			
2	Penyusunan		■	■																	
3	Bimbingan Proposal				■	■															
4	Seminar Proposal						■														
5	Pengumpulan Data							■	■												
6	Pengolahan Data									■	■	■									
7	Penulisan Laporan												■	■	■						
8	Seminar Hasil															■					
9	Penyelesaian																	■			
10	Sidang Meja Hijau																		■		

3.3. Populasi dan Sampel

3.3.1. Populasi

Menurut Sugiyono (2019), populasi adalah seluruh elemen atau objek yang memiliki karakteristik tertentu yang menjadi fokus dalam suatu penelitian. Populasi adalah keseluruhan dari subjek atau objek yang ingin diteliti, yang dapat berupa individu, kelompok, organisasi, atau hal lain yang memiliki ciri-ciri yang relevan dengan tujuan penelitian. Populasi dalam penelitian ini adalah karyawan di Kantor Walikota Langsa pada bagian keuangan yang berjumlah 78 pegawai.

3.3.2. Sampel

Sampel adalah bagian atau subkelompok yang diambil dari populasi yang memiliki karakteristik tertentu dan dianggap mewakili seluruh populasi untuk tujuan penelitian. Pemilihan sampel dilakukan untuk memperoleh informasi yang relevan tanpa harus mengobservasi seluruh anggota populasi

(Sugiyono, 2019). Sampel penelitian pada penelitian ini merupakan sampel jenuh. Sampel jenuh merupakan teknik sampling yang menggunakan seluruh populasi sebagai sampel penelitian (Arikunto, 2016). Jumlah sampel dalam penelitian ini adalah 78 pegawai.

3.4. Definisi Operasional Variabel

Definisi Operasional Variabel merupakan penjabaran secara rinci mengenai bagaimana masing-masing variabel dalam penelitian diukur, diamati, dan dianalisis berdasarkan indikator-indikator yang relevan. Tujuannya adalah untuk menghindari ambiguitas dan memastikan bahwa setiap variabel dapat diukur secara kuantitatif maupun kualitatif sesuai dengan konteks penelitian.

Tabel 3.2 Definisi Operasional Variabel

Variabel	Definisi	Indikator	Skala
Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Y)	Akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah mencakup pertanggungjawaban atas pengelolaan sumber daya publik secara transparan, bertanggung jawab, dan sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (<i>good governance</i>) (Mahmudi, 2019).	1. Akuntabilitas Kejujuran dan Hukum 2. Akuntabilitas Proses 3. Akuntabilitas Program 4. Akuntabilitas Kebijakan (Mudjiyono, 2018)	<i>Ordinal</i>
Transparansi (X1)	Transparansi adalah keterbukaan pemerintah dalam memberikan informasi yang berkaitan dengan kegiatan pengelolaan sumber daya publik kepada pihak yang membutuhkan yaitu masyarakat (Mardiasmo, 2021).	1. Ketersediaan dan aksesibilitas dokumen 2. Kejelasan dan kelengkapan informasi 3. Keterbukaan proses 4. Kerangka regulasi yang menjamin transparansi (Kristianten, 2011)	<i>Ordinal</i>

Kompetensi (X2)	Kompetensi adalah kemampuan yang berbasis pada keilmuan, keterampilan, dan perilaku yang diperlukan untuk melaksanakan tugas tertentu secara profesional. (Wibowo, 2018)	1. Pengalaman kerja 2. Pendidikan 3. Pengetahuan 4. Keterampilan (Liestyodono, 2020)	<i>Ordinal</i>
Sistem Akuntansi Keuangan (X3)	Sistem akuntansi keuangan adalah metode dan prosedur yang digunakan untuk mengumpulkan, mencatat, dan melaporkan data keuangan yang relevan dalam suatu organisasi. (Mulyadi, 2016)	1. Kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintah 2. Prosedur Pencatatan Akuntansi Berdasarkan Standar Umum 3. Penyusunan Laporan Keuangan Secara Periodik (Permadi, 2013)	<i>Ordinal</i>
Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (Z)	SPIP merupakan perangkat kebijakan dan prosedur yang diterapkan di lingkungan pemerintah untuk memastikan kinerja yang akuntabel, meminimalkan risiko, dan meningkatkan transparansi serta akuntabilitas pengelolaan keuangan negara. (Mardiasmo, 2021).	1. Lingkungan Pengendalian 2. Penilaian Risiko 3. Kegiatan Pengendalian 4. Informasi dan Komunikasi 5. Pemantauan Pengendalian Intern (Menkumham RI, 2008)	<i>Ordinal</i>

3.5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah cara atau metode yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan informasi atau data yang dibutuhkan dalam penelitian. Teknik ini sangat penting untuk memastikan data yang diperoleh relevan, valid, dan dapat dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu dalam penelitian, metode pengumpulan data harus dilakukan dengan tepat. Teknik pengumpulan data penelitian ini sebagai berikut:

1. Angket/Kuesioner

Angket atau kuesioner adalah salah satu teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian kuantitatif. Angket atau kuesioner

terdiri dari serangkaian pertanyaan tertulis yang dirancang untuk mengumpulkan informasi dari responden. Penggunaan angket bertujuan untuk menggali data yang bisa dianalisis secara statistik dan memudahkan peneliti dalam mendapatkan data dari banyak responden dalam waktu yang efisien (Sugiyono, 2019).

2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan mengumpulkan berbagai dokumen atau catatan yang berkaitan dengan objek penelitian. Sugiyono (2019) menjelaskan bahwa dokumentasi dapat berupa bahan tertulis, gambar, rekaman suara, atau video yang sudah ada dan relevan dengan topik penelitian. Teknik ini berguna untuk memperoleh data sekunder yang dapat mendukung hasil penelitian.

3.6 Pengujian Validitas Reabilitas Instrumen

Uji validitas adalah proses yang digunakan untuk menilai apakah instrumen penelitian, seperti kuesioner atau angket, dapat mengukur apa yang seharusnya diukur. Uji validitas internal dalam penelitian menggunakan *Pearson Product Moment Correlation* dilakukan dengan membandingkan nilai r hitung (*Pearson correlation coefficient*) dengan r tabel. Perhitungan ini sering dibantu menggunakan software seperti *IBM SPSS Statistics 26*. Nilai r tabel dihitung berdasarkan taraf signifikansi 5% dan ukuran sampel (n). Dalam konteks ini, uji validitas digunakan untuk menilai apakah data yang diperoleh dari kuesioner valid atau tidak, yakni apakah instrumen pengukuran

(dalam hal ini kuesioner) dapat mengukur apa yang seharusnya diukur Ahmadi (2016).

Kesimpulan dari uji validitas diperoleh dengan membandingkan nilai r hitung untuk setiap item pernyataan dengan r tabel. Jika nilai r hitung item pernyataan lebih besar dari r tabel, maka item pernyataan tersebut dianggap valid. Sebaliknya, jika r hitung lebih kecil dari r tabel, maka item pernyataan tersebut dianggap tidak valid. Hasil uji validitas dapat diklasifikasikan berdasarkan besaran koefisien validitas, yang umumnya disajikan dalam sebuah tabel klasifikasi untuk mempermudah interpretasi hasil.

Tabel 3.3 Klasifikasi Besaran Koefisien Validitas

Koefisien Validitas	Keterangan
$0,80 \leq r_{xy} < 1,00$	Validitas Sangat Tinggi
$0,60 \leq r_{xy} < 0,80$	Validitas Tinggi
$0,40 \leq r_{xy} < 0,60$	Validitas Cukup
$0,20 \leq r_{xy} < 0,40$	Validitas Rendah
$0,00 \leq r_{xy} < 0,20$	Validitas Sangat Rendah
$r_{xy} < 0,00$	Validitas Tidak Valid

Sumber: Arikunto (2013)

Uji reliabilitas menurut Rusman (2015) merujuk pada pengujian sejauh mana sebuah instrumen atau alat ukur (seperti kuesioner) memberikan hasil yang konsisten ketika digunakan dalam waktu yang berbeda atau dengan subjek yang berbeda. Reliabilitas ini sangat penting untuk memastikan bahwa data yang dikumpulkan dari instrumen tersebut dapat dipercaya dan konsisten dalam mengukur variabel yang sama. Ada beberapa teknik yang digunakan untuk menguji reliabilitas, salah satunya adalah Alpha Cronbach. Ini adalah

teknik yang paling sering digunakan untuk mengukur konsistensi internal suatu instrumen dengan cara menguji korelasi antara setiap item dalam instrumen. Semakin tinggi nilai Alpha Cronbach (mendekati 1), semakin tinggi pula reliabilitas instrumen tersebut.

Uji reliabilitas instrumen dilakukan dengan bantuan program software IBM SPSS Statistics 26. Setelah diperoleh koefisien reliabilitas kemudian dikonsultasikan dengan Tabel nilai r dengan taraf signifikan 5%. Dengan kriteria pengujian jika $r_{hitung} > r_{tabel}$ dengan taraf signifikansi 5%, maka alat ukur tersebut reliabel. Begitu pula sebaliknya, jika $r_{hitung} < r_{tabel}$ maka alat ukur tersebut tidak reliabel. Untuk mengetahui tingkat reliabilitas instrumen selanjutnya dikonsultasi melalui Tabel 3.4.

Tabel 3.4 Ukuran Kemantapan Alpha

Alpha	Tingkat Reliabilitas
Antara 0.00 sampai 0.20	Sangat rendah
Antara > 0.20 sampai 0.40	Rendah
Antara > 0.40 sampai 0.60	Cukup
Antara > 0.60 sampai 0.80	Tinggi
Antara > 0.80 sampai 1.00	Sangat Tinggi

Sumber: Arikunto (2013)

3.7 Teknik Analisis Data

Menurut Sugiono (2016) “analisa data merupakan kegiatan setelah data dari seluruh responden atau sumber data lain terkumpul.” Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linear berganda. Analisis linear berganda bertujuan untuk mendapatkan gambaran secara keseluruhan hubungan antar variabel dependen dan variabel independen untuk kinerja

perusahaan baik secara simultan ataupun parsial. Menurut Ghozali (2014) “Sebelum melakukan uji linear berganda, metode mensyaratkan untuk mensyaratkan untuk melakukan uji asumsi klasik guna mendapatkan hasil yang terbaik. Tujuan pemenuhan asumsi klasik ini dimaksudkan agar variabel bebas sebagai estimator atas variabel terikat tidak bias.”

Penelitian ini menggunakan alat bantu SmartPLS untuk mempermudah dalam melakukan perhitungan. Sedangkan analisis yang digunakan yaitu :

3.7.1 Analisis Statistik Deskriptif

Analisis Statistik Deskriptif adalah metode dalam statistik yang digunakan untuk menggambarkan atau meringkas data dalam bentuk yang sederhana dan informatif. Analisis ini berfokus pada penyajian informasi dasar mengenai dataset, seperti ukuran, distribusi, dan pola umum data, tanpa melakukan inferensi atau menarik kesimpulan yang berlaku untuk populasi yang lebih luas.

3.7.2 Analisis *Structural Equation Modeling* (SEM)

Analisis Structural Equation Modeling (SEM) dalam penelitian ini dilakukan menggunakan Partial Least Square (PLS) untuk menguji data serta mengidentifikasi korelasi struktural dalam model penelitian yang diajukan. Menurut Hair et al. (2017), SmartPLS digunakan sebagai alat untuk menguji model konseptual dan menganalisis data yang telah diolah. Proses analisis dimulai dengan mengevaluasi model pengukuran, diikuti oleh validasi model struktural guna menguji hipotesis yang diajukan.

Model pengukuran bertujuan untuk menilai sejauh mana indikator yang digunakan mampu merepresentasikan variabel yang diukur sesuai dengan kriteria yang ditetapkan. Sementara itu, model struktural menggambarkan hubungan antar variabel dalam model penelitian. Selain itu, menurut Sekaran dan Bougie (2016), SmartPLS juga dapat digunakan untuk menganalisis peran mediasi dalam hubungan antar variabel. Tahapan-tahapan analisis SEM dalam penelitian ini dijelaskan secara rinci sebagai berikut.

1. Model Pengukuran atau *Outer Model*

Model pengukuran, yang juga dikenal sebagai *outer model*, bertujuan untuk mengevaluasi hubungan antara variabel laten dan indikatornya. Dalam analisis ini, model pengukuran digunakan untuk memastikan bahwa indikator yang digunakan mampu merepresentasikan variabel laten dengan baik. Proses evaluasi melibatkan pengujian validitas dan reliabilitas. Validitas dibagi menjadi dua jenis utama, yaitu validitas konvergen dan validitas diskriminan. Validitas konvergen dinilai melalui nilai *loading factor*, *average variance extracted (AVE)*, dan *composite reliability (CR)*, di mana nilai-nilai tersebut harus memenuhi kriteria tertentu. Sementara itu, validitas diskriminan memastikan bahwa suatu variabel laten benar-benar berbeda dari variabel laten lainnya, yang biasanya diuji menggunakan *cross loading* atau *Fornell-Larcker criterion*. Reliabilitas indikator dinilai melalui *cronbach's alpha* dan *composite reliability*, dengan nilai tertentu sebagai batas minimum untuk menunjukkan konsistensi internal. Dengan memastikan model

pengukuran memenuhi semua kriteria ini, penelitian dapat memastikan bahwa data yang digunakan valid dan reliabel untuk mengukur variabel laten. Analisis outer model dirangkum dalam Tabel 3.3.

Tabel 3.3 Evaluasi Model Pengukuran

Evaluasi		Keterangan
Validitas Konvergen	Nilai <i>Loading Factor</i> > 0,70	Berfungsi untuk membuktikan bahwa masing-masing indikator dapat diterima dan mampu menjelaskan variabel latennya. Sehingga pengukur (indikator) dari suatu konstruk laten seharusnya berkorelasi tinggi
	Nilai AVE > 0,5	Berfungsi memperkuat kaidah kevalidan model secara konvergen
Validitas Diskriminan	Nilai <i>Cross Loading</i> > 0,70	Berfungsi untuk melihat apakah suatu indikator dari variabel laten tertentu berbeda dari indikator-indikator dari variabel laten lainnya dengan seharusnya tidak berkorelasi tinggi
Reliabilitas <i>Cronbach's Alpha</i>	Nilai <i>Cronbach Alpha</i> > 0,7	Berfungsi menguji konsistensi jawaban dari butir pernyataan kuesioner
<i>Composite Reliability</i>	Nilai <i>Composite Reliability</i> > 0,7	Berfungsi untuk menunjukkan konsistensi internal dari suatu indikator pada variabel laten. Kecendrungan nilai <i>Composite Reliability</i> > nilai <i>Cronbach Alpha</i>

2. Model Struktural atau Inner Model

Model struktural, yang dikenal juga sebagai inner model, berfungsi untuk mengevaluasi hubungan antara variabel laten dalam suatu model penelitian. Model ini digunakan untuk menguji hipotesis dan menganalisis pengaruh antar variabel laten, baik secara langsung maupun tidak langsung. Evaluasi model struktural melibatkan beberapa langkah penting, termasuk mengukur koefisien jalur (path coefficients), nilai R-squared (R^2), serta efek prediktif (Q^2). Koefisien jalur menunjukkan

kekuatan dan arah hubungan antara variabel laten, dengan nilai signifikansi yang diuji menggunakan bootstrapping atau metode resampling lainnya. Nilai R^2 digunakan untuk menilai seberapa besar variabel independen mampu menjelaskan variabel dependen dalam model, dengan kategori nilai rendah, sedang, atau tinggi tergantung pada konteks penelitian. Sementara itu, nilai Q^2 mengevaluasi kemampuan prediksi model terhadap data di luar sampel. Selain itu, dalam model struktural juga dianalisis efek mediasi atau moderasi, jika terdapat variabel perantara atau variabel yang memoderasi hubungan antar variabel laten. Dengan melakukan evaluasi yang menyeluruh pada inner model, peneliti dapat memastikan bahwa hubungan dalam model telah diuji secara tepat, sehingga kesimpulan yang dihasilkan lebih valid dan reliabel. Secara rinci analisis model struktural dalam penelitian ini dirangkum dalam Tabel 3.4.

Tabel 3.4 Evaluasi Model Struktural

Evaluasi	Kriteria	Keterangan
Model Fit	<i>Loading Factor</i> > 0,7	Menilai kecocokan antara korelasi yang diamati
<i>R-Square</i>	Nilai <i>R-Square</i> 0-1, dimana 0,75 (kuat); 0,50 (moderat); dan 0,25 (lemah)	Berfungsi untuk mengukur tingkat variasi perubahan variabel eksogen terhadap variabel endogen sebagai kekuatan prediksi
Koefisien Jalur/ <i>Path Coefficient</i>	Nilai rentang -1 sampai dengan 1	Berfungsi untuk mengetahui besaran pengaruh secara parsial dan menunjukkan arah hubungan variabel, apakah hubungan antar variabel positif atau negatif serta untuk menentukan persamaan jalur dari model yang diujikan
Uji Signifikansi (<i>P-Values</i> /)	Nilai <i>P-Values</i> < 0,05 atau $t_{hitung} > Z_{score}$ 1,96	Berfungsi untuk menguji pengaruh parsial variabel (analisis

Evaluasi	Kriteria	Keterangan
<i>t</i> -statistic)	maka H_a diterima, H_0 ditolak; Sebaliknya Nilai <i>P-Values</i> > 0,05 $t_{hitung} < Z_{score}$ 1,96 maka H_0 diterima, H_a ditolak	<i>bootstrapping</i>) dan menjawab hipotesis penelitian
<i>Predictive Relevant</i>	Nilai <i>predictive relevant</i> (Q^2) > 0 maka nilai observasi/predikat relevansi model struktural telah baik	Berfungsi untuk melihat seberapa baik nilai observasi yang dilakukan dan untuk menilai kecocokan relevansi model secara struktural
<i>Effect Size</i>	<p><u>Pengaruh langsung</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Nilai <i>F-Square</i> 0,02-0,15 kategori pengaruh lemah - Nilai <i>F-Square</i> 0,15-0,35 kategori pengaruh moderat - Nilai <i>F-Square</i> > 0,35 kategori pengaruh kuat <p><u>Pengaruh Tidak Langsung</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Nilai statistik efek mediasi <u>epsilon (V) 0,175</u> kategori pengaruh mediasi tinggi - Nilai statistik efek mediasi <u>epsilon (V) 0,075</u> kategori pengaruh mediasi medium - Nilai statistik efek mediasi <u>epsilon (V) 0,01</u> kategori pengaruh mediasi rendah 	<p>Berfungsi menggambarkan besarnya pengaruh langsung (<i>direct effect</i>) variabel laten eksogen (prediktor) terhadap variabel laten endogen (kriteria) pada tatanan struktural</p> <p>Berfungsi menggambarkan besarnya pengaruh mediasi/ tidak langsung (<i>indirect effect</i>) dalam pengaruh variabel laten eksogen (prediktor) terhadap variabel laten endogen (kriteria) pada tatanan struktural</p>
<i>Goodness of Fit PLS</i> (GoF PLS)	Nilai 0,00 – 0,24 kategori rendah; Milai 0,25 – 0,37 kategori sedang; Nilai 0,38 – 1 kategori tinggi	Berfungsi untuk menguji kecocokan model secara keseluruhan, baik itu untuk outer model maupun inner model, apakah ada kecocokan dengan nilai yang diobservasi dengan nilai yang

Evaluasi	Kriteria	Keterangan
	(GoF = akar kuadrat dari rerata AVE dikali rerata <i>R-Square</i>)	diharapkan dalam model

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum

Penelitian ini mengkaji pengaruh transparansi, kompetensi, dan sistem akuntansi keuangan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, dengan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) sebagai variabel moderasi yang memperkuat atau memperlemah hubungan antarvariabel. Pemahaman terhadap masing-masing variabel sangat penting untuk menggambarkan mekanisme pengelolaan keuangan daerah secara utuh dan mendalam.

Transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah merujuk pada keterbukaan pemerintah daerah dalam menyediakan informasi keuangan yang dapat diakses, dipahami, dan dipertanggungjawabkan kepada publik. Keterbukaan ini mencakup proses penyusunan anggaran, pelaksanaan kegiatan, hingga pelaporan keuangan. Transparansi yang baik tercermin dari publikasi dokumen anggaran yang jelas dan mudah dimengerti, proses pengadaan barang dan jasa yang terbuka, serta kemudahan akses terhadap informasi keuangan melalui berbagai media. Implementasi transparansi secara efektif dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat dan mendorong partisipasi publik dalam pengawasan pengelolaan keuangan daerah.

Kompetensi aparatur pemerintah daerah merupakan faktor penting lainnya yang memengaruhi akuntabilitas. Kompetensi mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap profesional dalam pengelolaan keuangan yang sesuai dengan peraturan yang berlaku. Hal ini meliputi kemampuan teknis di bidang

akuntansi dan keuangan, pemahaman terhadap regulasi daerah, keterampilan dalam menggunakan sistem informasi keuangan, serta integritas pribadi. Kompetensi yang tinggi akan berdampak langsung pada kualitas laporan keuangan, efektivitas implementasi kebijakan fiskal, dan keandalan pengendalian internal. Upaya peningkatan kompetensi dapat dilakukan melalui pelatihan, pendidikan berkelanjutan, dan pengembangan kapasitas sumber daya manusia.

Selanjutnya, sistem akuntansi keuangan daerah menjadi infrastruktur teknis yang mendasari proses pencatatan, penggolongan, peringkasan, dan pelaporan transaksi keuangan. Sistem ini berfungsi sebagai alat pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Efektivitasnya dapat diukur dari keandalan, ketepatan waktu, kelengkapan data, serta kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan. Sistem akuntansi yang berjalan baik akan menghasilkan informasi yang berkualitas, relevan untuk pengambilan keputusan, serta mendukung proses pengawasan dan evaluasi kinerja keuangan.

Sebagai variabel dependen, akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah mencerminkan kewajiban pemerintah daerah untuk menyampaikan pertanggungjawaban terhadap seluruh aktivitas keuangannya kepada pihak-pihak yang berwenang, seperti DPRD, masyarakat, dan pemerintah pusat. Akuntabilitas ini dapat dilihat dari indikator seperti kesesuaian pelaksanaan anggaran dengan perencanaan, ketepatan waktu pelaporan, kualitas laporan keuangan, serta tanggapan terhadap temuan audit. Akuntabilitas yang baik menghasilkan opini

audit yang wajar, minim temuan ketidakpatuhan, dan mampu meningkatkan kepercayaan stakeholder terhadap kinerja pemerintah daerah.

Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) berperan sebagai variabel moderasi dalam penelitian ini. SPIP merupakan proses integral yang dirancang untuk memberikan keyakinan memadai bahwa tujuan organisasi dapat tercapai secara efektif, efisien, dan sesuai peraturan. SPIP mencakup lima komponen utama: lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan. Keberadaan SPIP yang efektif akan memperkuat hubungan antara transparansi, kompetensi, dan sistem akuntansi dengan akuntabilitas. Sistem ini mampu meningkatkan deteksi dini terhadap penyimpangan, memperkuat mekanisme pengawasan internal, dan memastikan bahwa setiap proses pengelolaan keuangan berjalan sesuai dengan prinsip *good governance*.

Secara keseluruhan, hubungan antarvariabel dalam penelitian ini menunjukkan bahwa transparansi, kompetensi, dan sistem akuntansi keuangan berkontribusi secara simultan dalam membentuk akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Ketiga variabel tersebut saling melengkapi—transparansi menciptakan ruang pengawasan yang terbuka, kompetensi menjamin pelaksanaan yang profesional, dan sistem akuntansi menyediakan informasi keuangan yang andal. SPIP memperkuat relasi tersebut dengan memperkuat struktur pengendalian dan mitigasi risiko, sehingga secara keseluruhan mendukung tercapainya tata kelola keuangan daerah yang akuntabel dan terpercaya.

4.2 Karakteristik Responden

Karakteristik responden dalam penelitian ini terdiri dari rentang usia, jenis kelamin, dan jenjang pendidikan terakhir. Secara detail, karakteristik responden penelitian dirangkum dalam Tabel 4.1 berikut.

Tabel 4.1 Karakteristik Responden

Karakteristik	Frekuensi	Persentase
Rentang Usia (Tahun)		
< 20	-	-
21 – 30	12	15,5%
31 – 40	20	26%
41 – 50	25	32,5%
> 50	21	26%
Total	78	100%
Jenis Kelamin		
Laki-Laki	36	45,5%
Perempuan	42	54,5%
Total	78	100%

Tabel 4.2 Jabatan Responden

Jabatan	Jumlah
Kepala Sub Bagian Keuangan	1
Bendahara Pengeluaran/Penerimaan	1
Staff Pengelola Keuangan	7
Pejabat Penatausahaan Keuangan	9
Pengelolaan Anggaran	7
Pegawai Honorer Keuangan	8
Kepala Sub Bagian SDM	1
Pengadaan dan Pembangunan SDM	6
Staff Kepegawaian/Analisis SDM	6
Pengelola Kinerja Pegawai	5
Tim Penilaian Kinerja	8
Petugas Administrasi Mutasi dan Promosi	9
Pegawai Honorer SDM	10
Jumlah	78

Berdasarkan Tabel 4.1 di atas, rentang usia responden didominasi dengan usia 41-50 tahun sebanyak 25 orang atau sebesar 32,5% diikuti dengan rentang usia 31- 40 tahun dan > 50 tahun dengan masing-masing sebanyak 20 orang atau sebesar 26% dan paling sedikit pada rentang 21-30 tahun sebanyak 12 orang atau sebesar 15,5%. Kemudian berdasarkan jenis kelamin menunjukkan jika responden berjenis kelamin perempuan sebanyak 42 orang atau sebesar 54,5% lebih mendominasi daripada responden berjenis kelamin laki-laki sebanyak 35 orang atau sebesar 45,5%. Jumlah kuesioner yang disebarikan sebanyak 78 eksemplar, seluruhnya berhasil dikembalikan sebanyak 78, dan setelah melalui proses pemeriksaan, seluruh kuesioner tersebut dinyatakan layak dan digunakan dalam analisis penelitian.

4.3 Hasil Analisis Deskriptif Variabel Penelitian

4.3.1 Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Y)

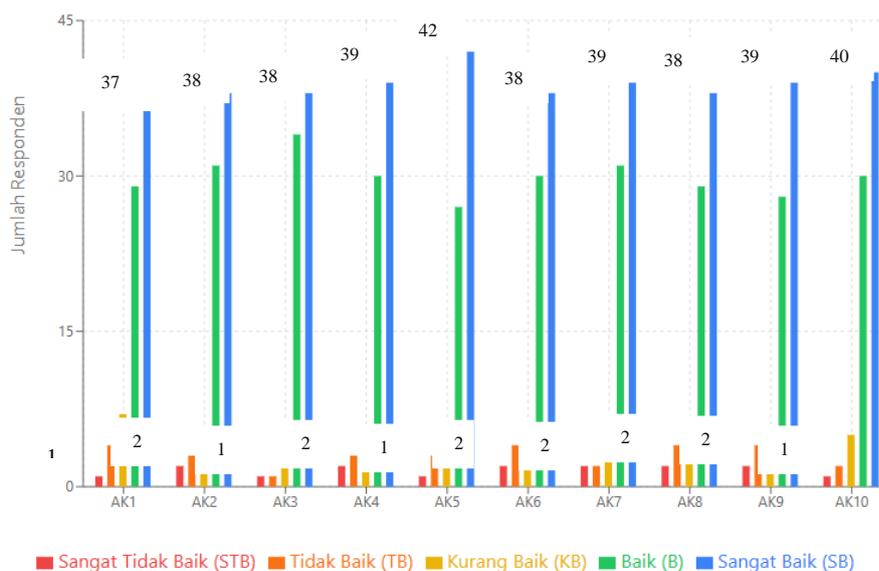
Hasil analisis deskriptif persentase jawaban responden pada variable Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah disajikan dalam Tabel 4.4 berikut.

Tabel 4.3 Persentase Jawaban Responden pada Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah

No.	Pernyataan	Nilai					Total	Skor Rata-Rata	Kategori
		STB	TB	KB	B	SB			
Akuntabilitas Kejujuran dan Hukum									
1.	Pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan dengan jujur dan terbebas dari penyalahgunaan jabatan.	1	4	7	29	37	78	4.7	Sangat Baik
		1%	5%	9%	37%	47%			

2.	Setiap transaksi keuangan daerah memiliki bukti pendukung yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan.	2	3	4	31	38	78	4.6	Sangat Baik
		3%	4%	5%	40%	49%			
Akuntabilitas Proses									
3.	Prosedur pengelolaan keuangan daerah telah dilaksanakan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP).	1	1	4	34	38	78	4.7	Sangat Baik
		1%	1%	5%	44%	49%			
4.	Proses pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip efisiensi dan efektivitas.	2	3	4	30	39	78	4.4	Sangat Baik
		3%	4%	5%	38%	50%			
Akuntabilitas Program									
5.	Program yang dibiayai dari APBD memiliki tujuan dan sasaran yang jelas.	1	3	5	27	42	78	4.5	Sangat Baik
		1%	4%	6%	35%	54%			
6.	Terdapat indikator kinerja yang terukur untuk setiap program yang dilaksanakan.	2	4	4	30	38	78	4.7	Sangat Baik
		3%	5%	5%	38%	49%			
7.	Pelaksanaan program dimonitor dan dievaluasi secara berkala untuk memastikan ketercapaian tujuan.	2	2	4	31	39	78	4.6	Sangat Baik
		3%	3%	5%	40%	50%			
Akuntabilitas Kebijakan									
8.	Kebijakan pengelolaan keuangan daerah dirumuskan dengan mempertimbangkan kebutuhan dan kepentingan masyarakat.	2	4	5	29	38	78	4.6	Sangat Baik

		3%	5%	6%	37%	49%			
9.	Terdapat mekanisme untuk menjelaskan dan mempertanggungjawabkan kebijakan keuangan daerah kepada publik.	2	4	5	28	39	78	4.7	Sangat Baik
		3%	5%	6%	36%	50%			
10.	Kebijakan pengelolaan keuangan daerah mendukung pencapaian visi dan misi pemerintah daerah.	1	2	5	30	40	78	4.5	Sangat Baik
		1%	3%	6%	38%	51%			



Gambar 4.1 Digram Persentase Jawaban Responden pada Akuntabilitas

Berdasarkan hasil survei terhadap 78 responden mengenai akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, terlihat bahwa secara keseluruhan masyarakat memberikan penilaian yang sangat positif terhadap pengelolaan keuangan daerah. Sebagian besar responden memberikan penilaian "Baik" dan "Sangat Baik" untuk

semua indikator yang diukur, dengan persentase gabungan kedua kategori tersebut mencapai lebih dari 80% pada setiap aspek akuntabilitas.

Dalam aspek akuntabilitas kejujuran dan hukum, mayoritas responden menunjukkan kepercayaan yang tinggi terhadap integritas pengelolaan keuangan daerah. Sebanyak 47% responden menilai bahwa pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan dengan jujur dan terbebas dari penyalahgunaan jabatan dengan kategori "Sangat Baik". Kepercayaan tinggi ini diduga didasari oleh transparansi proses anggaran atau pengalaman positif yang mereka saksikan langsung. Namun demikian, masih terdapat 1% responden yang memberikan penilaian "Sangat Tidak Baik", yang kemungkinan dilatarbelakangi oleh pengalaman atau pengetahuan mereka terhadap praktik penyalahgunaan wewenang seperti korupsi, kolusi, atau nepotisme. Sementara itu, untuk aspek dokumentasi dan pertanggungjawaban transaksi keuangan, 49% responden memberikan penilaian "Sangat Baik", yang mencerminkan kepercayaan mereka terhadap sistem audit rutin, pencatatan akuntansi yang tertib, dan prosedur dokumentasi yang ketat. Meskipun demikian, masih ada 3% responden yang menilai "Sangat Tidak Baik", kemungkinan karena pernah menemui transaksi yang tidak dilengkapi bukti yang valid atau laporan yang tidak sesuai dengan realisasi.

Pada dimensi akuntabilitas proses, responden menunjukkan apresiasi yang tinggi terhadap pelaksanaan prosedur dan efektivitas pengelolaan keuangan. Sebanyak 49% responden menilai bahwa prosedur pengelolaan keuangan daerah telah dilaksanakan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) dengan kategori "Sangat Baik", yang menunjukkan bahwa mereka melihat prosedur

keuangan berjalan secara sistematis dan sesuai aturan yang berlaku. Namun, 1% responden masih memberikan penilaian "Sangat Tidak Baik", yang diduga karena pengalaman mereka menunjukkan adanya pelanggaran terhadap SOP atau proses yang dilaksanakan secara tidak tepat. Untuk aspek efisiensi dan efektivitas, 50% responden memberikan penilaian "Sangat Baik", menunjukkan bahwa sebagian besar merasa sumber daya telah digunakan secara optimal. Akan tetapi, 3% responden menilai sangat tidak baik, yang mungkin merujuk pada pengalaman melihat pemborosan anggaran, pengadaan barang atau jasa yang tidak tepat sasaran, atau program yang tidak memberikan hasil sesuai dengan biaya yang dikeluarkan.

Akuntabilitas program menunjukkan hasil yang sangat menggembirakan dengan tingkat kepuasan yang tinggi dari responden. Sebanyak 54% responden memberikan penilaian "Sangat Baik" untuk kejelasan tujuan dan sasaran program yang dibiayai dari APBD, yang diduga karena program-program pemerintah daerah memiliki rencana kerja dan target yang terpublikasi dengan baik. Meskipun demikian, masih ada 1% responden yang menilai "Sangat Tidak Baik", kemungkinan karena menganggap beberapa program terkesan hanya formalitas tanpa arah atau tujuan yang jelas. Untuk aspek indikator kinerja, 49% responden menyatakan "Sangat Baik", menunjukkan keyakinan bahwa ada ukuran keberhasilan yang jelas dalam setiap program. Adapun 3% responden yang memilih "Sangat Tidak Baik" kemungkinan karena tidak melihat adanya sistem penilaian atau indikator kinerja yang transparan dan objektif di lapangan. Sementara itu, untuk monitoring dan evaluasi program, 50% responden

memberikan penilaian "Sangat Baik", menunjukkan kepercayaan pada sistem pengawasan yang berjalan dengan baik. Namun, 3% responden masih menilai "Sangat Tidak Baik", mungkin karena belum pernah melihat adanya laporan hasil evaluasi atau menilai bahwa pengawasan hanya bersifat formalitas tanpa tindak lanjut yang nyata.

Dalam hal akuntabilitas kebijakan, mayoritas responden menunjukkan kepuasan terhadap proses perumusan dan implementasi kebijakan keuangan daerah. Sebanyak 49% responden menjawab "Sangat Baik" untuk aspek pertimbangan kebutuhan dan kepentingan masyarakat dalam perumusan kebijakan, yang mungkin dipengaruhi oleh keterlibatan masyarakat dalam musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) atau forum publik lainnya. Namun, 3% responden menilai "Sangat Tidak Baik", karena merasa bahwa kebijakan sering tidak mencerminkan aspirasi masyarakat dan hanya menguntungkan pihak tertentu. Untuk mekanisme pertanggungjawaban kepada publik, 50% responden memberikan penilaian "Sangat Baik", yang diduga karena adanya forum keterbukaan informasi seperti publikasi laporan APBD atau pertemuan dengan warga. Meskipun demikian, 3% responden menjawab "Sangat Tidak Baik", mungkin karena merasa tidak pernah dilibatkan atau tidak mengetahui adanya transparansi tersebut. Akhirnya, untuk kesesuaian kebijakan dengan visi dan misi daerah, 51% responden menjawab "Sangat Baik", yang menunjukkan persepsi bahwa kebijakan berjalan seiring dengan rencana strategis daerah. Namun, 1% responden memilih "Sangat Tidak Baik", kemungkinan

karena menganggap bahwa kebijakan yang ada tidak relevan atau bahkan bertentangan dengan visi daerah.

Secara keseluruhan, hasil survei ini menunjukkan bahwa akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah telah mencapai tingkat yang sangat memuaskan di mata masyarakat. Meskipun masih terdapat sebagian kecil responden yang memberikan penilaian negatif, hal ini dapat menjadi masukan berharga untuk perbaikan berkelanjutan dalam pengelolaan keuangan daerah. Tingginya persentase responden yang memberikan penilaian positif mengindikasikan bahwa upaya-upaya transparansi, akuntabilitas, dan tata kelola pemerintahan yang baik telah mulai membuahkan hasil dan mendapat pengakuan dari masyarakat.

4.3.2 Transparansi (X1)

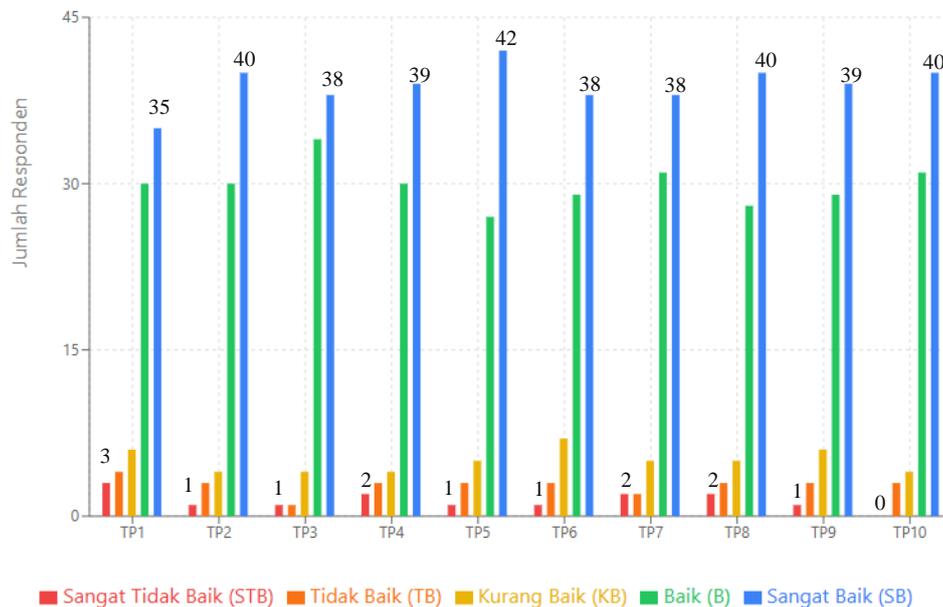
Hasil analisis deskriptif persentase jawaban responden pada variabel Transparansi disajikan dalam Tabel 4.4 berikut.

Tabel 4.4 Persentase Jawaban Responden pada Transparansi

No.	Pernyataan	Nilai					Total	Skor Rata-Rata	Kategori
		STB	TB	KB	B	SB			
Ketersediaan dan Akseibilitas Dokumen									
1.	Dokumen keuangan daerah tersedia untuk diakses oleh publik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.	3	4	6	30	35	78	4.7	Sangat Baik
		4%	5%	8%	38%	45%			
2.	Informasi tentang pengelolaan keuangan daerah dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.	1	3	4	30	40	78	4.6	Sangat Baik
		1%	4%	5%	38%	51%			

Kejelasan dan Kelengkapan Informasi									
3.	Informasi dalam dokumen pengelolaan keuangan daerah disajikan dengan bahasa yang mudah dipahami.	1	1	4	34	38	78	4.7	Sangat Baik
		1%	1%	5%	44%	49%			
4.	Dokumen keuangan daerah memuat informasi yang lengkap mengenai perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban anggaran.	2	3	4	30	39	78	4.4	Sangat Baik
		3%	4%	5%	38%	50%			
Keterbukaan Proses									
5.	Proses perencanaan anggaran daerah dilakukan secara terbuka dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan.	1	3	5	27	42	78	4.5	Sangat Baik
		1%	4%	6%	35%	54%			
6.	Mekanisme pelaksanaan anggaran daerah dilakukan secara transparan sesuai dengan ketentuan.	1	3	7	29	38	78	4.7	Sangat Baik
		1%	4%	9%	37%	49%			
7.	Proses pengadaan barang dan jasa dilaksanakan secara terbuka dan dapat dimonitor oleh publik.	2	2	5	31	38	78	4.6	Sangat Baik
		3%	3%	6%	40%	49%			
Kerangka Informasi yang Menjamin Transparansi									
8.	Terdapat peraturan daerah yang secara khusus mengatur tentang transparansi pengelolaan keuangan daerah.	2	3	5	28	40	78	4.6	Sangat Baik
		3%	4%	6%	36%	51%			
9.	Regulasi yang ada memberikan jaminan hukum bagi masyarakat untuk mengakses informasi keuangan daerah.	1	3	6	29	39	78	4.7	Sangat Baik

		1%	4%	8%	37%	50%			
10.	Implementasi kebijakan transparansi keuangan daerah diawasi oleh lembaga pengawas yang independen.	0	3	4	31	40	78	4.5	Sangat Baik
		1%	4%	8%	37%	50%			



Gambar 4.2 Digram Persentase Jawaban Responden pada Transparansi

Berdasarkan hasil survei terhadap 78 responden mengenai transparansi pengelolaan keuangan daerah, secara keseluruhan menunjukkan gambaran yang sangat positif dengan mayoritas responden memberikan penilaian "Baik" dan "Sangat Baik" untuk semua dimensi transparansi yang diukur. Persentase gabungan kedua kategori positif tersebut konsisten mencapai lebih dari 80% pada setiap indikator, mencerminkan tingkat kepuasan masyarakat yang tinggi terhadap upaya keterbukaan informasi keuangan daerah. Hasil ini mengindikasikan bahwa

implementasi prinsip-prinsip transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah telah mulai membuahkan hasil dan mendapat pengakuan dari masyarakat.

Dalam dimensi ketersediaan dan aksesibilitas dokumen, responden menunjukkan apresiasi yang signifikan terhadap upaya keterbukaan informasi keuangan daerah. Sebanyak 45% responden menilai ketersediaan dokumen keuangan daerah untuk diakses publik dengan kategori "Sangat Baik", yang menunjukkan bahwa mayoritas merasakan adanya keterbukaan dokumen seperti APBD, laporan realisasi anggaran, dan laporan kinerja yang dapat diakses melalui media online atau papan pengumuman resmi. Meskipun demikian, masih terdapat 4% responden yang menilai "Sangat Tidak Baik", kemungkinan karena mereka belum pernah melihat dokumen tersebut tersedia secara publik atau merasa aksesnya sangat terbatas, baik karena hambatan teknologi maupun sosialisasi yang kurang memadai. Sementara itu, untuk kemudahan akses informasi pengelolaan keuangan daerah, 51% responden memberikan penilaian "Sangat Baik", yang diduga berasal dari pengalaman positif dalam mengakses informasi melalui situs resmi pemerintah daerah atau media sosial. Namun, masih ada 1% responden yang menjawab "Sangat Tidak Baik", kemungkinan karena tidak pernah menemukan informasi penting yang tersedia secara publik atau menganggap bahwa informasi disajikan dengan cara yang menyulitkan pemahaman masyarakat awam.

Aspek kejelasan dan kelengkapan informasi menunjukkan hasil yang menggembirakan dengan tingkat kepuasan yang tinggi dari responden. Sebanyak 49% responden menilai penyajian informasi dengan bahasa yang mudah dipahami

dalam kategori "Sangat Baik", yang dapat diartikan bahwa penyajian informasi menggunakan bahasa yang cukup komunikatif dan tidak terlalu teknokratis. Namun, 1% responden masih menilai "Sangat Tidak Baik", mungkin karena merasa bahwa bahasa atau format laporan terlalu teknis dan tidak inklusif bagi warga biasa, sehingga menimbulkan kesan kurang transparan. Untuk kelengkapan informasi dalam dokumen keuangan daerah, 50% responden memberikan jawaban "Sangat Baik", mengindikasikan bahwa sebagian besar menilai dokumen tersebut mencakup siklus keuangan secara utuh mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pertanggungjawaban anggaran. Akan tetapi, 3% responden menjawab "Sangat Tidak Baik", kemungkinan karena mereka menemukan adanya informasi yang tidak dijelaskan secara rinci atau adanya tahapan yang tidak dilaporkan secara komprehensif.

Dimensi keterbukaan proses memperlihatkan tingkat partisipasi dan transparansi yang tinggi dalam pengelolaan keuangan daerah. Sebanyak 54% responden menilai proses perencanaan anggaran daerah yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan dengan kategori "Sangat Baik", mengindikasikan bahwa keterlibatan masyarakat melalui forum seperti musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) dirasakan nyata dan bermakna. Namun, 1% responden yang menjawab "Sangat Tidak Baik" kemungkinan berasal dari pengalaman individu atau kelompok yang merasa tidak pernah dilibatkan dalam perencanaan anggaran atau melihat forum partisipasi hanya bersifat simbolik tanpa dampak nyata. Untuk transparansi mekanisme pelaksanaan anggaran, 49% responden menjawab "Sangat Baik", kemungkinan besar karena mereka melihat

proses realisasi anggaran dilaporkan secara terbuka melalui laporan periodik maupun media digital. Meskipun demikian, 1% responden memilih "Sangat Tidak Baik", mungkin karena menilai bahwa praktik pelaksanaan anggaran tidak sesuai ketentuan atau tidak dipublikasikan secara terbuka kepada publik. Sementara itu, dalam hal proses pengadaan barang dan jasa, 49% responden menjawab "Sangat Baik", menandakan persepsi bahwa proses lelang atau pengadaan barang telah memenuhi prinsip keterbukaan, mungkin melalui Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) atau kanal serupa. Namun, 3% responden memilih "Sangat Tidak Baik", kemungkinan besar karena menduga adanya praktik yang tidak transparan seperti penunjukan langsung yang tidak wajar atau pengadaan yang tidak diumumkan secara terbuka.

Kerangka informasi yang menjamin transparansi menunjukkan hasil yang sangat positif dengan tingkat kepercayaan masyarakat yang tinggi terhadap aspek regulasi dan pengawasan. Sebanyak 51% responden menilai keberadaan peraturan daerah yang mengatur transparansi pengelolaan keuangan daerah dengan kategori "Sangat Baik", yang mungkin menunjukkan bahwa masyarakat mengetahui keberadaan regulasi seperti Peraturan Daerah tentang Transparansi Informasi Publik. Namun, 3% responden menilai "Sangat Tidak Baik" karena mungkin tidak pernah melihat penerapan atau keberadaan regulasi tersebut secara nyata dalam kehidupan sehari-hari. Untuk jaminan hukum akses informasi, 50% responden memberikan jawaban "Sangat Baik", mengisyaratkan bahwa regulasi seperti Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) dianggap cukup melindungi hak masyarakat dalam mengakses informasi keuangan daerah. Akan

tetapi, 1% responden yang menjawab "Sangat Tidak Baik" kemungkinan merasa bahwa meskipun regulasi ada, dalam praktiknya hak tersebut sulit untuk diwujudkan, misalnya karena prosedur permintaan informasi yang berbelit-belit atau tidak responsif. Yang menarik, untuk aspek pengawasan oleh lembaga independen, 50% responden menjawab "Sangat Baik" dan tidak ada satupun responden yang memilih "Sangat Tidak Baik", menunjukkan kepercayaan yang tinggi terhadap lembaga seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Inspektorat, atau Ombudsman yang dinilai menjalankan fungsi pengawasan secara objektif dan memiliki legitimasi kuat di mata publik.

Secara keseluruhan, hasil survei transparansi pengelolaan keuangan daerah ini menggambarkan pencapaian yang sangat memuaskan dalam implementasi prinsip-prinsip keterbukaan informasi publik. Tingginya persentase responden yang memberikan penilaian positif pada semua dimensi transparansi menunjukkan bahwa upaya-upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan keterbukaan, aksesibilitas, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan telah mulai membuahkan hasil yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Meskipun masih terdapat sebagian kecil responden yang memberikan penilaian negatif, hal ini dapat dijadikan sebagai masukan berharga untuk perbaikan berkelanjutan, terutama dalam aspek sosialisasi, penyederhanaan bahasa komunikasi, dan peningkatan aksesibilitas informasi bagi seluruh lapisan masyarakat. Keberhasilan ini dapat menjadi fondasi yang kuat untuk terus meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik dan memperkuat kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan daerah.

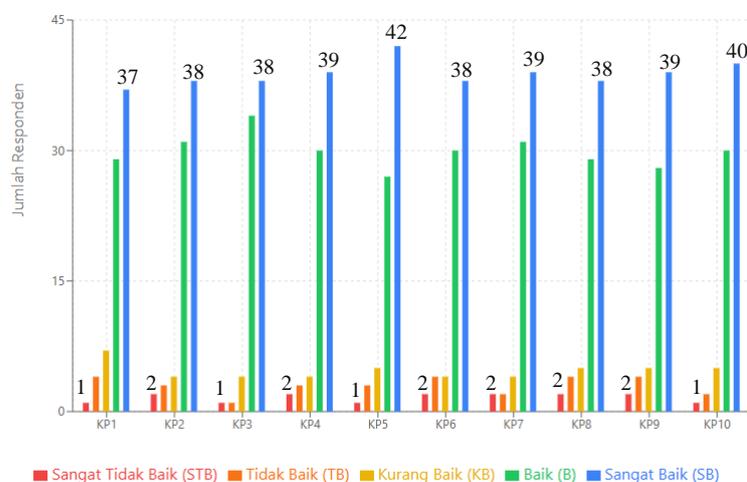
4.3.3 Kompetensi (X2)

Hasil analisis deskriptif persentase jawaban responden pada variable Kompetensi disajikan dalam Tabel 4.5 berikut.

Tabel 4.5 Persentase Jawaban Responden pada Kompetensi

No.	Pernyataan	Nilai					Total	Skor Rata-Rata	Kategori
		STB	TB	KB	B	SB			
Pengalaman Kerja									
1.	Pegawai memiliki pemahaman yang memadai tentang peraturan dan regulasi terkait pengelolaan keuangan daerah.	1	4	7	29	37	78	4.7	Sangat Baik
		1%	5%	9%	37%	47%			
2.	Pengetahuan tentang standar akuntansi pemerintahan diterapkan dengan baik dalam pengelolaan keuangan daerah.	2	3	4	31	38	78	4.6	Sangat Baik
		3%	4%	5%	40%	49%			
Pendidikan									
3.	Pegawai mampu mengoperasikan aplikasi dan sistem informasi keuangan daerah dengan baik.	1	1	4	34	38	78	4.7	Sangat Baik
		1%	1%	5%	44%	49%			
4.	Kemampuan analisis dalam menginterpretasikan data keuangan diaplikasikan dengan tepat oleh pegawai.	2	3	4	30	39	78	4.4	Sangat Baik
		3%	4%	5%	38%	50%			
Pengetahuan									
5.	Sistem akuntansi keuangan yang digunakan telah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) terbaru.	1	3	5	27	42	78	4.5	Sangat Baik

		1%	4%	6%	35%	54%			
6.	Penerapan basis akrual dalam sistem akuntansi keuangan daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan SAP.	2	4	4	30	38	78	4.7	Sangat Baik
		3%	5%	5%	38%	49%			
7.	Sistem akuntansi keuangan dapat mengakomodasi perubahan regulasi SAP dengan baik.	2	2	4	31	39	78	4.6	Sangat Baik
		3%	3%	5%	40%	50%			
Keterampilan									
8.	Terdapat prosedur yang jelas untuk pencatatan transaksi keuangan dalam sistem akuntansi keuangan daerah.	2	4	5	29	38	78	4.6	Sangat Baik
		3%	5%	6%	37%	49%			
9.	Proses identifikasi, pengukuran, dan pencatatan transaksi ekonomi dilakukan secara konsisten.	2	4	5	28	39	78	4.7	Sangat Baik
		3%	5%	6%	36%	50%			
10.	Penggunaan kode rekening dalam sistem akuntansi keuangan sesuai dengan standar yang berlaku	1	2	5	30	40	78	4.5	Sangat Baik
		1%	3%	6%	38%	51%			



Gambar 4.3 Digram Persentase Jawaban Responden pada Kompetensi

Berdasarkan hasil survei terhadap 78 responden mengenai kompetensi dalam pengelolaan keuangan daerah, secara keseluruhan menunjukkan penilaian yang sangat positif dengan mayoritas responden memberikan penilaian "Baik" dan "Sangat Baik" untuk semua aspek kompetensi yang diukur. Hasil ini mencerminkan tingkat kepuasan masyarakat yang tinggi terhadap kualitas sumber daya manusia yang mengelola keuangan daerah, mulai dari aspek pengetahuan regulasi, kemampuan teknis, hingga keterampilan operasional. Persentase gabungan kategori positif yang konsisten mencapai lebih dari 80% pada setiap indikator menunjukkan bahwa investasi dalam pengembangan kapasitas pegawai telah mulai membuahkan hasil dan mendapat pengakuan dari masyarakat.

Dalam aspek pengetahuan regulasi dan standar akuntansi, responden menunjukkan kepercayaan yang tinggi terhadap kompetensi pegawai dalam memahami dan menerapkan peraturan yang berlaku. Sebanyak 47% responden

menjawab "Sangat Baik" untuk pemahaman pegawai tentang peraturan dan regulasi terkait pengelolaan keuangan daerah, yang menunjukkan bahwa mayoritas merasa pegawai memiliki kompetensi hukum dan regulatif yang memadai dalam menjalankan tugas. Hal ini mungkin didasari oleh adanya pelatihan rutin atau pengalaman kerja yang cukup dalam bidang pengelolaan keuangan. Namun, masih terdapat 1% responden yang menjawab "Sangat Tidak Baik", yang diduga karena pernah mengalami interaksi dengan pegawai yang menunjukkan ketidaktahuan terhadap regulasi, seperti kesalahan prosedural atau keterlambatan administrasi akibat miskomunikasi aturan. Sementara itu, untuk penerapan standar akuntansi pemerintahan, 49% responden menjawab "Sangat Baik", menunjukkan kepercayaan bahwa prinsip Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) sudah diterapkan secara konsisten dalam praktik sehari-hari. Akan tetapi, 3% responden menjawab "Sangat Tidak Baik", yang kemungkinan didasari oleh pengalaman dengan laporan yang tidak sesuai standar atau adanya kelalaian dalam pencatatan dan pelaporan yang tidak akurat menurut ketentuan SAP.

Dimensi kemampuan teknis dan analitis menunjukkan hasil yang menggembirakan dengan tingkat kepuasan yang tinggi terhadap keterampilan pegawai dalam mengoperasikan sistem dan menganalisis data keuangan. Sebanyak 49% responden memberikan penilaian "Sangat Baik" untuk kemampuan pegawai dalam mengoperasikan aplikasi dan sistem informasi keuangan daerah, mengindikasikan bahwa pegawai dinilai memiliki keterampilan teknologi informasi yang mumpuni, terutama dalam penggunaan

sistem seperti Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) atau Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD). Namun, 1% responden memilih "Sangat Tidak Baik", kemungkinan karena pernah menemui hambatan teknis seperti kesalahan input data atau lambatnya pelayanan akibat ketidakmampuan dalam mengoperasikan sistem digital. Untuk kemampuan analisis data keuangan, 50% responden menjawab "Sangat Baik", yang diduga karena responden menilai pegawai memiliki kecakapan analisis yang baik, misalnya dalam merancang laporan komprehensif atau mengevaluasi efisiensi penggunaan anggaran. Meskipun demikian, 3% responden menjawab "Sangat Tidak Baik", mungkin karena pernah menyaksikan kesalahan analisis atau interpretasi data yang berakibat pada pengambilan keputusan yang tidak akurat atau tidak optimal.

Aspek penerapan sistem akuntansi sesuai standar menunjukkan tingkat kepercayaan yang sangat tinggi terhadap kesesuaian sistem dengan perkembangan regulasi terkini. Sebanyak 54% responden menilai "Sangat Baik" untuk kesesuaian sistem akuntansi keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan terbaru, yang menunjukkan kepercayaan terhadap pembaruan sistem sesuai perkembangan regulasi dan komitmen untuk selalu mengikuti standar yang berlaku. Namun, 1% responden menjawab "Sangat Tidak Baik", kemungkinan karena sistem akuntansi yang mereka temui masih menggunakan format lama atau belum mencerminkan pembaruan SAP terbaru. Untuk penerapan basis akrual, 49% responden menilai "Sangat Baik", menunjukkan bahwa sebagian besar merasa basis akrual sudah diimplementasikan sesuai ketentuan dengan baik. Akan tetapi, 3% responden memilih "Sangat Tidak

Baik", mungkin karena melihat adanya kesulitan dalam pencatatan beban dan pendapatan secara periodik atau kurangnya pelatihan pegawai tentang transisi dari basis kas ke basis akrual. Sementara itu, untuk fleksibilitas sistem dalam mengakomodasi perubahan regulasi, 50% responden menilai "Sangat Baik", yang diduga karena sistem yang digunakan dianggap responsif terhadap pembaruan kebijakan. Namun, 3% responden menjawab "Sangat Tidak Baik", kemungkinan karena sistem yang digunakan belum mampu menyesuaikan pembaruan regulasi secara cepat atau minimnya sosialisasi ketika terjadi revisi SAP.

Keterampilan operasional dalam pencatatan dan pengelolaan transaksi menunjukkan tingkat konsistensi dan kepatuhan yang sangat baik terhadap prosedur yang ditetapkan. Sebanyak 49% responden menjawab "Sangat Baik" untuk kejelasan prosedur pencatatan transaksi keuangan, yang menunjukkan persepsi bahwa ada standar operasional pencatatan transaksi yang jelas dan mudah dipahami. Namun, 3% responden menilai "Sangat Tidak Baik", mungkin karena pernah melihat pencatatan yang tidak seragam antarunit atau tidak adanya pedoman teknis yang mudah dipahami pegawai. Untuk konsistensi proses identifikasi, pengukuran, dan pencatatan transaksi ekonomi, 50% responden menilai "Sangat Baik", mengindikasikan bahwa prosedur pencatatan transaksi berjalan dengan konsistensi tinggi dan dapat diandalkan. Di sisi lain, 3% responden yang menjawab "Sangat Tidak Baik" mungkin memiliki pengalaman melihat data yang tidak sinkron atau perubahan pencatatan yang tidak dijelaskan secara memadai. Yang paling menonjol adalah aspek

penggunaan kode rekening, dimana 51% responden menilai "Sangat Baik", menunjukkan bahwa mayoritas percaya kode rekening digunakan dengan tertib sesuai klasifikasi APBD dan standar yang berlaku. Meskipun demikian, masih ada 1% responden yang menjawab "Sangat Tidak Baik", yang mungkin karena mengalami kebingungan akibat penggunaan kode yang tidak konsisten atau tidak sesuai dengan struktur kode terbaru dari Kementerian Dalam Negeri.

Secara keseluruhan, hasil survei kompetensi pengelolaan keuangan daerah ini menggambarkan pencapaian yang sangat memuaskan dalam hal pengembangan kapasitas sumber daya manusia di bidang pengelolaan keuangan. Tingginya persentase responden yang memberikan penilaian positif pada semua aspek kompetensi menunjukkan bahwa investasi dalam pelatihan, pengembangan sistem, dan peningkatan kapasitas pegawai telah memberikan dampak yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Meskipun masih terdapat sebagian kecil responden yang memberikan penilaian negatif, hal ini dapat dijadikan sebagai indikator untuk perbaikan berkelanjutan, terutama dalam aspek pelatihan berkelanjutan, sosialisasi perubahan regulasi, dan standarisasi prosedur operasional. Keberhasilan ini menjadi modal penting untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah dan memperkuat kepercayaan publik terhadap kapabilitas aparatur pemerintah daerah dalam menjalankan amanah pengelolaan keuangan yang akuntabel dan profesional.

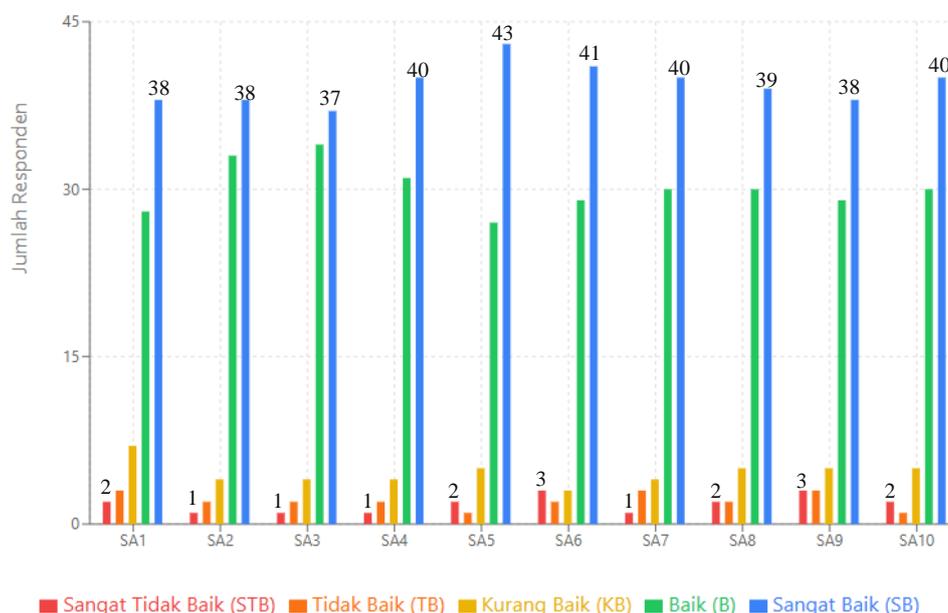
4.3.4 Sistem Akuntansi Keuangan (X3)

Hasil analisis deskriptif persentase jawaban responden pada variable Sistem Akuntansi Keuangan disajikan dalam Tabel 4.6 berikut.

Tabel 4.6 Persentase Jawaban Responden pada Sistem Akuntansi
Keuangan

No.	Pernyataan	Nilai					Total	Skor Rata-Rata	Kategori
		STB	TB	KB	B	SB			
Kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintah									
1.	Sistem akuntansi keuangan yang digunakan telah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) terbaru.	2	3	7	28	38	78	4.7	Sangat Baik
		3%	4%	9%	36%	49%			
2.	Penerapan basis akrual dalam sistem akuntansi keuangan daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan SAP.	1	2	4	33	38	78	4.6	Sangat Baik
		1%	3%	5%	42%	49%			
3.	Sistem akuntansi keuangan dapat mengakomodasi perubahan regulasi SAP dengan baik.	1	2	4	34	37	78	4.6	Sangat Baik
		1%	3%	5%	44%	47%			
Prosedur Pencatatan Akuntansi Berdasarkan Standar Umum									
4.	Terdapat prosedur yang jelas untuk pencatatan transaksi keuangan dalam sistem akuntansi keuangan daerah.	1	2	4	31	40	78	4.7	Sangat Baik
		1%	3%	5%	40%	51%			
5.	Proses identifikasi, pengukuran, dan pencatatan transaksi ekonomi dilakukan secara konsisten.	2	1	5	27	43	78	4.4	Sangat Baik
		3%	1%	6%	35%	55%			
6.	Penggunaan kode rekening dalam sistem akuntansi keuangan sesuai dengan standar yang berlaku	3	2	3	29	41	78	4.4	Sangat

		4%	3%	4%	37%	53%			Baik
Penyusunan Laporan Keuangan Secara Periodik									
7.	Laporan keuangan daerah disusun secara periodik sesuai dengan peraturan yang berlaku.	1	3	4	30	40	78	4.5	Sangat Baik
		1%	4%	5%	38%	51%			
8.	Sistem akuntansi keuangan menghasilkan laporan keuangan yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.	2	2	5	30	39	78	4.7	Sangat Baik
		3%	3%	6%	38%	50%			
9.	Laporan keuangan daerah dapat dihasilkan tepat waktu sesuai dengan jadwal yang ditetapkan.	3	3	5	29	38	78	4.6	Sangat Baik
		4%	4%	6%	37%	49%			
10..	Sistem akuntansi keuangan mampu menghasilkan berbagai laporan keuangan untuk keperluan internal dan eksternal.	2	1	5	30	40	78	4.7	Sangat Baik
		3%	1%	6%	38%	51%			



Gambar 4.4 Digram Persentase Jawaban Responden pada SAK

Berdasarkan hasil survei terhadap 78 responden mengenai sistem akuntansi keuangan daerah, secara keseluruhan menunjukkan penilaian yang sangat positif dengan mayoritas responden memberikan penilaian "Baik" dan "Sangat Baik" untuk semua aspek sistem akuntansi yang diukur. Hasil ini mencerminkan tingkat kepuasan masyarakat yang tinggi terhadap kualitas sistem akuntansi yang digunakan dalam pengelolaan keuangan daerah, mulai dari aspek kesesuaian dengan standar, prosedur pencatatan, hingga kemampuan menghasilkan laporan yang berkualitas. Persentase gabungan kategori positif yang konsisten mencapai lebih dari 80% pada setiap indikator menunjukkan bahwa implementasi sistem akuntansi keuangan daerah telah berjalan dengan baik dan mendapat pengakuan dari stakeholder.

Dalam aspek kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), responden menunjukkan kepercayaan yang tinggi terhadap sistem akuntansi

yang telah disesuaikan dengan standar terkini. Sebanyak 49% responden memilih "Sangat Baik" untuk kesesuaian sistem akuntansi keuangan dengan SAP terbaru, menandakan kepercayaan bahwa sistem yang digunakan telah menyesuaikan dengan standar terkini, baik dari sisi struktur laporan maupun kebijakan akuntansi yang berlaku. Namun, masih terdapat 3% responden yang menjawab "Sangat Tidak Baik", mungkin karena merasa sistem belum sepenuhnya menyesuaikan dengan pembaruan SAP, seperti lambatnya adopsi teknis atau minimnya sosialisasi atas perubahan standar yang baru diberlakukan. Untuk penerapan basis akrual, 49% responden memberikan pilihan "Sangat Baik", menunjukkan bahwa penerapan basis akrual dinilai telah berjalan sesuai harapan dan ketentuan yang ditetapkan dalam SAP. Meskipun demikian, 1% responden menjawab "Sangat Tidak Baik", kemungkinan karena mengalami kebingungan dalam proses pencatatan berbasis akrual atau karena pelaksanaannya belum optimal di semua satuan kerja perangkat daerah. Sementara itu, untuk kemampuan sistem dalam mengakomodasi perubahan regulasi SAP, 47% responden menilai "Sangat Baik", yang mencerminkan bahwa sistem dianggap cukup adaptif dan responsif terhadap perubahan regulasi. Namun, 1% responden menilai "Sangat Tidak Baik", mungkin karena pernah mengalami kasus dimana sistem tidak otomatis diperbarui mengikuti revisi SAP atau terdapat ketidaksesuaian antara sistem dan kebutuhan regulatif terbaru.

Aspek prosedur pencatatan akuntansi berdasarkan standar umum menunjukkan tingkat kepuasan yang sangat tinggi terhadap kejelasan dan konsistensi prosedur yang diterapkan. Sebanyak 51% responden menjawab

"Sangat Baik" untuk kejelasan prosedur pencatatan transaksi keuangan dalam sistem akuntansi, kemungkinan karena prosedur telah terdokumentasi dengan baik dan dijalankan secara konsisten dalam pelatihan serta praktik kerja sehari-hari. Namun, 1% responden menjawab "Sangat Tidak Baik", mungkin karena menghadapi ketidakjelasan dalam prosedur pencatatan, terutama dalam kasus-kasus transaksi khusus atau tidak lazim yang memerlukan perlakuan akuntansi khusus. Untuk konsistensi proses identifikasi, pengukuran, dan pencatatan transaksi ekonomi, 55% responden menjawab "Sangat Baik", menunjukkan bahwa mayoritas responden menilai proses tersebut telah berlangsung dengan ketekunan dan ketepatan yang dapat diandalkan. Sementara itu, 3% responden menjawab "Sangat Tidak Baik", yang kemungkinan berasal dari pengalaman melihat inkonsistensi antara pencatatan dan realisasi atau adanya perbedaan praktik pencatatan antarunit kerja yang menimbulkan kebingungan. Yang paling menonjol adalah aspek penggunaan kode rekening, dimana 53% responden menjawab "Sangat Baik", menunjukkan bahwa klasifikasi akun dan kode rekening dinilai tepat dan sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri. Meskipun demikian, 4% responden menjawab "Sangat Tidak Baik", kemungkinan karena pernah menemui penyalahgunaan atau ketidaktepatan dalam penggunaan kode rekening, seperti terjadinya duplikasi atau klasifikasi yang membingungkan dan tidak konsisten.

Dimensi penyusunan laporan keuangan secara periodik menunjukkan hasil yang sangat memuaskan dengan tingkat kepercayaan yang tinggi terhadap kualitas dan ketepatan waktu pelaporan. Sebanyak 51% responden menilai

"Sangat Baik" untuk penyusunan laporan keuangan daerah secara periodik sesuai peraturan, yang menunjukkan bahwa pelaporan dinilai disiplin dan sesuai dengan regulasi yang berlaku, seperti penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahunan. Namun, 1% responden menjawab "Sangat Tidak Baik", kemungkinan karena pengalaman dengan keterlambatan penyusunan laporan atau ketidaksesuaian antara isi laporan dan periode pelaporan yang ditentukan dalam regulasi. Untuk kelengkapan komponen laporan keuangan, 50% responden memberikan nilai "Sangat Baik" terhadap kemampuan sistem akuntansi menghasilkan laporan yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK), menunjukkan bahwa sistem dinilai mampu menyajikan seluruh komponen laporan utama dengan baik dan lengkap. Namun, 2% responden memilih "Sangat Tidak Baik", yang mungkin karena laporan tidak lengkap, CaLK tidak informatif, atau terdapat kesalahan teknis dalam penyusunan laporan yang kompleks. Sementara itu, untuk ketepatan waktu penyusunan laporan, 49% responden menjawab "Sangat Baik", menandakan bahwa sistem mendukung penyusunan laporan secara tepat waktu sesuai dengan jadwal yang ditetapkan. Meskipun demikian, 4% responden memilih "Sangat Tidak Baik", kemungkinan karena pernah mengalami keterlambatan akibat kendala teknis, beban kerja berlebih, atau proses validasi internal yang lambat dan tidak efisien. Akhirnya, untuk fleksibilitas sistem dalam menghasilkan berbagai jenis laporan, 51% responden menjawab "Sangat Baik", mengindikasikan bahwa sistem dinilai fleksibel dan informatif untuk berbagai

tujuan pelaporan baik internal maupun eksternal. Namun, 3% responden memilih "Sangat Tidak Baik", mungkin karena sistem tidak memberikan fleksibilitas yang memadai dalam memilih format, segmentasi data, atau laporan khusus yang dibutuhkan oleh instansi tertentu.

Secara keseluruhan, hasil survei sistem akuntansi keuangan daerah ini menggambarkan pencapaian yang sangat memuaskan dalam hal implementasi sistem akuntansi yang berkualitas dan sesuai dengan standar yang berlaku. Tingginya persentase responden yang memberikan penilaian positif pada semua aspek sistem akuntansi menunjukkan bahwa investasi dalam pengembangan sistem, pelatihan SDM, dan penyesuaian dengan regulasi terbaru telah memberikan dampak yang dapat dirasakan langsung oleh para stakeholder. Meskipun masih terdapat sebagian kecil responden yang memberikan penilaian negatif, hal ini dapat dijadikan sebagai masukan berharga untuk perbaikan berkelanjutan, terutama dalam aspek sosialisasi perubahan regulasi, peningkatan fleksibilitas sistem, dan standardisasi prosedur di seluruh unit kerja. Keberhasilan ini menjadi fondasi yang kuat untuk terus meningkatkan kualitas sistem akuntansi keuangan daerah dan memperkuat kepercayaan publik terhadap akurasi dan reliabilitas informasi keuangan yang dihasilkan oleh pemerintah daerah.

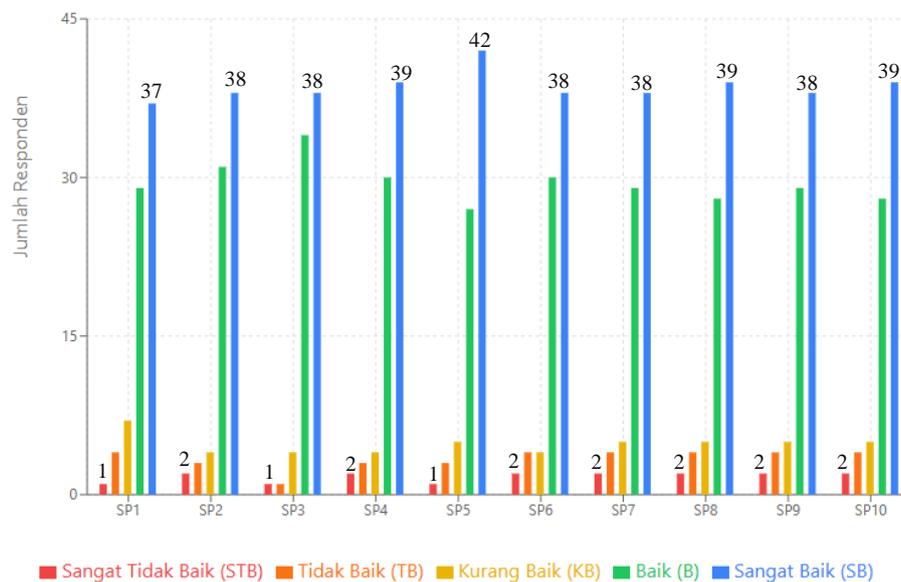
4.3.5 Sistem Pengendalian Internal Pemerintahan (Z)

Hasil analisis deskriptif persentase jawaban responden pada variable Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah disajikan dalam Tabel 4.7 berikut.

Tabel 4.7 Persentase Jawaban Responden pada SPIP

No.	Pernyataan	Nilai					Total	Skor Rata-Rata	Kategori
		STB	TB	KB	B	SB			
Lingkungan Pengendalian									
1.	Pimpinan instansi menunjukkan komitmen terhadap integritas dan nilai etika dalam pengelolaan keuangan daerah.	1	4	7	29	37	78	4.7	Sangat Baik
		1%	5%	9%	37%	47%			
2.	Terdapat struktur organisasi yang jelas dengan pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat.	2	3	4	31	38	78	4.6	Sangat Baik
		3%	4%	5%	40%	49%			
Penilaian Risiko									
3.	Instansi melakukan identifikasi risiko terhadap pencapaian tujuan pengelolaan keuangan daerah.	1	1	4	34	38	78	4.7	Sangat Baik
		1%	1%	5%	44%	49%			
4.	Risiko yang teridentifikasi dianalisis sebagai dasar penentuan penanganan risiko yang tepat.	2	3	4	30	39	78	4.4	Sangat Baik
		3%	4%	5%	38%	50%			
Kegiatan Pengendalian									
5.	Instansi memiliki kebijakan dan prosedur tertulis untuk mengendalikan kegiatan pengelolaan keuangan daerah.	1	3	5	27	42	78	4.5	Sangat Baik
		1%	4%	6%	35%	54%			
6.	Terdapat pemisahan fungsi yang memadai dalam proses pengelolaan keuangan daerah.	2	4	4	30	38		4.7	Sangat Baik

		3%	5%	5%	38%	49%	78		
Informansi dan Komunikasi									
7.	Instansi memperoleh dan menggunakan informasi yang berkualitas dan relevan untuk mendukung fungsi pengendalian internal.	2	4	5	29	38	78	4.6	Sangat Baik
		3%	5%	6%	37%	49%			
8.	Informasi terkait pengendalian internal dikomunikasikan dalam organisasi, termasuk tujuan dan tanggung jawab.	2	4	5	28	39	78	4.7	Sangat Baik
		3%	5%	6%	36%	50%			
Pemantauan Pengendalian Intern									
9.	Instansi melakukan evaluasi berkelanjutan terhadap efektivitas sistem pengendalian internal.	2	4	5	29	38	78	4.6	Sangat Baik
		3%	5%	6%	37%	49%			
10.	Kelemahan pengendalian internal dilaporkan kepada pihak yang bertanggung jawab untuk tindakan perbaikan.	2	4	5	28	39	78	4.7	Sangat Baik



Gambar 4.5 Persentase Jawaban Responden pada SPIP

Berdasarkan hasil survei terhadap 78 responden mengenai sistem pengendalian internal dalam pengelolaan keuangan daerah, secara keseluruhan menunjukkan penilaian yang sangat positif dengan mayoritas responden memberikan penilaian "Baik" dan "Sangat Baik" untuk semua komponen pengendalian internal yang diukur. Hasil ini mencerminkan tingkat kepuasan masyarakat yang tinggi terhadap efektivitas sistem pengendalian internal yang diterapkan dalam pengelolaan keuangan daerah, mulai dari lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, hingga pemantauan pengendalian internal. Persentase gabungan kategori positif yang konsisten mencapai lebih dari 80% pada setiap indikator menunjukkan bahwa implementasi sistem pengendalian internal telah berjalan dengan baik dan mendapat pengakuan dari stakeholder yang terlibat dalam pengelolaan keuangan daerah.

Dalam aspek lingkungan pengendalian, responden menunjukkan kepercayaan yang tinggi terhadap komitmen pimpinan dan struktur organisasi yang mendukung pengendalian internal yang efektif. Sebanyak 47% responden menilai komitmen pimpinan terhadap integritas dan etika dengan kategori "Sangat Baik", karena merasa pimpinan instansi mereka telah memberikan contoh perilaku etis, terbuka, dan akuntabel dalam menjalankan tugas, sehingga menciptakan budaya kerja yang sehat dan kondusif untuk penerapan pengendalian internal. Namun, masih terdapat 1% responden yang menilai "Sangat Tidak Baik", kemungkinan karena pengalaman pribadi atau pengamatan atas pimpinan tertentu yang kurang menunjukkan keteladanan dalam pengelolaan keuangan, seperti adanya indikasi kompromi terhadap nilai integritas atau kurangnya konsistensi dalam menerapkan prinsip-prinsip etika. Sementara itu, untuk struktur organisasi dan pendelegasian wewenang, 49% responden menjawab "Sangat Baik" karena melihat bahwa instansi memiliki struktur hierarki dan alur kerja yang jelas, serta pendelegasian yang tepat, sehingga tidak ada kerancuan dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab. Akan tetapi, 3% responden menjawab "Sangat Tidak Baik", mungkin berasal dari unit kerja yang struktur organisasinya belum berjalan efektif atau terjadi tumpang tindih tanggung jawab yang menimbulkan konflik kewenangan dan menghambat efektivitas pengendalian internal.

Aspek penilaian risiko menunjukkan tingkat kepuasan yang tinggi terhadap proses identifikasi dan analisis risiko sebagai bagian integral dari sistem pengendalian internal. Sebanyak 49% responden menilai identifikasi risiko dalam pengelolaan keuangan dengan kategori "Sangat Baik" karena mereka menyadari

bahwa organisasi secara aktif melakukan identifikasi risiko melalui kegiatan seperti Focus Group Discussion (FGD), workshop, atau pemetaan risiko yang tertulis dan terdokumentasi dengan baik. Namun, 1% responden memberikan jawaban "Sangat Tidak Baik", mungkin karena tidak pernah terlibat atau mengetahui adanya proses identifikasi risiko secara eksplisit, atau merasa bahwa proses tersebut tidak melibatkan semua level organisasi. Untuk analisis risiko sebagai dasar penanganan, 50% responden menilai "Sangat Baik" karena mereka melihat analisis risiko benar-benar menjadi bagian dari penyusunan kebijakan atau perencanaan program keuangan daerah, tidak hanya sebagai formalitas tetapi sebagai dasar pengambilan keputusan yang rasional. Sebaliknya, 3% responden merasa proses analisis risiko belum dijadikan dasar keputusan yang substantif atau hanya bersifat formalitas tanpa implementasi nyata, sehingga memberikan penilaian "Sangat Tidak Baik" terhadap aspek ini.

Dimensi kegiatan pengendalian memperlihatkan hasil yang sangat memuaskan dengan tingkat kepercayaan yang tinggi terhadap kebijakan, prosedur, dan pemisahan fungsi yang diterapkan. Sebanyak 54% responden menjawab "Sangat Baik" untuk keberadaan kebijakan dan prosedur tertulis dalam pengendalian keuangan, karena mereka bekerja dalam sistem yang terdokumentasi dengan baik dan prosedurnya dijalankan secara konsisten oleh semua pihak yang terlibat. Namun, 1% responden menjawab "Sangat Tidak Baik", kemungkinan karena belum melihat atau menerima dokumen formal terkait kebijakan dan prosedur pengendalian, atau merasa bahwa prosedur yang ada tidak komunikatif dan sulit untuk dipahami serta diimplementasikan. Untuk pemisahan fungsi dalam

pengelolaan keuangan, 49% responden menilai "Sangat Baik" karena merasa adanya pemisahan fungsi yang memadai, seperti pemisahan antara fungsi pelaksana, pencatat, dan pemeriksa, telah menurunkan risiko penyalahgunaan dan meningkatkan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan. Meskipun demikian, 3% responden menjawab "Sangat Tidak Baik", diduga karena di unit kerja mereka terjadi rangkap fungsi yang rawan menimbulkan penyimpangan atau kurangnya checks and balances dalam sistem pengendalian internal.

Aspek informasi dan komunikasi menunjukkan tingkat efektivitas yang tinggi dalam penyampaian informasi dan sosialisasi tujuan pengendalian internal. Sebanyak 49% responden menilai penggunaan informasi yang berkualitas dengan kategori "Sangat Baik" karena informasi disampaikan secara sistematis, mudah diakses, dan mendukung proses pengendalian dengan data yang valid dan reliabel untuk pengambilan keputusan. Namun, 3% responden menilai "Sangat Tidak Baik" karena merasa informasi yang tersedia tidak selalu relevan atau mutakhir, atau kurang tersedia di level operasional sehingga menghambat efektivitas pengendalian. Sementara itu, untuk komunikasi tujuan dan tanggung jawab pengendalian internal, 50% responden menyatakan "Sangat Baik" karena informasi terkait pengendalian internal dikomunikasikan secara aktif melalui berbagai forum seperti rapat koordinasi, surat edaran, dan pelatihan internal yang terstruktur. Akan tetapi, 3% responden menjawab "Sangat Tidak Baik" karena merasa kurang dilibatkan atau tidak mendapatkan sosialisasi yang cukup terkait peran dan tanggung jawab pengendalian, sehingga pemahaman mereka terhadap sistem pengendalian internal masih terbatas.

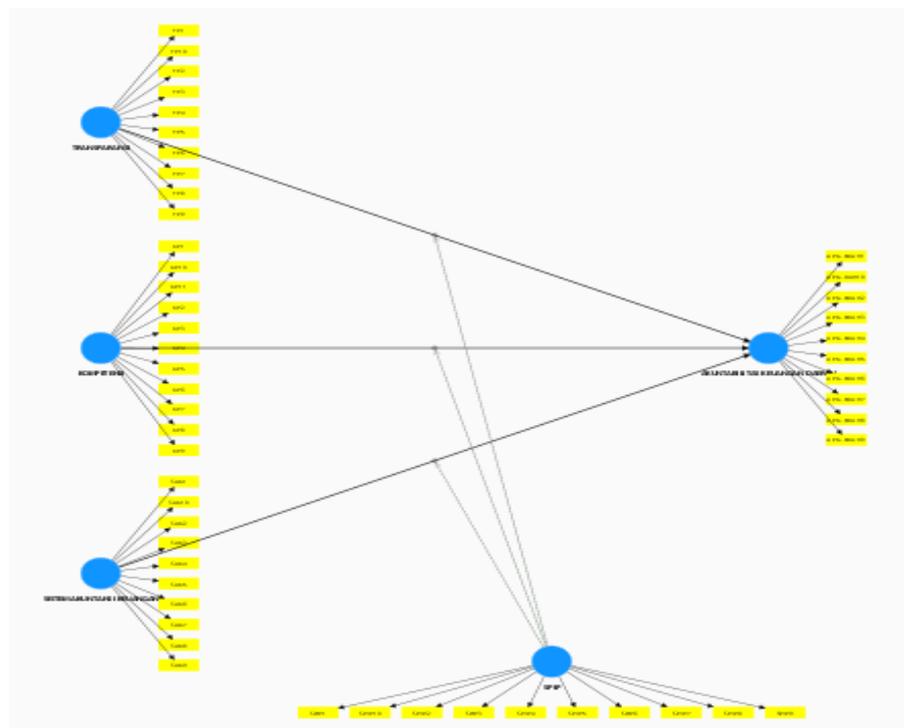
Komponen pemantauan pengendalian internal memperlihatkan hasil yang sangat positif dengan tingkat kepercayaan yang tinggi terhadap mekanisme evaluasi dan tindak lanjut perbaikan sistem. Sebanyak 49% responden merasa "Sangat Baik" terhadap evaluasi efektivitas pengendalian karena instansi mereka secara berkala melakukan audit internal, pengawasan rutin, dan evaluasi Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk menilai efektivitas pengendalian secara objektif dan berkelanjutan. Namun, 3% responden yang menjawab "Sangat Tidak Baik" kemungkinan belum merasakan adanya mekanisme monitoring yang aktif atau hanya melihat evaluasi dilakukan secara formalitas tanpa dampak perbaikan yang nyata. Untuk pelaporan kelemahan pengendalian dan tindakan perbaikan, 50% responden menilai "Sangat Baik" karena mereka menyaksikan bahwa setiap kelemahan sistem pengendalian, baik dari hasil audit maupun laporan staf, segera ditanggapi oleh pimpinan atau unit terkait untuk dilakukan perbaikan sistemik yang terukur dan berkelanjutan. Meskipun demikian, 3% responden meragukan apakah kelemahan pengendalian benar-benar ditindaklanjuti secara efektif atau hanya berhenti pada level pelaporan tanpa implementasi perbaikan yang substansial.

Secara keseluruhan, hasil survei sistem pengendalian internal keuangan daerah ini menggambarkan pencapaian yang sangat memuaskan dalam hal implementasi sistem pengendalian internal yang komprehensif dan efektif. Tingginya persentase responden yang memberikan penilaian positif pada semua komponen pengendalian internal menunjukkan bahwa upaya membangun sistem pengendalian internal yang kuat telah memberikan dampak yang dapat dirasakan

langsung oleh para stakeholder. Meskipun masih terdapat sebagian kecil responden yang memberikan penilaian negatif, hal ini dapat dijadikan sebagai masukan berharga untuk perbaikan berkelanjutan, terutama dalam aspek sosialisasi yang lebih menyeluruh, peningkatan keterlibatan semua level organisasi, dan penguatan mekanisme monitoring serta tindak lanjut. Keberhasilan ini menjadi fondasi yang kokoh untuk terus memperkuat sistem pengendalian internal dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap integritas dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

4.4 Hasil Analisis SEM

Analisis SEM dalam penelitian ini bermaksud untuk menjawab tujuan maupun hipotesis yang terdapat pada penelitian. Analisis dilakukan dengan menggunakan metode *Partial Least Square* (PLS) dengan bantuan *software SmartPLS 3.0*. PLS merupakan metode analisis *Structural Equation Model* (SEM) yang digunakan untuk mengatasi persoalan pada analisis multivariat dengan ukuran sampel relatif sedikit (30-100) dan tidak mengacu pada asumsi parametrik (Yamin & Kurniawan, 2009). Dalam prosesnya, analisis SEM-PLS diklasifikasikan menjadi dua tahapan evaluasi yaitu model pengukuran (*outer model*) dan model struktural (*inner model*). Adapun konstruk *path model* SEM/diagram jalur dalam penelitian disajikan dalam Gambar 4.1 berikut.



Gambar 4.6 Output SmartPLS

Gambar 4.6 di atas menunjukkan kerangka pemikiran atau diagram jalur yang menggambarkan hubungan antara variabel-variabel dalam penelitian ini. Terdapat dua jenis konstruk variabel dalam model, yaitu konstruk eksogen dan konstruk endogen. Konstruk eksogen terdiri dari tiga variabel laten, yaitu Transparansi (X1) yang diukur melalui 10 variabel manifest, Kompetensi (X2) yang diukur melalui 5 variabel manifest, dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (X3) yang diukur melalui 20 variabel manifest. Adapun konstruk endogen terdiri dari satu variabel laten, yaitu Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Y), yang diukur melalui 8 variabel manifest. Selain itu, model ini juga memasukkan variabel moderasi, yaitu Penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (Z), yang berperan dalam memperkuat atau memperlemah hubungan antara variabel-variabel eksogen (X1, X2, dan X3) terhadap variabel endogen (Y). Secara

keseluruhan, diagram jalur ini mencerminkan dua substruktur utama, yaitu pengaruh langsung antara variabel eksogen terhadap variabel endogen, serta pengaruh moderasi oleh variabel Z terhadap hubungan tersebut. Berdasarkan model ini, hipotesis penelitian terdiri dari dua bentuk, yaitu hipotesis pengaruh langsung dari masing-masing variabel eksogen terhadap variabel endogen, dan hipotesis pengaruh moderasi yang menunjukkan adanya pengaruh tidak langsung melalui keberadaan variabel moderasi.

4.4.1 Analisis Model Pengukuran (*Outer Model*)

Analisis model pengukuran dilakukan untuk menguji validitas dan reliabilitas instrumen dengan menspesifikasikan korelasi antara variabel laten dengan indikator penyusunnya (*variabel manifest/observed*). Evaluasi model pengukuran (*outer model*) dalam analisis SEM pada penelitian ini dilakukan dalam dua tahapan utama yaitu: 1) pengujian validitas instrumen, yang meliputi validitas konvergen (*convergent validity*) dan validitas diskriminan (*discriminant validity*), 2) pengujian reliabilitas instrumen, yang meliputi pengujian reliabilitas cronbach's alpha dan reliabilitas komposit (*composite reliability*). Berikut ini diuraikan kedua tahapan dalam analisis outer model penelitian ini.

4.4.1.1 Validitas Konvergen

Validitas konvergen bertujuan untuk membuktikan pernyataan-pernyataan dari setiap variabel laten dapat dipahami responden sebagaimana yang dimaksud oleh peneliti atau dengan kata lain bertujuan untuk mengetahui validitas setiap korelasi antara variabel manifest (indikator) dengan konstruk atau variabel latennya. Menurut Latan (2015), terdapat dua ketentuan umum

dalam penilaian validitas konvergen pada indikator reflektif yaitu pertama mengacu pada nilai loading factor $> 0,7$ untuk penelitian konfirmatori dan kedua mengacu pada nilai Average Variance Extracted (AVE) $> 0,5$ (Hair et al., 2017).

1) *Loading Factor*

Cross Loading merupakan nilai atau angka yang menunjukkan hubungan antara skor suatu item pertanyaan dengan skor indikator yang mengukur suatu konstruk/laten. Hasil *cross loading* dalam model penelitian ini dapat dilihat melalui model PLS pada tabel berikut.

Tabel 4.8. Nilai *Loading Factor*

Variabel	Indikator	<i>Outer Loading</i>	<i>Rule of Thumb</i>	Kriteria
Transparansi (X1)	TP1	0,880	0,700	Memenuhi <i>Convergent Validity</i>
	TP2	0,733	0,700	Memenuhi <i>Convergent Validity</i>
	TP3	0,796	0,700	Memenuhi <i>Convergent Validity</i>
	TP4	0,883	0,700	Memenuhi <i>Convergent Validity</i>
	TP5	0,787	0,700	Memenuhi <i>Convergent Validity</i>
	TP6	0,775	0,700	Memenuhi <i>Convergent Validity</i>
	TP7	0,798	0,700	Memenuhi <i>Convergent Validity</i>
	TP8	0,817	0,700	Memenuhi <i>Convergent Validity</i>
	TP9	0,747	0,700	Memenuhi <i>Convergent Validity</i>
	TP10	0,816	0,700	Memenuhi <i>Convergent Validity</i>
Kompetensi (X2)	KP1	0,880	0,700	Memenuhi <i>Convergent Validity</i>
	KP2	0,733	0,700	Memenuhi <i>Convergent Validity</i>
	KP3	0,796	0,700	Memenuhi <i>Convergent Validity</i>
	KP4	0,883	0,700	Memenuhi <i>Convergent Validity</i>
	KP5	0,787	0,700	Memenuhi <i>Convergent Validity</i>
	KP6	0,880	0,700	Memenuhi <i>Convergent Validity</i>
	KP7	0,733	0,700	Memenuhi <i>Convergent Validity</i>
	KP8	0,796	0,700	Memenuhi <i>Convergent Validity</i>
	KP9	0,883	0,700	Memenuhi <i>Convergent Validity</i>
	KP10	0,787	0,700	Memenuhi <i>Convergent Validity</i>
Sistem Akuntansi Keuangan (X3)	SAK1	0,708	0,700	Memenuhi <i>Convergent Validity</i>
	SAK2	0,856	0,700	Memenuhi <i>Convergent Validity</i>
	SAK3	0,715	0,700	Memenuhi <i>Convergent Validity</i>
	SAK4	0,741	0,700	Memenuhi <i>Convergent Validity</i>
	SAK5	0,798	0,700	Memenuhi <i>Convergent Validity</i>

	SAK6	0,744	0,700	Memenuhi <i>Convergent Validity</i>
	SAK7	0,798	0,700	Memenuhi <i>Convergent Validity</i>
	SAK8	0,817	0,700	Memenuhi <i>Convergent Validity</i>
	SAK9	0,747	0,700	Memenuhi <i>Convergent Validity</i>
	SAK10	0,816	0,700	Memenuhi <i>Convergent Validity</i>
SPIP (Z)	SPIP1	0,825	0,700	Memenuhi <i>Convergent Validity</i>
	SPIP2	0,782	0,700	Memenuhi <i>Convergent Validity</i>
	SPIP3	0,810	0,700	Memenuhi <i>Convergent Validity</i>
	SPIP4	0,765	0,700	Memenuhi <i>Convergent Validity</i>
	SPIP5	0,867	0,700	Memenuhi <i>Convergent Validity</i>
	SPIP6	0,780	0,700	Memenuhi <i>Convergent Validity</i>
	SPIP7	0,882	0,700	Memenuhi <i>Convergent Validity</i>
	SPIP8	0,793	0,700	Memenuhi <i>Convergent Validity</i>
	SPIP9	0,856	0,700	Memenuhi <i>Convergent Validity</i>
	SPIP10	0,715	0,700	Memenuhi <i>Convergent Validity</i>
Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Z)	APK1	0,825	0,700	Memenuhi <i>Convergent Validity</i>
	APK2	0,782	0,700	Memenuhi <i>Convergent Validity</i>
	APK3	0,810	0,700	Memenuhi <i>Convergent Validity</i>
	APK4	0,765	0,700	Memenuhi <i>Convergent Validity</i>
	APK5	0,867	0,700	Memenuhi <i>Convergent Validity</i>
	APK6	0,780	0,700	Memenuhi <i>Convergent Validity</i>
	APK8	0,882	0,700	Memenuhi <i>Convergent Validity</i>
	APK8	0,793	0,700	Memenuhi <i>Convergent Validity</i>
	APK9	0,882	0,700	Memenuhi <i>Convergent Validity</i>
	APK10	0,793	0,700	Memenuhi <i>Convergent Validity</i>

2) *Cross Loading*

Cross loading adalah ukuran untuk memverifikasi konvergensi validitas dari indikator dalam suatu konstruk. Secara lebih spesifik, ini menggambarkan sejauh mana setiap indikator terkait dengan konstruk yang seharusnya diukur, dibandingkan dengan konstruk lainnya. Menurut Chin (1998), nilai *cross loading* seharusnya lebih tinggi untuk konstruk yang relevan dibandingkan dengan konstruk lainnya. Artinya, sebuah indikator harus memiliki nilai *loading* yang lebih besar pada konstruk yang dimaksud dibandingkan dengan konstruk lainnya dalam model. Jika indikator memiliki nilai *cross loading* yang lebih tinggi pada konstruk lain daripada pada konstruk yang seharusnya diukur,

maka indikator tersebut mungkin tidak valid untuk konstruk yang dimaksud dan perlu dipertimbangkan untuk dikeluarkan dari model.

Tabel 4.9 Nilai *Cross Loading*

	TP	KP	SAK	AKT	SPIP
X1.1	0.964	0.734	0.729	0.737	0.635
X1.2	0.825	0.675	0.678	0.671	0.659
X1.3	0.901	0.715	0.718	0.721	0.747
X1.4	0.845	0.742	0.737	0.742	0.703
X1.5	0.945	0.782	0.779	0.775	0.649
X1.6	0.965	0.632	0.635	0.628	0.731
X1.7	0.947	0.654	0.659	0.662	0.652
X1.8	0.839	0.751	0.747	0.752	0.747
X1.9	0.898	0.699	0.703	0.697	0.725
X1.10	0.802	0.652	0.649	0.646	0.715
X2.1	0.737	0.962	0.731	0.724	0.742
X2.2	0.673	0.818	0.652	0.682	0.782
X2.3	0.723	0.905	0.747	0.775	0.632
X2.4	0.745	0.845	0.725	0.741	0.654
X2.5	0.778	0.952	0.777	0.752	0.725
X2.6	0.631	0.967	0.687	0.617	0.777
X2.7	0.661	0.943	0.647	0.658	0.687
X2.8	0.754	0.835	0.652	0.727	0.647
X2.9	0.699	0.892	0.717	0.673	0.652
X2.10	0.644	0.806	0.648	0.654	0.628
X3.1	0.715	0.747	0.934	0.712	0.717
X3.2	0.719	0.702	0.973	0.722	0.725
X3.3	0.726	0.712	0.984	0.723	0.728
X3.4	0.647	0.672	0.863	0.654	0.645
X3.5	0.632	0.647	0.849	0.634	0.629
X3.6	0.651	0.614	0.799	0.648	0.641
X3.7	0.694	0.671	0.857	0.691	0.688
X3.8	0.705	0.717	0.796	0.708	0.712
X3.9	0.719	0.787	0.927	0.722	0.728
X3.10	0.735	0.741	0.918	0.731	0.738
Y.1	0.72	0.775	0.727	0.931	0.737
Y.2	0.674	0.625	0.682	0.878	0.673

Y.3	0.752	0.736	0.747	0.921	0.723
Y.4	0.731	0.691	0.741	0.879	0.745
Y.5	0.752	0.713	0.781	0.924	0.778
Y.6	0.691	0.712	0.638	0.934	0.631
Y.7	0.654	0.663	0.679	0.925	0.661
Y.8	0.657	0.742	0.754	0.917	0.754
Y.9	0.707	0.725	0.68	0.921	0.699
Y.10	0.652	0.689	0.651	0.881	0.644
Z.1	0.719	0.715	0.736	0.732	0.925
Z.2	0.727	0.719	0.775	0.72	0.964
Z.3	0.729	0.726	0.707	0.727	0.952
Z.4	0.647	0.647	0.679	0.689	0.927
Z.5	0.631	0.632	0.653	0.697	0.889
Z.6	0.645	0.651	0.607	0.623	0.932
Z.7	0.694	0.694	0.692	0.687	0.971
Z.8	0.705	0.705	0.723	0.739	0.892
Z.9	0.719	0.719	0.792	0.727	0.917
Z.10	0.735	0.735	0.737	0.717	0.907

3) *Average Variance Extracted (AVE)*

Pengujian nilai AVE dimaksudkan untuk memperkuat validitas konvergen dalam model yang dikonstruksi atau alternatif dalam pengujian validitas konvergen. Model dapat dikatakan telah valid secara konvergen apabila nilai AVE > 0,5 (Kock & Lyns, 2012). Nilai AVE pada model penelitian ini berdasarkan pengolahan melalui PLS dirangkum dalam Tabel 4.7 berikut.

Tabel 4.10. Nilai AVE

Variabel Laten	AVE	Kriteria
SPIP (Z)	0,581	Memenuhi <i>Convergent Validity</i>
Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Y)	0,662	Memenuhi <i>Convergent Validity</i>
Transparansi (X1)	0,647	Memenuhi <i>Convergent Validity</i>

Kompetensi (X2)	0,609	Memenuhi <i>Convergent Validity</i>
Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (X3)	0,631	Memenuhi <i>Convergent Validity</i>

Tabel 4.7 di atas menunjukkan nilai *Average Variance Extracted* (AVE) dari masing-masing variabel laten $> 0,50$. Sehingga dapat disimpulkan jika data pada model yang dikonstruksi tidak memiliki permasalahan validitas secara konvergen.

4) Uji Reabilitas (*Cronbach Alpha* dan *Composite Reliability*)

Cronbach's Alpha adalah ukuran reliabilitas yang sering digunakan untuk menilai konsistensi internal item-item yang digunakan untuk mengukur suatu konstruk. Nilai *Cronbach's Alpha* menunjukkan sejauh mana item dalam suatu konstruk saling berkorelasi satu sama lain, dengan rentang nilai 0,7 atau lebih dianggap sebagai reliabilitas yang baik. Nilai antara 0,6 hingga 0,7 masih dapat diterima, namun nilai di bawah 0,6 menunjukkan bahwa instrumen tidak reliabel. Nunnally (1978) menyarankan nilai *Cronbach's Alpha* lebih besar dari 0,7 untuk menunjukkan reliabilitas yang dapat diterima, sementara Tavakol & Dennick (2011) mencatat bahwa alpha yang sangat tinggi (lebih dari 0,9) bisa mengindikasikan redundansi item yang berlebihan. Di sisi lain, *Composite Reliability* (CR) adalah ukuran reliabilitas yang lebih unggul dibandingkan *Cronbach's Alpha* karena tidak terpengaruh oleh jumlah item dalam suatu konstruk. CR mengukur sejauh mana indikator dalam konstruk dapat merepresentasikan konstruk tersebut, dengan perhitungan yang didasarkan pada beban faktor (*factor loading*) setiap indikator. Nilai CR yang lebih besar dari 0,7 dianggap baik, dan nilai lebih dari 0,8 dianggap sangat baik, sedangkan nilai di

bawah 0,6 mengindikasikan masalah reliabilitas. Hair et al. (2010) merekomendasikan penggunaan CR karena CR lebih tepat dalam model berbasis PLS, karena memperhitungkan kontribusi setiap indikator terhadap konstruk. Gefen, Straub, & Boudreau (2000) juga mendukung penggunaan CR dalam penelitian berbasis PLS karena CR mengakomodasi variasi beban faktor dan lebih sesuai dengan karakteristik model-model PLS.

Tabel 4.11 Uji Reabilitas

Variabel	<i>Croanbach Alpha</i>	<i>Composite Reability</i>
Transparansi (X1)	0.874	0.816
Kompetensi (X2)	0.832	0.853
Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (X3)	0.789	0.791
SPIP (Z)	0.892	0.882
Akunabilitas (Y)	0.725	0.734

Tabel di atas menunjukkan hasil uji reliabilitas untuk lima variabel, yaitu Transparansi (X1), Kompetensi (X2), Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (X3), SPIP (Z), dan Akunabilitas (Y), yang diukur dengan menggunakan dua ukuran reliabilitas, yaitu Cronbach's Alpha dan Composite Reliability. Untuk variabel Transparansi (X1), nilai Cronbach's Alpha adalah 0,874, yang menunjukkan tingkat konsistensi internal yang sangat baik, karena lebih besar dari 0,7. Nilai Composite Reliability untuk variabel ini adalah 0,816, yang juga menunjukkan konsistensi internal yang baik, dengan nilai di atas 0,7. Begitu pula untuk Kompetensi (X2), dengan nilai Cronbach's Alpha 0,832 dan Composite Reliability 0,853, keduanya menunjukkan reliabilitas yang sangat baik. Pada variabel Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (X3), nilai Cronbach's Alpha adalah

0,789, yang masih menunjukkan reliabilitas yang cukup baik meskipun sedikit lebih rendah dibandingkan dua variabel sebelumnya, sedangkan nilai Composite Reliability sebesar 0,791 menunjukkan konsistensi internal yang cukup memadai. Untuk SPIP (Z), kedua ukuran reliabilitas menunjukkan hasil yang sangat baik, dengan Cronbach's Alpha sebesar 0,892 dan Composite Reliability 0,882, keduanya jauh di atas ambang batas yang disarankan. Terakhir, variabel Akunabilitas (Y) memiliki nilai Cronbach's Alpha sebesar 0,725, yang masih diterima untuk reliabilitas, meskipun sedikit lebih rendah dibandingkan variabel lainnya. Nilai Composite Reliability untuk Akunabilitas (Y) adalah 0,734, yang menunjukkan reliabilitas yang dapat diterima.

4.4.2 Analisis Model Struktural (*Inner Model*)

Setelah dilakukan analisis model pengukuran untuk mengevaluasi validitas dan reliabilitas suatu indikator terhadap konstruk/laten yang telah dibangun maka selanjutnya adalah analisis model struktural (*inner model*). Struktural model bertujuan untuk menggambarkan hubungan kausalitas antar variabel laten yang telah di konstruk berdasarkan sbtansi teori guna menjawab hipotesis dalam penelitian (Abdillah & Hartono, 2015). Analisis model struktural penelitian ini meliputi beberapa pengujian diantaranya: 1) Model fit, 2) *R-Square*, 3) *Path Coefficient*, 4) *P-Values*, 5) *Prediktif Relevan*, 6) *Effect Size*, dan 7) *GoF*.

1) Model Fit

Model fit berguna untuk melihat kecocokan antara korelasi yang diamati dalam model analisis yang telah dikonstruksi. Menurut Haryono (2016), untuk mengetahui model fit atau tidaknya pada hasil olah data PLS dapat dilihat dari

nilai *loading factor* pada setiap indikator. Dengan demikian atas dasar hasil yang diperoleh, maka dapat disimpulkan bahwa model analisis SEM yang dikonstruksi dalam penelitian ini telah cocok atau fit karena telah memenuhi asumsi validitas dan reliabilitas.

2) Koefisien Determinasi (*R-Square*)

R-Square atau koefisien determinasi berfungsi untuk mengukur kriteria kualitas model dan memprediksi hubungan antar variabel atau konstruk laten dengan mengacu pada koefisien determinasi (r^2) antara 0 dan 1 yang menunjukkan besarnya pengaruh variabel laten atau konstruk eksogen terhadap variabel laten atau konstruk endogen (Chin, 1998). Nilai *R-Square* pada model penelitian ini dirangkum dalam Tabel 4.12.

Tabel 4.12 Koefisien Determinasi

Variabel	<i>R Square</i>	<i>R Square Adjusted</i>	Kategori
SPIP (Z)	0,820	0,815	Kuat
Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Y)	0,921	0,918	Kuat

Tabel 4.11 di atas menunjukkan nilai *R-Square Adjusted* atau nilai *R-Square* yang telah dikoreksi berdasarkan standar error untuk menilai kemampuan konstruk eksogen dalam menjelaskan konstruk endogen. Hasil pada tabel tersebut menunjukkan bahwa pada substruktur pertama dalam diagram jalur (pengaruh variabel Transparansi (X1), Kompetensi (X2), dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (X3) terhadap Penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (Z)) memiliki nilai *R-Square Adjusted* sebesar 0,815. Artinya, perubahan yang terjadi pada variabel Penerapan Sistem Pengendalian Internal

Pemerintah (Z) dapat dijelaskan secara simultan oleh variabel Transparansi, Kompetensi, dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah sebesar 81,5%, yang termasuk dalam kategori kuat, sedangkan sisanya sebesar 18,5% dijelaskan oleh variabel lain di luar model penelitian ini.

Selanjutnya, pada substruktur kedua dalam diagram jalur (pengaruh variabel Transparansi (X1), Kompetensi (X2), Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (X3), dan Penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (Z) terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Y)) menunjukkan nilai *R-Square Adjusted* sebesar 0,918. Hal ini berarti bahwa variabel Transparansi, Kompetensi, Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, serta Penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah secara simultan mampu menjelaskan perubahan pada variabel Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Y) sebesar 91,8%, juga dalam kategori kuat, sementara sisanya sebesar 8,2% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini.

3) Uji Signifikasi

Uji signifikansi dilakukan untuk menjawab hipotesis penelitian dan mengetahui pengaruh parsial secara langsung antara variabel laten eksogen terhadap variabel laten endogen dan mengetahui pengaruh parsial secara tidak langsung antara variabel laten melalui variabel intervening (Hamidi & Anwar, 2019). Uji signifikansi pada analisis PLS dilakukan dengan metode kalkulasi bootstrapping terhadap diagram jalur yang telah dikonstruksi guna meminimalisir adanya permasalahan terhadap kenormalan data penelitian. Hasil bootstrapping diagram jalur penelitian dipaparkan dalam tabel.

Tabel 4.13. Uji Signifikansi Pengaruh Langsung

Model Pengaruh Langsung	<i>Original Sample (O)</i>	<i>Sample Mean (M)</i>	<i>Standard Deviation (STDEV)</i>	<i>T Statistics (O/STDEV)</i>	<i>P Values</i>
Transparansi (X1) → Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan (Y)	0,589	0,589	0,095	6,198	0,000
Kompetensi (X2) → Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan (Y)	0,472	0,478	0,148	3,189	0,002
Sistem Akuntansi Keuangan (X3) → Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan (Y)	0,202	0,212	0,094	2,154	0,032

Pertama, pengaruh variabel Transparansi (X1) terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Y) menunjukkan nilai koefisien regresi (original sample) sebesar 0,589 dengan arah hubungan positif. Nilai P-Values sebesar $0,000 < \text{taraf signifikansi } 0,05$ serta nilai t-statistik sebesar $6,198 > t\text{-tabel } 1,993$. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa H_a diterima dan H_0 ditolak, yang berarti variabel Transparansi berpengaruh signifikan dengan arah positif terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan satu satuan dalam tingkat transparansi dapat meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah sebesar 0,589 atau 58,9%, dengan asumsi variabel lainnya tetap konstan.

Kedua, pengaruh variabel Kompetensi (X2) terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Y) menunjukkan nilai koefisien regresi sebesar 0,472 dengan arah hubungan yang positif. Nilai P-Values sebesar $0,002 < 0,05$ serta nilai t-statistik sebesar $3,189 > t\text{-tabel } 1,993$, sehingga H_a diterima dan H_0

ditolak. Artinya, variabel Kompetensi berpengaruh signifikan dengan arah positif terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah. Dengan demikian, setiap peningkatan satu satuan kompetensi aparatur pemerintah daerah diperkirakan mampu meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah sebesar 0,472 atau 47,2%.

Ketiga, variabel Sistem Akuntansi Keuangan (X3) juga berpengaruh signifikan dengan arah positif terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah, dengan nilai koefisien regresi sebesar 0,202, nilai P-Values $0,032 < 0,05$, dan nilai t-statistik $2,154 > t\text{-tabel } 1,993$. Berdasarkan hasil ini, dapat disimpulkan bahwa H_a diterima dan H_0 ditolak, yang berarti peningkatan efektivitas sistem akuntansi keuangan akan meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Secara kuantitatif, setiap kenaikan satu satuan dalam sistem akuntansi keuangan dapat meningkatkan akuntabilitas sebesar 0,202 atau 20,2%.

Selanjutnya, hasil uji signifikansi terhadap hipotesis pengaruh moderasi dirangkum dalam Tabel 4.14 berikut.

Tabel 4.14. Uji Signifikansi Pengaruh Moderasi

Model Pengaruh Moderasi	<i>Original Sample (O)</i>	<i>Sample Mean (M)</i>	<i>Standard Deviation (STDEV)</i>	<i>T Statistics (O/STDEV)</i>	<i>P Values</i>
SPIP (Z) x Transparansi (X1) → Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Y)	0,094	0,091	0,051	1,827	0,038
SPIP (Z) x Kompetensi (X2) → Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Y)	0,096	0,091	0,045	2,138	0,033
SPIP (Z) x Sistem Akuntansi Keuangan (X1) → Akuntabilitas	0,097	0,091	0,045	2,487	0,041

Pengelolaan Keuangan Daerah (Y)					
---------------------------------	--	--	--	--	--

Tabel 4.15 menunjukkan hasil uji signifikansi pengaruh moderasi dari variabel-variabel laten eksogen terhadap variabel laten endogen melalui Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) sebagai variabel moderasi dalam model penelitian ini. Pertama, pengaruh Transparansi (X1) terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Y) dengan dimoderasi SPIP (Z) menunjukkan nilai koefisien regresi (original sample) sebesar 0,094 dengan arah hubungan yang positif. Namun, nilai P-Values sebesar $0,038 >$ taraf signifikansi 0,05 dan t-statistik sebesar $1,827 <$ t-tabel 1,993. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa H_0 diterima dan H_a ditolak, yang berarti variabel SPIP mampu memperkuat hubungan antara variabel Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah.

Kedua, pengaruh Kompetensi (X2) terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Y) dimoderasi dengan variabel SPIP (Z) menunjukkan nilai koefisien regresi sebesar 0,096, dengan nilai P-Values $0,033 <$ 0,05 serta nilai t-statistik sebesar $2,138 >$ t-tabel 1,993. Hal ini menunjukkan bahwa H_a diterima dan H_0 ditolak, yang berarti SPIP mampu memperkuat hubungan antara Kompetensi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah. Artinya, SPIP mampu memperkuat pengaruh Kompetensi terhadap akuntabilitas, dan besarnya pengaruh tidak langsung yang dimediasi oleh SPIP adalah sebesar 0,096 atau 9,6%.

Ketiga, pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan (X3) terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Y) dengan dimoderasi SPIP (Z) juga menunjukkan hasil yang signifikan, dengan nilai koefisien regresi sebesar 0,097, nilai P-Values $0,041 < 0,05$, serta t-statistik $2,487 > t\text{-tabel } 1,993$. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa H_a diterima dan H_0 ditolak, yang berarti SPIP mampu memperkuat hubungan antara Sistem Akuntansi Keuangan dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah.

Berdasarkan analisis hasil uji signifikansi pengaruh moderasi pada Tabel 4.15, dapat diidentifikasi kekuatan pengaruh moderasi SPIP terhadap masing-masing variabel independen. Dari ketiga variabel yang dimoderasi oleh SPIP, Sistem Akuntansi Keuangan (X3) menunjukkan pengaruh moderasi yang paling kuat dengan nilai koefisien original sample sebesar 0,097 dan t-statistik tertinggi yaitu 2,487. Hal ini menunjukkan bahwa SPIP paling efektif dalam memperkuat hubungan antara Sistem Akuntansi Keuangan dengan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah. Posisi kedua ditempati oleh Kompetensi (X2) dengan koefisien 0,096 dan t-statistik 2,138, sedangkan Transparansi (X1) menunjukkan pengaruh moderasi yang paling lemah dengan koefisien 0,094 dan t-statistik 1,827.

Analisis lebih lanjut mengenai kekuatan pengaruh SPIP melalui variabel independen terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah menunjukkan bahwa jalur SPIP melalui Sistem Akuntansi Keuangan (X3) terhadap Akuntabilitas (Y) memiliki pengaruh yang paling kuat. Dengan nilai t-statistik tertinggi (2,487) dan signifikansi yang baik (p-value $0,041 < 0,05$), jalur ini

menunjukkan bahwa implementasi SPIP yang baik akan sangat efektif ketika didukung oleh sistem akuntansi keuangan yang memadai. Jalur kedua terkuat adalah SPIP melalui Kompetensi dengan t-statistik 2,138, yang menunjukkan bahwa peningkatan kompetensi SDM yang dimoderasi oleh SPIP juga memberikan kontribusi signifikan terhadap akuntabilitas. Sementara itu, jalur SPIP melalui Transparansi menunjukkan pengaruh yang relatif lebih lemah dengan t-statistik 1,827, meskipun masih dalam batas signifikan. Temuan ini mengindikasikan bahwa dalam konteks pengelolaan keuangan daerah, aspek teknis seperti sistem akuntansi yang didukung oleh pengendalian internal yang baik memberikan dampak yang lebih substansial dibandingkan aspek transparansi semata.

Selanjutnya perbandingan pengaruh langsung dan tidak langsung pada model struktural penelitian ini dipaparkan dalam Tabel 4.15 berikut.

Tabel 4.15. Rangkuman Hasil Uji Hipotesis

Hipotesis		Keputusan	Jenis Mediasi
H1	Transparansi berpengaruh positif secara signifikan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Diterima	-
H2	Kompetensi berpengaruh positif secara signifikan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Diterima	-
H3	Sistem Akuntansi Keuangan berpengaruh positif secara signifikan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Diterima	-
H4	Transparansi berpengaruh positif secara signifikan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah dengan dimoderari variabel SPIP	Diterima	Moderasi

Hipotesis		Keputusan	Jenis Mediasi
H5	Kompetensi berpengaruh positif secara signifikan terhadap terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah dengan dimoderari variabel SPIP	Diterima	Moderasi
H6	Sistem Akuntansi Keuangan berpengaruh positif tidak signifikan terhadap terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah dengan dimoderari variabel SPIP	Diterima	Moderasi

Tabel 4.16 merupakan rangkuman hasil pengujian seluruh hipotesis dalam penelitian ini, baik pengaruh secara langsung maupun secara moderasi dengan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) sebagai variabel moderasi. Berdasarkan hasil pengujian, seluruh hipotesis utama (H1 sampai H6) diterima, yang berarti secara statistik terdapat pengaruh langsung yang signifikan antara Transparansi, Kompetensi, dan Sistem Akuntansi Keuangan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah. Hipotesis H1, H2, dan H3 menunjukkan bahwa masing-masing variabel Transparansi (X1), Kompetensi (X2), dan Sistem Akuntansi Keuangan (X3) memiliki pengaruh positif dan signifikan secara langsung terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Y), tanpa melalui variabel moderasi. Hipotesis H4 dan H5 juga menunjukkan bahwa Transparansi dan Kompetensi, ketika dimoderasi oleh SPIP, tetap memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah, yang mengindikasikan bahwa SPIP memperkuat hubungan antara kedua variabel tersebut terhadap akuntabilitas.

4.5 Pembahasan

4.5.1 Transparansi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah

Hasil pengujian regresi struktural terhadap hipotesis pertama (H1) menunjukkan bahwa Transparansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah. Hal ini ditunjukkan dari nilai signifikansi (p-value) sebesar $0,000 < 0,05$, dan nilai koefisien jalur (original sample) sebesar 0,589, yang mengindikasikan arah hubungan yang positif. Artinya, besarnya pengaruh transparansi terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah adalah sebesar 58,9%. Semakin tinggi tingkat transparansi yang diterapkan dalam pengelolaan keuangan, maka semakin tinggi pula tingkat akuntabilitas yang dapat diwujudkan. Sebaliknya, jika transparansi menurun, maka akuntabilitas pun akan turut menurun.

Berdasarkan survei terhadap responden penelitian, mayoritas masyarakat menilai akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah berada pada kategori “Baik” dan “Sangat Baik”, dengan persentase gabungan yang melampaui 80% pada semua aspek penilaian. Secara spesifik, penilaian “Sangat Baik” tertinggi diberikan pada indikator kejelasan tujuan program (54%), efisiensi dan efektivitas pelaksanaan (50%), serta kesesuaian kebijakan dengan visi daerah (51%). Capaian ini mencerminkan adanya kepercayaan publik terhadap integritas aparatur, ketertiban dokumentasi, kepatuhan terhadap prosedur operasional standar (SOP), serta mekanisme pertanggungjawaban yang telah berjalan. Penilaian negatif hanya berkisar 1–3%, umumnya terkait persepsi pemborosan anggaran, formalitas dalam pelaksanaan program, atau kebijakan yang dinilai kurang mengakomodasi aspirasi

masyarakat. Secara keseluruhan, hasil ini menunjukkan bahwa penerapan prinsip transparansi telah memberikan dampak positif terhadap kualitas akuntabilitas keuangan daerah.

Secara teoritis, temuan penelitian ini selaras dengan kerangka pikir agency theory (teori agensi), yang menjelaskan adanya potensi kesenjangan kepentingan dan informasi (information asymmetry) antara agen (pemerintah daerah sebagai pihak pelaksana proyek) dan prinsipal (masyarakat sebagai pihak yang memberi mandat melalui sistem demokrasi dan pajak). Dalam konteks ini, pemerintah daerah bertindak sebagai pengelola sumber daya publik, sedangkan masyarakat memiliki hak untuk mengetahui dan mengawasi jalannya pengelolaan tersebut. Kesenjangan informasi muncul ketika pemerintah daerah memiliki akses penuh terhadap detail proyek, anggaran, dan pelaksanaannya, sementara masyarakat hanya menerima informasi terbatas dalam bentuk laporan formal. Kondisi ini membuka peluang terjadinya moral hazard, yakni tindakan penyimpangan yang dilakukan oleh agen karena lemahnya pengawasan dari prinsipal. Oleh sebab itu, transparansi berperan sebagai mekanisme kunci untuk mengurangi kesenjangan tersebut. Transparansi yang efektif bukan sekadar menyediakan laporan keuangan, tetapi harus memastikan bahwa informasi yang disajikan lengkap, akurat, relevan, tepat waktu, dan mudah diakses oleh seluruh pemangku kepentingan. Dengan begitu, masyarakat, DPRD, media, dan lembaga pengawas eksternal (seperti BPK dan Inspektorat) dapat menjalankan fungsi kontrol secara optimal..

Meski demikian, transparansi yang bersifat administratif semata misalnya hanya dengan mempublikasikan laporan keuangan di situs web resmi pemerintah

tidaklah cukup. Transparansi yang efektif memerlukan dua komponen kunci: pertama, informasi yang disampaikan harus dapat dipahami oleh publik (*comprehensible*), bukan sekadar tersedia; kedua, masyarakat harus dilibatkan secara aktif dalam proses pengawasan. Untuk itu, dibutuhkan literasi publik yang memadai agar warga mampu menginterpretasikan data dan indikator keuangan, disertai pengembangan sistem informasi yang ramah pengguna (*user-friendly*) dan mudah diakses. Selain itu, budaya birokrasi yang terbuka terhadap kritik dan responsif terhadap masukan publik menjadi prasyarat penting agar transparansi dapat berfungsi sebagai instrumen strategis dalam membangun akuntabilitas yang berkelanjutan, bukan sekadar memenuhi kewajiban formal.

Penelitian ini secara empiris membuktikan bahwa transparansi memiliki pengaruh signifikan terhadap akuntabilitas, dengan kontribusi sebesar 58,9%. Angka ini menunjukkan bahwa lebih dari setengah variasi tingkat akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah dapat dijelaskan oleh tingkat transparansi yang diterapkan pemerintah daerah. Secara statistik, temuan ini mengindikasikan hubungan yang kuat antara keterbukaan informasi publik dan keberhasilan mekanisme pertanggungjawaban, sehingga memperkuat argumen bahwa transparansi bukan hanya sekadar prinsip normatif, melainkan faktor determinan yang nyata dalam meningkatkan kualitas tata kelola keuangan daerah. Hasil penelitian ini menegaskan bahwa praktik transparansi yang konsisten mampu mempersempit ruang terjadinya inefisiensi, penyimpangan, maupun moral hazard dalam pengelolaan keuangan publik. Transparansi memungkinkan publik, lembaga pengawas, dan DPRD untuk memiliki akses yang memadai terhadap

informasi terkait perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi penggunaan anggaran. Dengan demikian, pemerintah daerah terdorong untuk lebih berhati-hati dalam mengalokasikan sumber daya, karena setiap kebijakan dan realisasi anggaran dapat dipantau serta dievaluasi secara terbuka.

Hasil penelitian ini secara langsung menjawab permasalahan utama yang telah diidentifikasi sebelumnya, yaitu masih lemahnya tingkat transparansi dalam pelaksanaan proyek pembangunan daerah. Meskipun hasil pengukuran menunjukkan bahwa sebagian besar indikator transparansi memperoleh skor yang relatif tinggi—termasuk pada aspek keterbukaan dalam perencanaan anggaran, publikasi laporan keuangan, serta akses masyarakat terhadap dokumen resmi, namun temuan penelitian juga memperlihatkan adanya kelemahan mendasar yang tidak dapat diabaikan. Kelemahan tersebut terletak pada ketidakseimbangan antara transparansi administratif dan transparansi substantif. Transparansi yang ada selama ini lebih banyak diwujudkan dalam bentuk penyampaian laporan keuangan secara formal, baik melalui dokumen cetak maupun publikasi daring. Akan tetapi, hal tersebut belum sepenuhnya mencerminkan keterbukaan yang nyata dalam tahap implementasi proyek di lapangan. Dengan kata lain, masyarakat memang menerima laporan, tetapi belum memperoleh akses penuh untuk mengetahui sejauh mana proyek benar-benar dikerjakan sesuai rencana, baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Fakta ini diperkuat oleh temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait adanya kekurangan volume pekerjaan pada Proyek Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Pagar di Kawasan Wisata Hutan Kota Langsa dengan nilai mencapai Rp102.721.096,34. Temuan tersebut menegaskan bahwa laporan

administratif yang terlihat “baik” ternyata tidak sepenuhnya mencerminkan kondisi riil di lapangan. Hal ini menunjukkan bahwa praktik transparansi masih bersifat formalistis, belum substantif, sehingga fungsi kontrol publik belum berjalan optimal.

Dari perspektif teori tata kelola pemerintahan (*good governance*), transparansi tidak hanya menuntut keterbukaan informasi dalam bentuk dokumen, tetapi juga keterbukaan proses yang memungkinkan partisipasi masyarakat, media, maupun lembaga pengawas independen untuk memastikan proyek benar-benar sesuai dengan perencanaan. Dengan demikian, penelitian ini menegaskan perlunya reorientasi praktik transparansi: dari sekadar pemenuhan kewajiban administratif menuju transparansi yang substantif, partisipatif, dan akuntabel. Temuan tersebut menegaskan bahwa informasi mengenai capaian fisik proyek tidak sepenuhnya dilaporkan secara terbuka dan akurat. Artinya, publik maupun pemangku kepentingan tidak memperoleh gambaran yang benar mengenai sejauh mana realisasi pekerjaan telah sesuai dengan rencana anggaran. Kondisi ini tidak hanya menurunkan kualitas transparansi, tetapi juga melemahkan akuntabilitas pemerintah daerah dalam mempertanggungjawabkan penggunaan dana publik. Kasus ini menunjukkan bahwa keterbukaan informasi yang bersifat formal belum cukup untuk menjamin terwujudnya pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel.

Transparansi substantif menuntut agar informasi yang dipublikasikan tidak hanya sekadar tersedia, tetapi juga relevan, mudah diakses, serta mencerminkan kondisi sebenarnya di lapangan. Dengan tidak adanya informasi mengenai

ketidaksesuaian volume pekerjaan, masyarakat kehilangan kesempatan untuk melakukan pengawasan secara lebih dini. Hal ini berimplikasi pada meningkatnya risiko terjadinya inefisiensi, pemborosan anggaran, bahkan potensi penyalahgunaan keuangan daerah. Temuan tersebut memperkuat identifikasi masalah yang ada di lapangan, di mana transparansi pada tahap implementasi proyek masih bersifat administratif dan belum substantif. Keterbukaan informasi lebih banyak berhenti pada aspek formal, misalnya laporan keuangan tahunan, sementara detail mengenai capaian fisik pekerjaan yang seharusnya dapat diakses publik tidak dipublikasikan secara memadai. Kondisi ini mengindikasikan bahwa akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah belum terwujud sepenuhnya, karena prinsip pertanggungjawaban tidak hanya menuntut keterbukaan administratif, tetapi juga kejelasan realisasi anggaran dalam bentuk capaian proyek. Dengan demikian, kasus Langsa menunjukkan bahwa tanpa transparansi substantif, akuntabilitas masih rentan dilemahkan oleh praktik inefisiensi maupun potensi penyimpangan anggaran.

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Herawaty & Susanto (2020), Nurhayati et al. (2019), dan Azlina et al. (2018), yang secara konsisten menyatakan bahwa transparansi informasi publik merupakan faktor determinan dalam meningkatkan akuntabilitas sektor publik. Transparansi membuka akses bagi masyarakat untuk memperoleh informasi keuangan yang jujur, terbuka, dan tepat waktu, sehingga pengawasan publik dapat dijalankan secara efektif. Ketika pemerintah daerah secara konsisten menjaga keterbukaan dan integritas informasi, tingkat kepercayaan masyarakat akan

meningkat, yang pada gilirannya memperkuat legitimasi dan keberlanjutan proses akuntabilitas. Dengan demikian, transparansi tidak hanya menjadi sarana kontrol, tetapi juga investasi strategis dalam membangun kepercayaan publik dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas.

4.5.2 Kompetensi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah

Pengujian terhadap hipotesis kedua (H2) menunjukkan bahwa Kompetensi juga berpengaruh positif dan signifikan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah, dengan nilai p sebesar $0,002 < 0,05$ dan koefisien jalur sebesar 0,472. Hal ini menunjukkan bahwa pengaruh kompetensi terhadap akuntabilitas adalah sebesar 47,2%, yang berarti bahwa semakin tinggi kompetensi aparatur atau pengelola keuangan daerah, maka akan semakin tinggi pula akuntabilitas yang dapat diwujudkan.

Berdasarkan hasil analisis kuesioner, pada indikator pengetahuan yang terkait dengan variabel kompetensi, ditemukan data ekstrim yang menunjukkan bahwa 85% responden mengaku memiliki pengetahuan yang cukup mengenai standar akuntansi pemerintahan (SAP) dan peraturan terkait pengelolaan keuangan daerah. Hal ini menunjukkan bahwa mayoritas pegawai yang terlibat dalam pengelolaan keuangan daerah memiliki pemahaman yang baik tentang regulasi yang berlaku, yang menjadi salah satu faktor kunci dalam meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan. Namun, meskipun angka tersebut tergolong tinggi, masih ada sekitar 15% responden yang merasa belum sepenuhnya menguasai materi tersebut, yang dapat berdampak pada kualitas pelaporan keuangan dan pertanggungjawaban publik.

Temuan penelitian ini konsisten dengan kerangka teori kapabilitas dinamis (dynamic capability theory), yang menekankan bahwa keberhasilan dan kinerja suatu organisasi tidak semata-mata ditentukan oleh sumber daya yang telah dimilikinya, tetapi terutama oleh kemampuan organisasi dalam mengembangkan, memadukan, dan mengonfigurasi ulang kapasitas internalnya secara berkelanjutan agar mampu merespons dinamika dan tantangan lingkungan eksternal. Dalam konteks pemerintah daerah, salah satu bentuk kapabilitas dinamis yang paling krusial adalah kompetensi aparatur. Kompetensi ini tidak hanya mencakup aspek teknis administratif, seperti kemampuan menyusun anggaran, melaksanakan program, serta menyusun laporan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), tetapi juga aspek strategis dan adaptif, antara lain kemampuan analisis kebijakan agar pemerintah daerah dapat memahami dampak dari setiap keputusan fiskal dan administratif terhadap pembangunan jangka panjang, manajemen risiko untuk mengantisipasi potensi penyimpangan anggaran atau hambatan regulasi, pengawasan dan monitoring guna memastikan program pembangunan berjalan sesuai rencana baik dari segi mutu, waktu, maupun anggaran, serta evaluasi dan pembelajaran organisasi untuk mendorong adanya perbaikan berkelanjutan (continuous improvement) melalui refleksi atas capaian maupun kelemahan program sebelumnya. Dengan kompetensi yang terbangun secara adaptif, aparatur pemerintah daerah tidak hanya mampu menjalankan rutinitas administrasi, tetapi juga memiliki fleksibilitas organisasi untuk menyesuaikan strategi dalam menghadapi perubahan lingkungan eksternal, seperti kebijakan nasional, dinamika sosial-ekonomi, maupun tuntutan transparansi dari masyarakat.

Kompetensi pegawai menjadi modal utama dalam membangun sistem pengelolaan keuangan yang akuntabel. Aparatur yang kompeten dapat menjalankan prosedur keuangan secara tepat, meminimalisasi kesalahan teknis, dan memastikan setiap keputusan diambil sesuai regulasi yang berlaku. Sebaliknya, kurangnya kompetensi berpotensi memunculkan berbagai risiko, mulai dari kesalahan input data, keterlambatan penyusunan laporan, hingga peluang manipulasi anggaran. Selain kemampuan teknis, kompetensi juga mencakup kapasitas etis, yaitu pemahaman dan komitmen terhadap prinsip good governance seperti transparansi, akuntabilitas, efektivitas, dan keadilan. Aparatur yang berkompeten mampu mengintegrasikan nilai-nilai etika ini ke dalam setiap proses kerja, sehingga tidak hanya memenuhi standar administratif, tetapi juga menjaga integritas proses pengelolaan keuangan daerah.

Peningkatan akuntabilitas tidak dapat dilepaskan dari strategi pengembangan kapasitas SDM (human capital development), yang dalam kerangka dynamic capability theory harus bersifat adaptif dan berkelanjutan. Strategi ini mencakup pelatihan dan sertifikasi di bidang akuntansi pemerintahan, audit, serta manajemen risiko; rotasi jabatan berbasis kompetensi untuk memperluas pengalaman aparatur; sistem rekrutmen berbasis merit agar posisi strategis diisi pegawai yang berkualifikasi teknis dan etis; serta evaluasi kinerja berbasis output dan outcome untuk memastikan pengembangan kompetensi terarah pada hasil yang terukur. Hasil penelitian ini secara langsung menjawab rumusan masalah kedua, yaitu lemahnya kompetensi SDM di pemerintah daerah sebagaimana diidentifikasi dalam IHPS BPK Tahun 2023, yang meliputi

ketidakmampuan dalam penyusunan regulasi, lemahnya implementasi kebijakan akibat keterbatasan pemahaman teknis dan manajerial, serta minimnya pengawasan dan evaluasi anggaran yang berakibat pada lemahnya kontrol terhadap potensi penyimpangan.

Secara empiris, penelitian ini menunjukkan bahwa kompetensi berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Hasil kuesioner memperkuat temuan ini, di mana 85% responden mengaku memiliki pengetahuan memadai terkait regulasi pengelolaan keuangan, namun masih terdapat 15% yang belum menguasainya secara penuh, berpotensi menimbulkan kesalahan, keterlambatan pelaporan, hingga penyimpangan dalam pertanggungjawaban anggaran. Dengan perspektif *dynamic capability theory*, kondisi ini menunjukkan adanya ketidakmampuan organisasi dalam membangun kapasitas adaptif untuk menghadapi kompleksitas pengelolaan keuangan daerah. Oleh karena itu, pengembangan kompetensi harus dipandang sebagai strategi inti yang diperbarui secara berkelanjutan sesuai perkembangan regulasi, teknologi, dan tantangan fiskal, sehingga menjadi prasyarat mutlak bagi terwujudnya sistem pengelolaan keuangan yang responsif, akuntabel, dan berkelanjutan.

Hasil penelitian ini juga secara langsung menjawab identifikasi masalah kedua, yaitu adanya temuan BPK mengenai kekurangan volume pekerjaan pada Proyek Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Pagar di Kawasan Wisata Hutan Kota Langsa senilai Rp102.721.096,34. Kasus tersebut menjadi bukti nyata lemahnya akuntabilitas dalam pelaksanaan proyek pembangunan daerah, di mana output fisik yang dihasilkan tidak sebanding dengan alokasi anggaran yang telah

dikeluarkan. Kekurangan volume pekerjaan pada dasarnya tidak hanya mencerminkan kelemahan sistem pengawasan, tetapi juga menunjukkan adanya keterbatasan kompetensi aparatur dan pelaksana proyek. Kelemahan ini terlihat pada aspek teknis, seperti kurang matang dalam perencanaan proyek, rendahnya kemampuan dalam pengendalian mutu pekerjaan, serta minimnya ketegasan dalam pengawasan realisasi anggaran di lapangan. Akibatnya, terjadi ketidaksesuaian antara rencana anggaran dan hasil fisik, yang pada akhirnya merugikan negara dan mengurangi kepercayaan publik terhadap tata kelola pemerintahan.

Apabila aparatur memiliki kompetensi yang memadai, baik dalam pemahaman regulasi keuangan, penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), maupun dalam manajemen proyek, maka potensi terjadinya kekurangan volume pekerjaan dapat ditekan seminimal mungkin. Kompetensi yang kuat memungkinkan setiap tahapan pengelolaan proyek dilakukan secara lebih teliti dan sistematis, mulai dari penyusunan detail engineering design (DED) yang presisi, pemantauan progres fisik sesuai standar mutu, hingga verifikasi laporan realisasi pekerjaan secara objektif dan transparan. Dengan demikian, kompetensi aparatur bukan hanya berkaitan dengan kemampuan teknis administratif semata, tetapi juga mencakup kecakapan analitis, manajerial, serta integritas dalam memastikan adanya keselarasan antara input anggaran dan output pembangunan. Artinya, peningkatan kompetensi aparatur menjadi prasyarat penting untuk memperkuat akuntabilitas dan mencegah terulangnya kasus serupa di masa mendatang.

Penelitian ini mendukung studi-studi sebelumnya seperti yang dilakukan oleh Mardiasmo (2021), Sari & Yuliana (2020), dan Wahyudi (2021), yang menegaskan bahwa kompetensi sumber daya manusia menjadi salah satu faktor utama yang menentukan kualitas pelaporan keuangan dan pertanggungjawaban publik. Pengelola keuangan yang memiliki kompetensi teknis, integritas, dan pemahaman atas peraturan akan lebih mampu menyusun laporan keuangan yang andal, sehingga meningkatkan akuntabilitas. Sebaliknya, kurangnya kompetensi akan menyebabkan kesalahan pencatatan, keterlambatan pelaporan, dan potensi penyimpangan yang dapat menurunkan akuntabilitas.

4.5.3 Sistem Akuntansi Keuangan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah

Hasil pengujian terhadap hipotesis ketiga (H3) menunjukkan bahwa Sistem Akuntansi Keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah, ditunjukkan oleh nilai p sebesar $0,032 < 0,05$ dan nilai koefisien jalur sebesar 0,202. Dengan demikian, pengaruh sistem akuntansi keuangan terhadap akuntabilitas adalah sebesar 20,2%. Hal ini menunjukkan bahwa sistem akuntansi yang terstruktur dan terstandar mampu meningkatkan akuntabilitas, meskipun pengaruhnya relatif lebih kecil dibanding variabel lain seperti transparansi dan kompetensi. Namun demikian, pengaruh ini tetap bermakna karena sistem akuntansi yang handal memberikan dasar yang kuat untuk menyusun laporan keuangan yang sesuai prinsip keandalan dan kejujuran.

Berdasarkan hasil survei terhadap responden penelitian, implementasi sistem akuntansi keuangan daerah secara umum mendapatkan penilaian yang

sangat positif, dengan mayoritas responden memberikan penilaian Baik dan Sangat Baik pada seluruh indikator yang diukur. Tingkat kepuasan ini terlihat dari konsistensi persentase kategori positif yang melebihi 80% pada setiap aspek, mulai dari kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), kejelasan dan konsistensi prosedur pencatatan, penggunaan kode rekening yang tepat, hingga kemampuan sistem menghasilkan laporan keuangan yang lengkap dan tepat waktu. Sebanyak 49% responden menilai kesesuaian sistem dengan SAP sebagai Sangat Baik, begitu pula penerapan basis akrual dan kemampuan sistem mengakomodasi perubahan regulasi. Tingkat kepuasan yang tinggi juga terlihat pada aspek prosedur pencatatan transaksi, dengan 55% responden menilai konsistensi pencatatan Sangat Baik serta 53% menilai penggunaan kode rekening sesuai standar. Pada dimensi pelaporan, 51% responden menilai penyusunan laporan keuangan periodik Sangat Baik, dan proporsi serupa juga diberikan pada kelengkapan laporan, ketepatan waktu penyusunan, serta fleksibilitas sistem dalam menghasilkan berbagai format laporan.

Secara keseluruhan, hasil survei ini mengindikasikan bahwa sistem akuntansi keuangan daerah telah berfungsi efektif, sesuai standar, dan diakui oleh para pemangku kepentingan sebagai instrumen penting dalam mendukung akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah. Tingginya penilaian positif menunjukkan bahwa investasi dalam pengembangan sistem, peningkatan kapasitas SDM, serta penyesuaian regulasi telah memberikan dampak nyata terhadap kinerja pengelolaan keuangan. Meski demikian, adanya sebagian kecil responden yang memberikan penilaian negatif menjadi masukan berharga untuk

perbaikan berkelanjutan, khususnya pada aspek sosialisasi perubahan regulasi, peningkatan fleksibilitas sistem, dan standardisasi prosedur di seluruh unit kerja. Dengan capaian ini, pemerintah daerah memiliki fondasi yang kuat untuk terus memperkuat kualitas sistem akuntansi, meminimalkan risiko ketidakpatuhan, dan membangun kepercayaan publik terhadap akurasi serta reliabilitas informasi keuangan.

Dalam praktiknya, SAK yang efektif berfungsi sebagai tulang punggung (backbone) pengelolaan keuangan daerah. Sistem ini memungkinkan pencatatan transaksi secara elektronik, pengendalian internal yang terstruktur, serta integrasi data lintas unit kerja sehingga memperkecil peluang terjadinya human error, manipulasi data, atau praktik kecurangan. Lebih jauh, SAK yang terdigitalisasi, terstandar, dan real-time tidak hanya mempercepat proses pelaporan keuangan, tetapi juga mempermudah proses audit, meningkatkan efisiensi kerja, serta menyediakan akses informasi yang transparan bagi publik. Hal ini memiliki implikasi langsung terhadap peningkatan kepercayaan masyarakat dan pemangku kepentingan terhadap pengelolaan keuangan pemerintah daerah. Dengan demikian, akuntabilitas tidak hanya bergantung pada kapasitas individu atau budaya organisasi, tetapi juga pada desain dan keandalan sistem akuntansi itu sendiri. Peningkatan kualitas SAK, khususnya melalui digitalisasi dan integrasi penuh, dapat dipandang sebagai langkah strategis dan preventif untuk mengurangi ketidakpatuhan sebagaimana tercermin dalam audit BPK, sekaligus memastikan terwujudnya tata kelola keuangan daerah yang akuntabel, transparan, dan berkelanjutan.

Pembahasan mengenai pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan (SAK) terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah secara langsung menjawab rumusan masalah ketiga, yaitu masih adanya permasalahan implementasi SAK sebagaimana diungkapkan oleh BPK melalui 1.045 temuan ketidakpatuhan pada pemeriksaan Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga (LKKL) dan Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LKBUN) Tahun 2023. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa SAK berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas, dengan nilai p sebesar $0,032 < 0,05$ dan koefisien jalur sebesar $0,202$, yang berarti bahwa kualitas penerapan sistem akuntansi yang baik berkontribusi sebesar $20,2\%$ terhadap peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Meskipun kontribusi SAK relatif lebih kecil dibandingkan variabel lain seperti transparansi ($58,9\%$) atau kompetensi SDM ($47,2\%$), temuan ini tetap memiliki makna strategis karena SAK merupakan pondasi sistemik dalam seluruh proses pengelolaan keuangan. Tanpa penerapan sistem akuntansi yang memadai, transparansi dan kompetensi sekalipun tidak akan mampu menghasilkan laporan keuangan yang akurat, dapat dipercaya, dan sesuai standar. Dengan kata lain, SAK adalah prasyarat teknis dan administratif yang memungkinkan prinsip akuntabilitas diwujudkan dalam bentuk laporan keuangan yang berkualitas serta pertanggungjawaban yang dapat dipertanggungjawabkan secara publik.

Permasalahan yang ditemukan oleh BPK menunjukkan bahwa implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) atau Sistem Akuntansi Keuangan (SAK) di banyak instansi pemerintah masih belum berjalan optimal.

Kondisi ini dapat dilihat dari masih digunakannya proses manual dalam pencatatan keuangan yang rentan terhadap kesalahan, kurangnya integrasi antarunit organisasi yang menyebabkan data keuangan terfragmentasi, serta keterbatasan infrastruktur teknologi yang menghambat akurasi dan kecepatan pelaporan. Selain itu, faktor kompetensi sumber daya manusia juga menjadi kendala, karena tidak semua aparatur memiliki keterampilan teknis akuntansi yang memadai untuk mengelola sistem keuangan berbasis standar modern. Akibatnya, laporan keuangan yang dihasilkan sering kali tidak sepenuhnya menggambarkan kondisi riil penggunaan anggaran, sehingga menimbulkan celah bagi terjadinya ketidakakuratan maupun penyimpangan.

Dalam perspektif good governance, kelemahan implementasi SAK ini mencerminkan adanya lemahnya sistem kontrol internal dan rendahnya efisiensi manajemen keuangan daerah. Ketika proses akuntansi masih dilakukan secara manual dan tidak terintegrasi, risiko terjadinya duplikasi pencatatan, keterlambatan laporan, hingga potensi manipulasi data keuangan semakin meningkat. Hal ini berimplikasi langsung pada menurunnya kualitas akuntabilitas publik, di mana masyarakat, DPRD, maupun lembaga pengawas tidak memperoleh informasi keuangan yang akurat, transparan, dan tepat waktu. Padahal, salah satu pilar utama good governance adalah keandalan sistem akuntansi yang mampu menyajikan informasi objektif sebagai dasar pengambilan keputusan dan pengawasan. Dengan kata lain, kelemahan dalam implementasi SAK menjadi hambatan struktural yang dapat mengurangi efektivitas tata kelola keuangan daerah secara keseluruhan.

Penguatan akuntabilitas keuangan daerah tidak dapat dilepaskan dari modernisasi SAK yang berbasis teknologi informasi. Sistem akuntansi yang terintegrasi, real-time, dan user friendly menjadi kebutuhan mendesak agar pencatatan keuangan dapat dilakukan secara lebih akurat, cepat, dan transparan. Modernisasi ini harus diiringi dengan peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan teknis, upskilling, dan sertifikasi akuntansi pemerintahan agar aparatur mampu mengoperasikan sistem dengan baik sekaligus memahami prinsip akuntabilitas publik. Dengan demikian, meskipun kontribusi implementasi SAK terhadap akuntabilitas secara statistik mungkin tidak sebesar faktor transparansi atau kompetensi individu, SAK tetap merupakan instrumen fundamental dalam membangun tata kelola keuangan daerah yang akuntabel. Tanpa sistem akuntansi yang kuat dan terimplementasi secara optimal, laporan keuangan tidak akan mampu mencerminkan kondisi sebenarnya dari penggunaan anggaran publik, sehingga sulit bagi pemerintah daerah untuk memperoleh kepercayaan masyarakat dan meningkatkan legitimasi pengelolaan keuangan negara.

Walaupun pengaruhnya lebih kecil dibandingkan variabel lain, hasil ini tetap signifikan dan menunjukkan bahwa penerapan sistem akuntansi keuangan yang baik dan terintegrasi akan mendorong terciptanya laporan keuangan yang transparan, tepat waktu, dan sesuai standar, yang pada akhirnya meningkatkan akuntabilitas. Penelitian ini sejalan dengan studi yang dilakukan oleh Rahmawati & Zulaikha (2019) serta Novitasari & Meskipun pengaruhnya relatif lebih kecil dibandingkan variabel lain, temuan ini tetap signifikan dan menegaskan bahwa penerapan sistem akuntansi keuangan yang baik dan terintegrasi merupakan

fondasi penting dalam mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang akuntabel. Sistem akuntansi yang berjalan optimal mampu menghasilkan laporan keuangan yang transparan, tepat waktu, serta sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku, sehingga memperkuat kepercayaan publik dan efektivitas pengawasan. Dengan adanya sistem yang terintegrasi, setiap transaksi keuangan dapat ditelusuri dengan jelas, meminimalisasi risiko manipulasi data, serta meningkatkan efisiensi proses administrasi keuangan.

Hasil penelitian ini juga konsisten dengan temuan Rahmawati & Zulaikha (2019) serta Novitasari & Pratolo (2020), yang menunjukkan bahwa sistem informasi akuntansi yang akurat, terkomputerisasi, dan berbasis teknologi informasi mampu menyediakan data yang relevan dan dapat diandalkan untuk mendukung pengambilan keputusan serta pertanggungjawaban keuangan publik. Artinya, keberadaan sistem informasi yang modern tidak hanya berfungsi sebagai alat pencatatan transaksi, tetapi juga sebagai instrumen strategis dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas organisasi sektor publik. Sebaliknya, sistem akuntansi yang masih bersifat manual atau tidak terintegrasi justru membuka peluang terjadinya kesalahan pencatatan, keterlambatan penyusunan laporan, dan lemahnya mekanisme kontrol internal. Kondisi ini pada akhirnya dapat menurunkan kualitas akuntabilitas dan memperbesar risiko penyalahgunaan anggaran. Oleh karena itu, modernisasi sistem akuntansi keuangan melalui pemanfaatan teknologi informasi yang andal, disertai dengan peningkatan kapasitas sumber daya manusia pengelola, menjadi kebutuhan mendesak dalam rangka memperkuat akuntabilitas keuangan daerah secara menyeluruh. (2020)

yang menunjukkan bahwa sistem informasi akuntansi yang akurat dan terkomputerisasi mampu memberikan data yang relevan bagi pengambilan keputusan dan pertanggungjawaban keuangan publik. Sistem yang buruk atau manual cenderung memunculkan peluang kesalahan, keterlambatan pelaporan, dan lemahnya kontrol internal yang berdampak pada menurunnya akuntabilitas.

4.5.4 Transparansi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah dimoderasi oleh SPIP

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaruh tidak langsung transparansi terhadap akuntabilitas melalui Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) memiliki koefisien sebesar 0,094 dengan nilai t-statistic 1,827 dan tingkat signifikansi 0,068. Meskipun nilai ini belum memenuhi kriteria signifikansi pada level 5%, namun posisinya yang mendekati batas tersebut mengindikasikan adanya kecenderungan hubungan moderasi yang potensial untuk diperkuat. Secara substantif, arah pengaruh yang positif ini menggambarkan bahwa peningkatan transparansi cenderung diikuti oleh penguatan akuntabilitas ketika didukung oleh SPIP yang berfungsi secara efektif. Hal ini sejalan dengan kerangka pikir good governance, di mana transparansi dan pengendalian internal merupakan dua elemen yang saling melengkapi dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang akuntabel.

Namun demikian, hasil ini juga menegaskan bahwa pengaruh positif transparansi terhadap akuntabilitas tidak selalu berjalan optimal tanpa keberadaan sistem pengendalian internal yang memadai. SPIP berperan sebagai buffer dan sekaligus enabler yang memastikan bahwa informasi yang terbuka untuk publik

tidak hanya bersifat informatif, tetapi juga akurat, dapat diverifikasi, dan terlindungi dari manipulasi. Dalam konteks ini, fungsi moderasi SPIP mencakup penguatan prosedur pengawasan, penjaminan kualitas data, serta mekanisme deteksi dan koreksi dini terhadap potensi penyimpangan. Dengan kata lain, transparansi yang tinggi tanpa SPIP yang kuat berisiko menghasilkan akuntabilitas semu, yaitu kondisi di mana informasi tersedia tetapi tidak mampu menjadi instrumen pengawasan yang efektif. Oleh karena itu, meskipun signifikansi statistik hubungan moderasi ini belum tercapai, implikasi praktisnya tetap penting untuk dipertimbangkan dalam perancangan kebijakan pengelolaan keuangan daerah.

Pada variabel akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, indikator akuntabilitas proses menunjukkan nilai paling ekstrim. Ini menunjukkan bahwa meskipun transparansi ada, dalam praktiknya, akuntabilitas dalam proses pengelolaan keuangan belum sepenuhnya terwujud. Beberapa daerah menunjukkan hasil yang sangat baik dalam melaporkan proses keuangan mereka, namun masih ada daerah yang cenderung menghindari evaluasi atau kurang terbuka terhadap publik terkait penggunaan anggaran. Terakhir, pada variabel SPIP, indikator penilaian risiko menunjukkan nilai paling ekstrim. Hal ini menggambarkan bahwa meskipun sebagian besar pemerintah daerah telah memiliki mekanisme untuk menilai risiko terkait dengan pengelolaan keuangan, ada sebagian yang masih kurang optimal dalam melaksanakan penilaian risiko. Sistem penilaian risiko yang baik dapat membantu pemerintah daerah untuk mendeteksi potensi masalah atau penyimpangan sebelum terjadi, sehingga

mencegah penyalahgunaan anggaran dan meningkatkan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan.

Secara substantif, temuan ini mengindikasikan bahwa SPIP dapat memperkuat efektivitas transparansi dalam menciptakan akuntabilitas, terutama jika sistem tersebut diimplementasikan secara konsisten dan menyeluruh. SPIP mencakup lima unsur utama: lingkungan pengendalian, penilaian risiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan. Jika unsur-unsur ini berjalan dengan baik, maka informasi yang transparan tidak hanya tersedia, tetapi juga dapat diverifikasi, dianalisis, dan diawasi secara sistematis. Artinya, SPIP membantu memastikan bahwa keterbukaan informasi keuangan benar-benar dimanfaatkan untuk meningkatkan pertanggungjawaban, bukan sekadar formalitas. Sebaliknya, bila SPIP tidak diterapkan secara optimal, maka meskipun pemerintah telah menyajikan informasi secara terbuka, potensi penyimpangan dan penyalahgunaan anggaran tetap tinggi karena lemahnya pengawasan internal. Oleh karena itu, penerapan transparansi harus diiringi oleh penguatan fungsi pengendalian internal agar tujuan akhir berupa akuntabilitas keuangan daerah dapat benar-benar tercapai. Dalam konteks ini, SPIP tidak hanya berfungsi sebagai pengontrol, tetapi juga sebagai penguat sistem tata kelola yang memastikan setiap informasi keuangan yang disajikan dapat diandalkan sebagai dasar evaluasi kinerja keuangan pemerintah daerah.

Temuan penelitian ini memperlihatkan bahwa meskipun transparansi memiliki pengaruh signifikan terhadap akuntabilitas, peran Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) sebagai faktor penguat belum menunjukkan efektivitas

yang optimal. Kondisi ini sejalan dengan pendapat Yuliani & Lestari (2020) yang menekankan bahwa efektivitas SPIP tidak hanya ditentukan oleh keberadaannya sebagai instrumen formal, tetapi juga oleh kapasitas pelaksanaan, kualitas sumber daya manusia, dan komitmen organisasi dalam menerapkan seluruh komponennya secara konsisten. Dengan kata lain, tanpa penerapan SPIP yang matang dan terintegrasi dalam seluruh proses manajemen keuangan daerah, pengaruh transparansi terhadap akuntabilitas cenderung berjalan parsial, tidak terlembaga secara sistemik, dan berisiko tidak berkelanjutan. Hal ini menjelaskan mengapa di beberapa daerah, meskipun informasi keuangan telah dibuka untuk publik, kelemahan pengendalian internal masih memunculkan celah bagi terjadinya ketidaksesuaian, inefisiensi, atau bahkan penyimpangan.

Hasil analisis menunjukkan bahwa nilai paling ekstrem dalam variabel transparansi terletak pada indikator keterbukaan proses, yang mencerminkan adanya variasi signifikan antar daerah dalam tingkat keterbukaan pada tahapan perencanaan maupun pelaksanaan anggaran. Sebagian daerah memang telah menyajikan informasi proses keuangan secara memadai, termasuk mekanisme penyusunan APBD, pengalokasian anggaran, serta progres pelaksanaan program. Namun, di sisi lain, terdapat daerah yang masih membatasi keterbukaan pada tahap tertentu, misalnya hanya mempublikasikan hasil akhir tanpa menjelaskan proses atau pertimbangan kebijakan yang melatarbelakangi keputusan anggaran. Padahal, keterbukaan pada seluruh tahapan proses—mulai dari perencanaan, penetapan, pelaksanaan, hingga evaluasi—sangat krusial karena memungkinkan publik dan lembaga pengawas melakukan monitoring dan evaluasi kebijakan

secara komprehensif. Semakin tinggi tingkat keterbukaan proses, semakin kecil peluang terjadinya manipulasi informasi, dan semakin kuat pula akuntabilitas yang dapat diwujudkan.

Hasil penelitian ini secara langsung menjawab rumusan masalah keempat, yakni terkait dengan belum optimalnya penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Hal ini sejalan dengan temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang menyoroti adanya kelemahan signifikan dalam sistem pengendalian internal, termasuk masih ditemukannya ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa meskipun regulasi SPIP telah diatur secara jelas dalam Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008, implementasinya di tingkat pemerintah daerah masih menghadapi berbagai hambatan, baik dari aspek teknis maupun manajerial. Secara empiris, hasil penelitian memperlihatkan bahwa SPIP memiliki pengaruh positif sebagai variabel moderasi dalam hubungan antara transparansi dan akuntabilitas. Dengan kata lain, keberadaan SPIP secara teoritis berfungsi sebagai instrumen yang dapat memperkuat dampak transparansi terhadap peningkatan akuntabilitas publik. Namun demikian, pengaruh tersebut secara statistik belum signifikan pada tingkat kepercayaan 95%, dengan nilai signifikansi 0,068. Hal ini mengindikasikan bahwa meskipun SPIP memiliki potensi untuk berperan penting dalam meningkatkan akuntabilitas, pada praktiknya penerapannya belum memberikan hasil yang optimal. Kesenjangan ini memperlihatkan adanya perbedaan antara konsep normatif SPIP yang dirancang sebagai sistem pengendalian berbasis risiko

dengan realitas implementasi di lapangan yang masih bersifat administratif dan prosedural semata.

Kelemahan implementasi SPIP dapat ditelusuri dari beberapa faktor mendasar. Pertama, masih terbatasnya pemahaman dan kapasitas sumber daya manusia dalam mengoperasionalkan SPIP sesuai kerangka manajemen risiko. Banyak aparatur yang hanya menempatkan SPIP sebagai kewajiban administratif tanpa benar-benar mengintegrasikannya dalam proses perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi program. Kedua, lemahnya komitmen pimpinan organisasi dalam menjadikan SPIP sebagai bagian dari budaya kerja, sehingga pengendalian internal sering kali hanya bersifat formalitas dan tidak dijalankan secara konsisten. Ketiga, minimnya monitoring dan evaluasi berkelanjutan terhadap efektivitas pelaksanaan SPIP, sehingga kelemahan yang sama terus berulang dari tahun ke tahun.

Secara konseptual, SPIP seharusnya menjadi enabler mechanism yang memastikan bahwa keterbukaan informasi publik benar-benar diiringi dengan kontrol internal yang memadai, sehingga informasi yang disampaikan dapat dipercaya dan dapat dipertanggungjawabkan. Namun, kelemahan penerapan SPIP dalam konteks penelitian ini memperlihatkan bahwa fungsi pengendalian internal belum berjalan secara optimal, baik dari sisi lingkungan pengendalian, penilaian risiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi, maupun pemantauan. Hal ini juga sejalan dengan temuan BPK yang menyoroti lemahnya pemantauan anggaran, kurangnya deteksi dini terhadap risiko penyimpangan, serta minimnya tindak lanjut terhadap rekomendasi hasil audit. Dengan demikian, meskipun

secara normatif SPIP dirancang untuk meningkatkan akuntabilitas, pada praktiknya masih diperlukan upaya penguatan dalam bentuk peningkatan kapasitas SDM, penerapan teknologi pendukung pengendalian internal, serta pengawasan yang lebih ketat agar peran SPIP dapat berfungsi secara signifikan dalam memperkuat hubungan transparansi dengan akuntabilitas.

Kesenjangan antara peran yang diharapkan dan kenyataan di lapangan selaras dengan temuan BPK yang secara konsisten mencatat lemahnya fungsi pengawasan internal serta rendahnya tingkat kepatuhan pada regulasi. Dalam tataran konseptual, SPIP dirancang untuk mencakup lima unsur kunci—lingkungan pengendalian, penilaian risiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan yang seharusnya diimplementasikan secara terintegrasi. Akan tetapi, bukti penelitian menunjukkan bahwa penerapan unsur-unsur ini masih parsial, tidak konsisten, dan sering kali hanya memenuhi persyaratan administratif tanpa terinternalisasi dalam praktik kerja sehari-hari. Data empiris penelitian ini bahkan menempatkan indikator penilaian risiko sebagai komponen SPIP dengan nilai paling ekstrem, yang mengisyaratkan bahwa sebagian besar pemerintah daerah belum memiliki kapasitas optimal dalam melakukan identifikasi, analisis, dan mitigasi risiko yang berpotensi mengganggu integritas pengelolaan keuangan daerah.

Kelemahan pada unsur penilaian risiko ini membawa implikasi langsung terhadap kualitas pengawasan terhadap transparansi. Tanpa proses identifikasi risiko yang tepat, informasi yang dibuka kepada publik berisiko mengandung kelemahan substantif, misalnya inkonsistensi data, keterlambatan pembaruan, atau

ketidaksesuaian dengan regulasi terbaru. Akibatnya, transparansi tidak serta-merta menghasilkan akuntabilitas yang kokoh, melainkan hanya menciptakan *appearance of accountability* yang bersifat semu. Temuan ini sejalan dengan pandangan bahwa good governance membutuhkan kombinasi antara keterbukaan informasi dan mekanisme pengendalian yang efektif. Oleh karena itu, penelitian ini menegaskan bahwa transparansi tanpa ditopang oleh SPIP yang kuat tidak akan cukup untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan dan pelanggaran hukum. Dengan demikian, lemahnya implementasi SPIP menjadi salah satu akar penyebab rendahnya akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, sebagaimana juga diidentifikasi dalam laporan hasil pemeriksaan BPK, sekaligus menegaskan urgensi reformasi pengendalian internal yang bersifat sistemik dan berkelanjutan.

4.5.5 Kompetensi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah dimoderasi oleh SPIP

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengaruh kompetensi terhadap akuntabilitas memiliki hubungan yang positif dan signifikan melalui peran Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), dengan nilai koefisien jalur sebesar 0,096, t-statistic 2,138, dan nilai signifikansi $0,033 < 0,05$. Temuan ini mengindikasikan bahwa SPIP berfungsi secara efektif sebagai variabel intervening atau moderasi yang mampu memperkuat pengaruh kompetensi terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Secara substantif, hal ini berarti bahwa penguasaan pengetahuan teknis, keterampilan, dan integritas aparatur akan lebih berdampak signifikan terhadap pencapaian akuntabilitas

apabila diiringi dengan penerapan SPIP yang terstruktur, terukur, dan berkesinambungan.

Kompetensi aparatur tidak hanya menjadi faktor penentu kemampuan mereka dalam mengelola informasi keuangan, tetapi juga mempengaruhi kualitas pelaksanaan prosedur pengendalian internal. Ketika aparatur memiliki pemahaman mendalam tentang prinsip akuntansi, regulasi, dan manajemen risiko, maka pelaksanaan unsur-unsur SPIP—seperti penilaian risiko, aktivitas pengendalian, dan pemantauan—dapat dijalankan secara konsisten dan sesuai standar. Kondisi ini pada akhirnya memperkecil peluang terjadinya kesalahan pencatatan, penyalahgunaan anggaran, maupun pelanggaran prosedur, sehingga akuntabilitas meningkat baik secara formal (kepatuhan terhadap regulasi) maupun substantif (pertanggungjawaban atas hasil dan kinerja).

SPIP memainkan peran penting dalam memastikan bahwa kompetensi pegawai benar-benar diterapkan dalam praktik yang terstruktur dan diawasi. SPIP menyediakan kerangka kerja sistematis berupa lima unsur utama: lingkungan pengendalian, penilaian risiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan internal. Aparatur yang kompeten akan lebih mampu memahami dan melaksanakan setiap unsur SPIP, sehingga pengelolaan keuangan menjadi lebih terkontrol, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan. Lebih lanjut, penerapan SPIP membantu menyalurkan kompetensi ke arah yang produktif dan sesuai dengan prinsip good governance. Tanpa SPIP, kompetensi yang tinggi belum tentu menghasilkan akuntabilitas, karena bisa jadi tidak ada sistem yang mengarahkan, memantau, atau mengevaluasi kinerja keuangan secara

menyeluruh. Dengan SPIP, kompetensi tidak hanya menjadi potensi individual, tetapi menjadi kekuatan kolektif yang mendukung pengendalian risiko dan pengawasan internal, serta memperkuat kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah.

Hasil penelitian ini secara langsung menjawab rumusan masalah kelima, yaitu adanya indikasi permasalahan dalam pengelolaan APBD Kota Langsa yang tercermin dari capaian realisasi pendapatan daerah yang belum sepenuhnya mencapai target 100%. Data menunjukkan bahwa rata-rata realisasi pendapatan daerah hanya sebesar 98,17% selama periode 2020–2024. Walaupun angka tersebut tampak cukup tinggi, celah sekitar 1,83% tetap signifikan bila ditinjau dari perspektif tata kelola keuangan publik. Hal ini menandakan adanya potensi ketidakefektifan dalam efektivitas pengelolaan keuangan, sebab dalam kerangka akuntabilitas publik, setiap deviasi antara target dan realisasi memiliki implikasi penting terhadap perencanaan, pelaksanaan, serta evaluasi kebijakan fiskal. Dengan demikian, capaian tersebut mengindikasikan bahwa meskipun pemerintah daerah mampu menjaga kinerja pendapatan pada level yang baik, masih terdapat ruang perbaikan agar target yang ditetapkan dapat direalisasikan secara penuh. Kesenjangan antara target dan realisasi ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor teknis. Pertama, kemungkinan adanya penetapan target pendapatan yang kurang realistis, di mana target disusun tanpa memperhitungkan secara optimal kondisi ekonomi lokal, kapasitas fiskal, maupun tingkat kepatuhan wajib pajak. Kedua, keterlambatan dalam mekanisme penagihan pajak dan retribusi daerah juga menjadi penyebab umum yang menghambat pencapaian realisasi. Masalah lain

adalah lemahnya basis data wajib pajak yang menyebabkan potensi penerimaan tidak sepenuhnya teridentifikasi atau termanfaatkan. Selain itu, faktor eksternal berupa fluktuasi ekonomi makro, perubahan regulasi pusat, hingga dinamika sosial-ekonomi lokal turut berkontribusi terhadap ketidakpastian pendapatan, sehingga capaian aktual sulit untuk sepenuhnya menyamai target.

Permasalahan realisasi pendapatan daerah tidak hanya bersifat teknis, melainkan juga struktural dan kelembagaan. Dari sisi kelembagaan, keterbatasan kapasitas sumber daya manusia dalam merancang strategi pengelolaan pendapatan yang adaptif masih menjadi kendala utama. Aparatur keuangan daerah sering kali terjebak pada pola pengelolaan pendapatan yang bersifat rutin dan kurang inovatif, sehingga sulit merespons perubahan lingkungan fiskal yang dinamis. Lebih jauh, lemahnya penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) juga turut memperburuk kondisi, karena SPIP seharusnya berfungsi memastikan akurasi perencanaan pendapatan, efektivitas pelaksanaan, serta kepatuhan terhadap regulasi. Lemahnya fungsi pengendalian internal ini dapat berimplikasi pada rendahnya kualitas data perencanaan, kurang optimalnya monitoring realisasi, serta tidak konsistennya evaluasi terhadap deviasi yang terjadi. Dengan demikian, meskipun secara umum capaian realisasi pendapatan daerah Kota Langsa dapat dikatakan baik, temuan ini mengindikasikan adanya tantangan mendasar dalam perencanaan fiskal, mekanisme penagihan, kualitas data, serta kapasitas kelembagaan. Upaya perbaikan ke depan perlu diarahkan pada penyusunan target yang lebih berbasis pada analisis potensi riil, modernisasi sistem informasi pajak dan retribusi, serta penguatan kompetensi aparatur dalam

manajemen pendapatan. Di samping itu, penerapan SPIP secara konsisten dan efektif akan menjadi faktor kunci untuk menutup kesenjangan antara target dan realisasi, sehingga akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah dapat lebih optimal dan berkelanjutan.

Dalam perspektif good governance dan teori manajemen publik, capaian realisasi yang belum optimal ini mencerminkan bahwa efektivitas pengelolaan APBD tidak hanya ditentukan oleh potensi sumber pendapatan, tetapi juga oleh kompetensi aparatur, integritas sistem, serta kualitas pengawasan dan evaluasi. Aparatur yang kompeten seharusnya mampu menetapkan target yang rasional, mengelola risiko fiskal, serta melakukan inovasi dalam menggali potensi pendapatan daerah. Sementara itu, pengawasan internal yang kuat diperlukan agar setiap proses, mulai dari penetapan target hingga realisasi, dapat berjalan sesuai prinsip akuntabilitas dan transparansi. Tanpa perbaikan pada aspek struktural ini, realisasi pendapatan akan terus menghadapi kesenjangan yang berulang, yang pada akhirnya dapat mengurangi kemampuan fiskal daerah dalam mendanai program pembangunan serta pelayanan publik secara optimal.

Hasil penelitian ini sejalan dengan temuan sebelumnya oleh Prasetyo & Yulianto (2021) serta Fitriani et al. (2020), yang menegaskan bahwa kompetensi aparatur memiliki peran fundamental dalam keberhasilan implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Pelaksanaan SPIP menuntut pemahaman yang baik mengenai prinsip-prinsip manajemen risiko, penerapan kontrol internal, serta mekanisme evaluasi yang berkesinambungan. Aparatur dengan kompetensi tinggi tidak hanya mampu mengidentifikasi potensi risiko yang mungkin muncul

dalam pengelolaan keuangan daerah, tetapi juga dapat merancang langkah mitigasi yang sesuai, memastikan bahwa setiap proses berjalan sesuai standar operasional, serta melakukan evaluasi secara objektif untuk perbaikan berkelanjutan. Dengan kata lain, kompetensi menjadi fondasi utama agar SPIP tidak sekadar bersifat administratif, melainkan benar-benar berfungsi sebagai alat manajerial yang mampu meningkatkan efektivitas tata kelola keuangan publik.

SPIP yang dijalankan secara efektif dapat memperkuat akuntabilitas keuangan daerah melalui mekanisme pengawasan internal yang sistematis dan berbasis risiko. Mekanisme ini memungkinkan deteksi dini terhadap potensi penyimpangan, memperkecil peluang terjadinya fraud, serta memastikan bahwa setiap penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Namun, efektivitas SPIP sangat ditentukan oleh kualitas sumber daya manusia yang mengelolanya. Aparatur yang kurang kompeten cenderung hanya menjalankan SPIP sebatas formalitas, misalnya sekadar memenuhi dokumen administrasi tanpa pemahaman substansial tentang risiko dan kontrol yang seharusnya dijalankan. Sebaliknya, aparatur yang memiliki kompetensi tinggi dapat mengintegrasikan SPIP ke dalam siklus manajemen keuangan secara menyeluruh, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi.

4.5.6 Sistem Akuntansi Keuangan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah dimoderasi oleh SPIP

Hasil pengujian regresi menunjukkan bahwa pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan (SAK) terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah yang dimoderasi oleh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) memiliki

koefisien jalur sebesar 0,097, t-statistic 2,487, dan nilai signifikansi 0,041. Nilai signifikansi yang berada di bawah ambang batas 0,05 ini mengindikasikan bahwa hubungan antara SAK dan akuntabilitas memang signifikan secara statistik, dan peran SPIP sebagai variabel moderasi mampu memperkuat pengaruh tersebut. Dengan kata lain, penerapan sistem akuntansi yang baik akan memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap akuntabilitas apabila didukung oleh sistem pengendalian internal yang memadai dan efektif.

Temuan ini memiliki implikasi penting, karena secara praktis menunjukkan bahwa Sistem Akuntansi Keuangan (SAK) tidak hanya berfungsi sebagai instrumen teknis dalam pencatatan dan pelaporan transaksi keuangan, tetapi juga memiliki peran strategis sebagai instrumen manajerial yang mendukung terciptanya tata kelola keuangan daerah yang efektif dan akuntabel. Dalam perspektif manajerial, SAK yang andal memberikan dasar informasi yang kuat bagi pimpinan daerah dalam mengambil keputusan strategis, menyusun kebijakan fiskal, serta mengevaluasi efektivitas program pembangunan. Oleh karena itu, keberadaan SAK tidak bisa dipandang semata-mata sebagai kewajiban administratif, melainkan sebagai bagian integral dari sistem pengendalian manajemen yang menentukan kualitas informasi keuangan. Aktivitas pengendalian berperan dalam menciptakan prosedur dan kebijakan untuk mencegah kesalahan atau kecurangan. Sementara itu, pemantauan berfungsi untuk mengevaluasi secara berkesinambungan apakah sistem akuntansi berjalan sesuai dengan yang direncanakan.

Penerapan SPIP berfungsi untuk memperkuat dan memastikan bahwa sistem akuntansi yang diterapkan benar-benar berfungsi sesuai dengan tujuannya, yaitu menciptakan pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel. SPIP memberikan kerangka pengendalian yang dapat memastikan bahwa setiap proses akuntansi berjalan sesuai prosedur yang telah ditetapkan, mencegah potensi kecurangan atau penyalahgunaan anggaran. Sistem ini mencakup elemen-elemen penting seperti pengawasan internal, evaluasi risiko, dan pelaporan yang jelas, yang semuanya berkontribusi untuk memastikan bahwa sistem akuntansi dapat menghasilkan informasi keuangan yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika sistem akuntansi diterapkan tanpa adanya pengendalian yang memadai, misalnya tanpa adanya SPIP yang berfungsi dengan baik, maka meskipun laporan keuangan yang dihasilkan mungkin sudah sesuai standar, pengawasan terhadap proses penggunaan anggaran tetap lemah. Ini dapat membuka celah untuk potensi ketidaksesuaian antara laporan keuangan dengan realitas penggunaan anggaran yang sebenarnya. Oleh karena itu, SPIP membantu memastikan bahwa sistem akuntansi keuangan tidak hanya dijalankan secara administratif, tetapi juga diawasi secara internal agar setiap informasi yang disampaikan dalam laporan keuangan dapat dipertanggungjawabkan.

Hasil penelitian ini secara langsung menjawab rumusan masalah kelima, yaitu adanya indikasi permasalahan dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Langsa, yang tercermin dari capaian realisasi pendapatan yang tidak pernah mencapai 100%, dengan rata-rata hanya 98,17% selama periode 2020–2024. Meskipun angka tersebut secara nominal terlihat

relatif tinggi, kesenjangan sebesar 1,83% tetap signifikan apabila dilihat dalam perspektif tata kelola keuangan publik. Hal ini menunjukkan adanya kelemahan struktural dalam seluruh siklus pengelolaan keuangan daerah, mulai dari tahap perencanaan, penetapan target pendapatan, pelaksanaan pemungutan, pencatatan transaksi, hingga penyajian laporan keuangan. Dengan kata lain, persoalan realisasi pendapatan yang tidak optimal bukan hanya sekadar akibat perhitungan target fiskal yang kurang tepat, melainkan juga merupakan refleksi dari masalah mendasar yang menghambat efektivitas tata kelola keuangan daerah secara keseluruhan. Ditinjau dari aspek teknis fiskal, ketidaktercapaian target pendapatan dapat disebabkan oleh beberapa faktor. Pertama, penetapan target yang kurang realistis, karena seringkali pemerintah daerah cenderung menetapkan target pendapatan dengan pendekatan optimistis tanpa didukung basis data yang akurat mengenai potensi penerimaan. Kedua, lemahnya sistem informasi dan basis data pajak maupun retribusi, sehingga menghambat optimalisasi penggalan potensi pendapatan daerah. Ketiga, mekanisme penagihan pajak dan retribusi yang masih manual dan berbelit-belit, yang mengakibatkan keterlambatan, inefisiensi, bahkan potensi kebocoran penerimaan. Selain itu, faktor eksternal seperti fluktuasi ekonomi makro, perubahan regulasi pusat, serta dinamika sosial-ekonomi lokal juga turut berperan memengaruhi pencapaian pendapatan daerah. Kondisi ini diperparah oleh rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak, yang sebagian disebabkan oleh kurangnya sosialisasi, lemahnya pengawasan, dan minimnya insentif maupun sanksi tegas.

Permasalahan yang muncul tidak hanya bersifat teknis, melainkan juga struktural dan kelembagaan. Kualitas implementasi Sistem Akuntansi Keuangan (SAK) dan efektivitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) berperan besar dalam menentukan sejauh mana target pendapatan dapat direalisasikan secara optimal. SAK yang belum sepenuhnya terintegrasi dan masih mengandalkan proses manual rentan menimbulkan kesalahan pencatatan maupun keterlambatan dalam pelaporan. Hal ini menyebabkan data keuangan yang dihasilkan tidak sepenuhnya akurat, sehingga berdampak pada ketidaktepatan proyeksi target pendapatan di awal periode. Di sisi lain, lemahnya pelaksanaan SPIP juga memperburuk kondisi ini. Minimnya pengawasan terhadap unit pemungut pajak, kurangnya evaluasi kinerja aparatur, serta lemahnya mekanisme pengendalian risiko fiskal membuat realisasi pendapatan sulit mencapai target secara konsisten. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa untuk mencapai realisasi pendapatan yang optimal, diperlukan penguatan sistem akuntansi yang terintegrasi, didukung dengan implementasi SPIP yang efektif dan konsisten, sehingga pengelolaan keuangan daerah dapat lebih transparan, akurat, dan akuntabel.

Dalam perspektif *good governance*, kondisi ini menunjukkan bahwa pengelolaan APBD Kota Langsa masih menghadapi tantangan dalam mewujudkan efektivitas, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas. Realisasi pendapatan yang tidak optimal berimplikasi pada berkurangnya kemampuan fiskal daerah untuk mendanai program pembangunan dan pelayanan publik, yang pada akhirnya dapat menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah

daerah. Oleh karena itu, strategi perbaikan tidak hanya harus difokuskan pada perbaikan teknis fiskal seperti intensifikasi dan ekstensifikasi pajak, tetapi juga pada penguatan sistem akuntansi, pengendalian internal, dan peningkatan kompetensi aparatur. Dengan kombinasi upaya tersebut, diharapkan target pendapatan daerah dapat disusun lebih akurat, direalisasikan lebih optimal, serta dilaporkan secara transparan dan akuntabel.

Dalam konteks Kota Langsa, temuan ini menunjukkan bahwa penerapan SAK mungkin telah berjalan, namun belum optimalnya kinerja SPIP dapat mengakibatkan terjadinya ketidaksesuaian antara laporan keuangan dan realisasi anggaran. Hal ini terlihat dari capaian pendapatan daerah yang tidak memenuhi target selama lima tahun berturut-turut. Salah satu indikasi yang ditemukan dalam penelitian ini adalah bahwa indikator pemantauan pengendalian intern memperoleh skor tertinggi pada variabel SPIP. Fakta ini mengisyaratkan bahwa daerah yang memiliki mekanisme pengawasan internal yang kuat cenderung menghasilkan laporan keuangan yang lebih akurat, transparan, dan akuntabel. Sebaliknya, lemahnya fungsi pemantauan dapat menyebabkan terjadinya gap antara perencanaan dan realisasi, yang pada akhirnya berdampak pada penurunan kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan daerah.

Efektivitas SPIP tidak hanya sebatas memastikan kepatuhan pada prosedur administrasi, tetapi juga mencakup kemampuan untuk mengidentifikasi risiko, melakukan mitigasi, dan memastikan bahwa seluruh proses keuangan berjalan sesuai prinsip good governance. Dalam praktiknya, pengendalian internal yang kuat akan memastikan bahwa data yang dihasilkan oleh SAK dapat dipercaya,

bebas dari kesalahan material, serta relevan untuk pengambilan keputusan. Dengan demikian, pembahasan ini menegaskan bahwa perbaikan kualitas pengelolaan keuangan daerah di Kota Langsa harus dilakukan melalui dua jalur yang saling melengkapi. Pertama, memastikan penerapan SAK yang sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berbasis teknologi informasi agar proses pencatatan dan pelaporan lebih cepat, akurat, dan terintegrasi. Kedua, memperkuat fungsi SPIP secara komprehensif pada lima unsur utamanya—lingkungan pengendalian, penilaian risiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan, sehingga proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi anggaran dapat dilakukan secara efektif. Kombinasi dari kedua aspek ini akan menciptakan ekosistem pengelolaan keuangan daerah yang tidak hanya akuntabel, tetapi juga responsif terhadap tantangan fiskal, sehingga target realisasi pendapatan dapat tercapai secara optimal dan berkelanjutan.

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan SPIP berperan penting dalam memperkuat pengaruh positif antara sistem akuntansi keuangan dengan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Pemerintah daerah yang mengimplementasikan SPIP dengan baik akan mampu memaksimalkan fungsi sistem akuntansi keuangan, sehingga tercipta pengelolaan keuangan yang lebih efisien, transparan, dan akuntabel. Oleh karena itu, penting bagi setiap daerah untuk tidak hanya berfokus pada penerapan SAK yang sesuai standar, tetapi juga memastikan bahwa sistem pengendalian internal seperti SPIP berjalan dengan efektif untuk mendukung akuntabilitas pengelolaan keuangan. Hasil ini mendukung pendapat dari Ramadhani & Kusnadi (2019), yang menyatakan

bahwa integrasi sistem akuntansi keuangan yang berbasis teknologi dan didukung dengan SPIP yang berjalan dengan baik dapat meningkatkan transparansi, akurasi, serta pelaporan keuangan yang andal. SPIP bertindak sebagai sistem pengawasan dan pengendalian internal atas pelaksanaan akuntansi, sehingga meminimalkan kesalahan dan meningkatkan kepercayaan publik atas kinerja keuangan daerah.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Transparansi berpengaruh signifikan dengan arah positif terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah. Pengaruh Transparansi terhadap Akuntabilitas tetap signifikan meskipun terdapat variabel lainnya, menunjukkan pentingnya keterbukaan informasi dalam mendorong pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel.
2. Kompetensi berpengaruh signifikan dengan arah positif terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah. Temuan ini menekankan pentingnya peningkatan kapasitas dan keahlian sumber daya manusia dalam memperkuat akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.
3. Sistem Akuntansi Keuangan berpengaruh signifikan dengan arah positif terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah. Hasil ini menunjukkan bahwa keberadaan sistem akuntansi keuangan yang andal dan terstruktur merupakan komponen penting dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang akuntabel di tingkat daerah.
4. Transparansi berpengaruh signifikan dengan arah positif terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah yang dimoderasi oleh SPIP. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa SPIP tidak memperkuat hubungan antara Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah, meskipun pengaruhnya bersifat positif.

5. Kompetensi berpengaruh signifikan dengan arah positif terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah yang dimoderasi oleh SPIP. Hasil ini menunjukkan bahwa SPIP mampu memperkuat hubungan antara Kompetensi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah. Secara kuantitatif, pengaruh tidak langsung yang dimediasi oleh SPIP sebesar 9,6%.
6. Sistem Akuntansi Keuangan berpengaruh signifikan dengan arah positif terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah yang dimoderasi oleh SPIP. Berdasarkan hasil ini, dapat disimpulkan bahwa SPIP memperkuat hubungan antara Sistem Akuntansi Keuangan dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah, yang menunjukkan pentingnya pengaruh SPIP dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan keuangan daerah.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pengaruh Transparansi, Kompetensi, dan Sistem Akuntansi Keuangan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah dengan penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) sebagai variabel moderasi, berikut adalah beberapa saran yang dapat diberikan untuk instansi pemerintahan dan kampus:

1. Saran untuk Instansi Pemerintahan

Berdasarkan pembahasan yang telah dipaparkan, instansi pemerintah daerah disarankan untuk meningkatkan tingkat transparansi dalam proses pengelolaan keuangan dengan menyediakan informasi yang jelas dan mudah diakses terkait anggaran, penggunaan dana, dan laporan keuangan daerah. Peningkatan transparansi ini akan mendukung pengawasan yang lebih efektif dan meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan. Selain itu,

penguatan kompetensi aparatur pemerintah daerah melalui pelatihan dan pengembangan profesional sangat penting untuk memastikan bahwa pegawai yang terlibat dalam pengelolaan keuangan memiliki pengetahuan dan keterampilan yang memadai, serta memahami prinsip-prinsip akuntabilitas dan pengelolaan keuangan yang baik.

2. Pemerintah Kota Langsung juga perlu memberikan perhatian serius terhadap penerapan sistem akuntansi keuangan yang efektif sebagai bagian integral dari upaya mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada hasil. Salah satu langkah strategis yang perlu dilakukan adalah memilih dan menggunakan perangkat lunak akuntansi yang sesuai dengan kebutuhan pengelolaan keuangan daerah, baik dari segi fitur, keamanan data, maupun kemudahan akses dan operasional bagi aparatur pemerintah. Sistem yang terintegrasi akan memungkinkan data keuangan terekam secara real-time, meminimalisir risiko kesalahan pencatatan, dan mempermudah proses pelaporan serta audit internal maupun eksternal.
3. Pemerintahan Kota Langsa perlu memastikan bahwa seluruh prosedur dan praktik akuntansi dijalankan secara konsisten sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan yang berlaku. Hal ini mencakup pencatatan transaksi keuangan yang tepat waktu dan akurat, penyusunan laporan keuangan yang transparan, serta pengarsipan dokumen yang tertib dan mudah ditelusuri. Penerapan sistem akuntansi yang efektif bukan hanya berfungsi sebagai alat administrasi, tetapi juga sebagai instrumen penting

dalam mendukung pengambilan keputusan, perencanaan anggaran, dan evaluasi kinerja.

DAFTAR PUSTAKA

- Alam, S. (2019). Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Masjid Butuh Komitmen dan Kompetensi Pengelola. *EQUITY: Journal of Economics, Management and Accounting*, 14(2), 54–71.
- Andrianto, N. (2007). *Good e-government: transparansi dan akuntabilitas publik melalui e-government*. Bayumedia.
- Aprisyah, P., & Yuliati, A. (2021). Pengaruh penerapan sistem akuntansi keuangan pemerintah daerah dan kompetensi sumber daya manusia terhadap laporan keuangan daerah (studi empiris pada dinas perhubungan kota Bengkulu). *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi (MEA)*, 5(2), 1855–1869.
- Atmadja, A. T., & Saputra, A. K. (2017). Pencegahan fraud dalam pengelolaan Keuangan Desa. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Bisnis*, 12(1), 7–16.
- Azhar, I. N., Maulana, I., & Lubis, S. I. S. (2021). Pengaruh transparansi dan akuntabilitas terhadap pengelolaan sumber daya manusia. *Jurnal Education and Development*, 9(1), 520.
- Coryanata, I. (2011). Akuntabilitas, partisipasi masyarakat dan transparansi kebijakan publik sebagai pemoderasi hubungan pengetahuan dewan tentang anggaran dan pengawasan keuangan daerah. *Journal of Accounting and Investment*, 12(2), 110–125.
- Dahrani, D. (2021). Analisis Profesionalisme Berbasis Sumber Daya Insani BPRS di Sumut (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara).
- Dahrani, D., Saragih, F., & Ritonga, P. (2022). Model Pengelolaan Keuangan Berbasis Literasi Keuangan Dan Inklusi Keuangan: Studi pada UMKM di Kota Binjai. *Owner: Riset Dan Jurnal Akuntansi*, 6(2), 1509–1518.
- Dahrani, D., & Rosady, F. (2023). Pengaruh Sumber Daya Insasi dan Strategi Penghimpunan Zakat Terhadap Minat Masyarakat Pada Kantor Layanan Zakat Rumah Yatim Ar Rahman. *Jurnal AKMAMI (Akuntansi Manajemen Ekonomi)*, 4(2), 168177-168177.
- Dahrani, D., & Sohiron, S. (2024). Penerapan Teori Harapan Victor Vroom dalam meningkatkan motivasi kerja karyawan. *AL-MIKRAJ Jurnal Studi Islam Dan Humaniora* (E-ISSN 2745-4584), 4(02), 1974-1987.
- Defana, F. A., & Rahayu, S. (2023). Pengaruh Kualitas Laporan Keuangan, Sistem Pengendalian Internal, Dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Studi Kasus Pada Badan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2021). *EKOMBIS REVIEW: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis*, 11(1), 21–30.
- Erliyanti, E., Yuliani, R., & Hamdani, H. (2022). Pengaruh kompetensi aparatur pemerintah, partisipasi masyarakat, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan gaya kepemimpinan terhadap good governance pada pengelolaan

- keuangan SKPD Kabupaten Balangan. *Fair Value: Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan*, 4(11), 5252–5265.
- Estrilia, D., Wijayanti, I., & Hidayah, N. (2023). Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Penerapan Sistem Akuntansi dan Kompetensi Aparatur terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa. *Jurnal Akuntansi Dan Manajemen*, 20(01), 1–11.
- Ghozali, I. (2014). *Structural Equation Modeling Metode Alternatif dengan Partial Least Square (PLS) Edisi 4*. Universitas Diponegoro.
- Gustina, I. R. A. (2021). Pengaruh sistem pengendalian intern dan penerapan sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 10(1), 56–64.
- Hehanussa, S. J. (2015). Pengaruh penyajian laporan keuangan daerah dan aksesibilitas laporan keuangan daerah terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah Kota Ambon. *Conference In Business, Accounting, And Management (CBAM)*, 2(1), 82–90.
- Irfan, I., Manulang, S., & Hani, S. (2024). *Metodologi Penelitian Bisnis dan Konsep Aplikasi*. UMSU Press.
- Januri, J., & Alpi, M. F. (2024). Peranan Efektifitas Pengelolaan dana desa: Sistem Pengendalian Internal Dan Kompetensi Desa Dengan Akuntabilitas Sebagai Variabel Intervening. *LIABILITIES (JURNAL PENDIDIKAN AKUNTANSI)*, 7(3), 46–54.
- Karim, R. A., & Mursalim, M. (2019). Pengaruh akuntabilitas, transparansi dan sistem pengendalian intern terhadap kinerja keuangan. *PARADOKS: Jurnal Ilmu Ekonomi*, 2(1), 39–49.
- Kuncahyo, H. D., & Dharmakarja, I. (2022). Pengaruh kompetensi, peran aparat desa, dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa di kecamatan mojogedang karanganyar jawa tengah. *Akuntansiku*, 1(4), 299–319.
- Lesmana, S., & Lufriansyah, L. (2019). Pengaruh Sistem Pengendalian Akuntansi dan Pengendalian Dewan Pengawas Syariah Terhadap Kinerja Bank Syariah (Studi Empiris pada Bank Syariah Kantor Wilayah Sumatera Utara). *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis*, 19(1), 1–13.
- Lestari, I., & Sari, M. (2021). The Effect Of Transparency And Accountability On The Performance Of Employees Of PT Bank Sumut KC Syariah Tebing Tinggi. *Al-Sharf: Jurnal Ekonomi Islam*, 2(2), 140–156.
- Leunupun, P., Persulesy, G., & Souhuwat, M. Y. (2022). Pengelolaan Keuangan, Sistem Akuntansi Keuangan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan. *Owner: Riset Dan Jurnal Akuntansi*, 6(3), 2364–2476.
- Luqyana, L., & Islahuddin, I. (2022). Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah: Apakah Aksesibilitas, Pengendalian Internal, Dan Kompetensi

- Aparatur Mempengaruhinya. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi*, 7(1), 83–94.
- Mahmudi, M. (2019). *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. UPP STIM YKPN.
- Mardiasmo, M. (2004). *Akuntansi Sektor Publik*. Penerbit Andi.
- Mardiasmo, M. (2021). *Akuntansi Sektor Publik - Edisi Terbaru*. Andi Offset. <https://books.google.co.id/books?id=pBVCEAAAQBAJ>
- Mentu, E. P., & Sondakh, J. J. (2016). Penyajian Laporan Keuangan Daerah Sesuai Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Pada Dinas Pendapatan Daerah Dan Dinas Sosial Prov. Sulut. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 4(1).
- Mulyanto, M., Budiman, N. A., & Fahmi, M. N. (2021). Pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Penyajian Laporan Keuangan Daerah, Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah, dan Desentralisasi Fiskal Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Dengan Sistem Pengendalian Internal Pemerin. *JBE (Jurnal Bingkai Ekonomi)*, 6(1), 1–17.
- Nasir, A. (2021). Pengaruh transparansi, kompetensi, dan sistem akuntansi keuangan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah dengan penerapan sistem pengendalian internal pemerintah sebagai variabel moderasi. *Journal of Economic, Bussines and Accounting (COSTING)*.
- Ningsih, L. P. P. S. (2021). Pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Desa, Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Pengawasan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Pada Desa Se-Kecamatan Ubud). *Hita Akuntansi Dan Keuangan*, 2(4), 183–198.
- Pebriani, R. A. (2019). Faktor-faktor yang Memengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah di Kabupaten Banyuasin dengan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Global Masa Kini*, 10(1), 55–62.
- Putri, A. R. L. (2022). Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas, Partisipasi Masyarakat, Dan Kompetensi Aparat Desa Terhadap Pengelolaan Dana Desa. *Fair Value: Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan*, 4(Special Issue 3), 1668–1688.
- Rasdianto, R. (2019). *Akuntansi Keuangan Berbasis Akrual*. Salemba Empat.
- Ridzal, N. A., Sujana, I. W., & Malik, E. (2022). Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Buton Selatan. *Owner: Riset Dan Jurnal Akuntansi*, 6(3), 3094–3104.
- Riska, L. D. (2020). *Pengaruh Komitmen Organisasi, Kompetensi Aparatur, Transparansi, dan Efektivitas Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah pada Pemerintah Aceh [Skripsi]*. Universitas Sumatera Utara.

- Rosanti, D. I. (2014). Pengaruh Pendidikan, Kompetensi Dan Kompensasi Terhadap Kinerja Karyawan PT Lati Prayogi. *Jurnal Ilmu & Riset Manajemen*, 3(11).
- Saragih, D. P., & Alpi, M. F. (2023). Pengaruh Partisipasi Masyarakat, Tata Kelola Terhadap Efektivitas Pengelolaan Dana Desa Dengan Akuntabilitas Sebagai Intervening. *Ekonomi, Keuangan, Investasi Dan Syariah (EKUITAS)*, 5(1), 1–10.
- Sari, E. N., Lubis, A., & Astuty, W. (2020). Tha Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia Dan Pemanfaatan Teknologi Terhadap Sistem Pengelolaan Dana Desa Serta Dampak Terhadap Kinerja Pemerintah Desa Di Kabupaten Deli Serdang: Sistem Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal Mutiara Akuntansi*, 5(2), 107–126.
- Silvia, R., & Hanum, Z. (2024). Pengaruh Akuntabilitas, Time Pressure Dan Pemahaman Sistem Informasi terhadap Kualitas Audit dengan Due Professional Care sebagai Variabel Intervening. *Owner: Riset Dan Jurnal Akuntansi*, 8(4), 4475–4489.
- Sugiyono, S. (2019). Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. *ALFABETA, Cv.*
- Sukmawati, F., & Nurfitriani, A. (2019). Pengaruh transparansi dan akuntabilitas terhadap pengelolaan keuangan desa. *Jurnal Ilmiah Bisnis, Pasar Modal Dan Umkm*, 2(1), 52–66.
- Surjono, W., & Firdaus, N. N. R. (2017). Pengaruh sistem akuntansi keuangan daerah terhadap akuntabilitas laporan keuangan pada satuan kerja Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan (DPPK) pemerintah daerah Kabupaten Bandung. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan*, 5(1), 1357–1368.
- Utami, N. P. S., Merta, I. W. G., & Manuaba, I. B. M. P. (2020). Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan, Pengendalian Internal dan Pemahaman Akuntansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Klungkung). *Jurnal Riset Akuntansi Warmadewa*, 1(3), 42–47.
- Vidyasari, F. N., & Suryono, B. (2021). Pengaruh akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah dan sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 10(4).
- Wibowo, W. (2018). *Manajemen Kinerja (5th ed.)*. Raja Grafindo.
- Wirakusuma, I. G. B., & Setiawan, P. E. (2019). Pengaruh pengendalian internal, kompetensi dan locus of control pada kecenderungan kecurangan akuntansi. *E-Jurnal Akuntansi*, 26(2), 1545–1569.
- Zafira, Z., & Dahrani, D. (2023). Analisis Sistem Pengembangan SDM Melalui Pendekatan Training Pada Dompot Dhuafa Waspada. *AL-MULTAZIM: Jurnal Manajemen Bisnis Syariah*, 3(2), 437-446.

- Zamzami, Z., & Gowon, M. (2021). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Dengan Kesuksesan Penerapan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah Sebagai Variabel Intervening:(Studi Empiris Pada Pemerintah Daerah Kota Jambi). *JAKU (Jurnal Akuntansi & Keuangan Unja)(E-Journal)*, 6(3), 136–148.
- Zeyn, E. (2014). Pengaruh penerapan good governance dan standar akuntansi pemerintahan terhadap akuntabilitas keuangan. *Trikonomika Journal*, 10(1), 52–62.

KUESIONER PENELITIAN

Kepada Yth. Responden

Di tempat

Dalam rangka menyelesaikan tugas akhir Tesis untuk memenuhi persyaratan gelar Magister Strata-2 (S-2) pada Program Studi Akuntansi Pasca Sarjana Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhamadiyah Sumatera Utara, saya:

Nama : Ainul Alfi Syahrin
NPM : 2320050021
Program Studi/Konsentrasi : Akuntansi/Sektor Publik

Bermaksud untuk mengadakan penelitian dengan judul **“PENGARUH TRANSPARANSI, KOMPETENSI, DAN SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN TERHADAP AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DENGAN PENERAPAN SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL PEMERINTAH SEBAGAI VARIABEL MODERASI (STUDI KASUS KANTOR WALIKOTA LANGSA)”**.

Untuk itu, besar harapan saya agar Bapak/Ibu/Saudara/i bersedia untuk mengisi kuesioner, sehingga jawaban yang didapatkan dari hasil kuesioner ini dapat memberikan informasi guna melengkapi data yang diperlukan dalam penelitian.

Penelitian ini sama sekali tidak akan menimbulkan kerugian bagi Bapak/Ibu/Saudara/i. Semua informasi dari hasil penelitian hanya digunakan untuk kepentingan penelitian dan akan dijaga kerahasiannya. Atas segala bantuan dan partisipasi Bapak/Ibu/Saudara/i dalam pengisian kuesioner ini saya ucapkan terima kasih.

Medan, April 2025

Hormat saya,



Ainul Alfi Syahrin

Cara Pengisian Kuesioner:

Bapak/Ibu/Saudara/i cukup memberikan tanda (□) pada pilihan jawaban yang tersedia sesuai dengan pendapat Bapak/Ibu/Saudara/i. Setiap pernyataan mengharapkan hanya ada satu jawaban. Setiap angka akan mewakili tingkat kesesuaian dengan pendapat Bapak/Ibu/Saudara/i. Skor/nilai jawaban adalah sebagai berikut:

Skor/Nilai 1 : Sangat Tidak Setuju (STS)

Skor/Nilai 2 : Tidak Setuju (TS)

Skor/Nilai 3 : Netral (N)

Skor/Nilai 4 : Setuju (S)

Skor/Nilai 5 : Sangat Setuju (SS)

Identitas Responden:

1. Nama Responden :
2. Umur : < 25 tahun 25 – 30 tahun
 31 – 36 tahun > 36 tahun
3. Jenis Kelamin : Laki-laki Perempuan
4. Pendidikan Terakhir : D3 S3
 S1 Lain-lain
 S2

DAFTAR PERNYATAAN VARIABEL TRANSPARANSI

No.	Pernyataan	Nilai				
		STS	TS	N	S	SS
Kesediaan dan aksesibilitas dokumen						
1.	Dokumen keuangan daerah tersedia untuk diakses oleh publik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.					
2.	Informasi tentang pengelolaan keuangan daerah dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.					
Kejelasan dan Kelengkapan Informasi						
1.	Informasi dalam dokumen pengelolaan keuangan daerah disajikan dengan bahasa yang mudah dipahami.					
2.	Dokumen keuangan daerah memuat informasi yang lengkap mengenai perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban anggaran.					
No.	Pernyataan	Nilai				
		STS	TS	N	S	SS
Keterbukaan Proses						
1.	Proses perencanaan anggaran daerah dilakukan secara terbuka dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan.					
2.	Mekanisme pelaksanaan anggaran daerah dilakukan secara transparan sesuai dengan ketentuan.					
No.	Pernyataan	Nilai				
		STS	TS	N	S	SS
Kerangka Informasi yang Menjamin Transparansi						
1.	Terdapat peraturan daerah yang secara khusus mengatur tentang transparansi pengelolaan keuangan daerah.					
2.	Regulasi yang ada memberikan jaminan hukum bagi masyarakat untuk mengakses informasi keuangan daerah.					
3.	Implementasi kebijakan transparansi keuangan daerah diawasi oleh lembaga pengawas yang independen.					
4.	Terdapat sanksi yang jelas bagi pelanggaran terhadap ketentuan transparansi pengelolaan keuangan daerah.					

DAFTAR PERNYATAAN VARIABEL KOMPETENSI

No.	Pernyataan	Nilai				
		STS	TS	N	S	SS
Pengalaman Kerja						
1.	Pengalaman kerja yang saya miliki sangat membantu dalam melaksanakan tugas pengelolaan keuangan daerah.					
2.	Semakin lama masa kerja pegawai di bidang keuangan, semakin baik kinerjanya dalam pengelolaan keuangan daerah.					
3.	Pengalaman menangani masalah keuangan daerah meningkatkan kemampuan saya dalam mengambil keputusan yang tepat.					
Pendidikan						
1.	Latar belakang pendidikan formal saya sesuai dengan pekerjaan di bidang pengelolaan keuangan daerah.					
2.	Tingkat pendidikan yang dimiliki pegawai mempengaruhi kualitas pengelolaan keuangan daerah.					
3.	Pendidikan berkelanjutan (seperti pelatihan, seminar, workshop) secara berkala meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah.					
No.	Pernyataan	Nilai				
		STS	TS	N	S	SS
Pengetahuan						
1.	Pegawai memiliki pemahaman yang memadai tentang peraturan dan regulasi terkait pengelolaan keuangan daerah.					
2.	Pengetahuan tentang standar akuntansi pemerintahan diterapkan dengan baik dalam pengelolaan keuangan daerah.					
No.	Pernyataan	Nilai				
		STS	TS	N	S	SS
Keterampilan						
1.	Pegawai mampu mengoperasikan aplikasi dan sistem informasi keuangan daerah dengan baik.					
2.	Kemampuan analisis dalam menginterpretasikan data keuangan diaplikasikan dengan tepat oleh pegawai.					

**DAFTAR PERNYATAAN VARIABEL SISTEM AKUNTANSI
KEUANGAN**

No.	Pernyataan	Nilai				
		STS	TS	N	S	SS
Kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintah						
1.	Sistem akuntansi keuangan yang digunakan telah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) terbaru.					
2.	Penerapan basis akrual dalam sistem akuntansi keuangan daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan SAP.					
3.	Sistem akuntansi keuangan dapat mengakomodasi perubahan regulasi SAP dengan baik.					
Prosedur Pencatatan Akuntansi Berdasarkan Standar Umum						
1.	Terdapat prosedur yang jelas untuk pencatatan transaksi keuangan dalam sistem akuntansi keuangan daerah.					
2.	Proses identifikasi, pengukuran, dan pencatatan transaksi ekonomi dilakukan secara konsisten.					
3.	Penggunaan kode rekening dalam sistem akuntansi keuangan sesuai dengan standar yang berlaku					

No.	Pernyataan	Nilai				
		STS	TS	N	S	SS
Penyusunan Laporan Keuangan Secara Periodik						
1.	Laporan keuangan daerah disusun secara periodik sesuai dengan peraturan yang berlaku.					
2.	Sistem akuntansi keuangan menghasilkan laporan keuangan yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.					
3.	Laporan keuangan daerah dapat dihasilkan tepat waktu sesuai dengan jadwal yang ditetapkan.					
4.	Sistem akuntansi keuangan mampu menghasilkan berbagai laporan keuangan untuk keperluan internal dan eksternal.					

**DAFTAR PERNYATAAN VARIABEL AKUNTABILITAS
PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**

No.	Pernyataan	Nilai				
		STS	TS	N	S	SS
Akuntabilitas Kejujuran dan Hukum						
1.	Pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan dengan jujur dan terbebas dari penyalahgunaan jabatan.					
2.	Setiap transaksi keuangan daerah memiliki bukti pendukung yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan.					
3.	Pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.					
Akuntabilitas Proses						
1.	Prosedur pengelolaan keuangan daerah telah dilaksanakan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP).					
2.	Proses pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip efisiensi dan efektivitas.					
3.	Pengawasan terhadap proses pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara berkesinambungan.					
Akuntabilitas Program						
1.	Program yang dibiayai dari APBD memiliki tujuan dan sasaran yang jelas.					
2.	Terdapat indikator kinerja yang terukur untuk setiap program yang dilaksanakan.					
Akuntabilitas Kebijakan						
1.	Kebijakan pengelolaan keuangan daerah dirumuskan dengan mempertimbangkan kebutuhan dan kepentingan masyarakat.					
2.	Terdapat mekanisme untuk menjelaskan dan mempertanggungjawabkan kebijakan keuangan daerah kepada publik.					

**DAFTAR PERNYATAAN VARIABEL SISTEM PENGENDALIAN
INTERNAL PEMERINTAH**

No.	Pernyataan	Nilai				
		STS	TS	N	S	SS
Lingkungan Pengendalian						
1.	Pimpinan instansi menunjukkan komitmen terhadap integritas dan nilai etika dalam pengelolaan keuangan daerah.					
2.	Terdapat struktur organisasi yang jelas dengan pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat.					
Penilaian Risiko						
1.	Instansi melakukan identifikasi risiko terhadap pencapaian tujuan pengelolaan keuangan daerah.					
2.	Risiko yang teridentifikasi dianalisis sebagai dasar penentuan penanganan risiko yang tepat.					
No.	Pernyataan	Nilai				
		STS	TS	N	S	SS
Kegiatan Pengendalian						
1.	Instansi memiliki kebijakan dan prosedur tertulis untuk mengendalikan kegiatan pengelolaan keuangan daerah.					
2.	Terdapat pemisahan fungsi yang memadai dalam proses pengelolaan keuangan daerah.					
Informasi dan Komunikasi						
1.	Instansi memperoleh dan menggunakan informasi yang berkualitas dan relevan untuk mendukung fungsi pengendalian internal.					
2.	Informasi terkait pengendalian internal dikomunikasikan dalam organisasi, termasuk tujuan dan tanggung jawab.					

No.	Pernyataan	Nilai				
		STS	TS	N	S	SS
Pemantauan Pengendalian Intern						
1.	Instansi melakukan evaluasi berkelanjutan terhadap efektivitas sistem pengendalian internal.					
2.	Kelemahan pengendalian internal dilaporkan kepada pihak yang bertanggung jawab untuk tindakan perbaikan.					

Responden	TP1	TP2	TP3	TP4	TP5	TP6	TP7	TP8	TP9	TP10	KP1	KP2	KP3	KP4	KP5	KP6	KP7	KP8	KP9	KP10
R1	4	5	4	4	5	4	5	4	4	5	5	4	5	4	5	4	5	4	5	4
R2	5	4	5	4	4	5	4	5	4	4	4	5	4	5	4	5	4	5	4	5
R3	3	4	4	3	4	4	3	4	4	3	4	4	3	4	4	3	4	4	3	4
R4	4	4	5	5	4	4	5	4	5	4	5	5	4	5	5	4	5	5	4	5
R5	5	5	4	4	5	5	4	4	5	5	4	4	5	4	4	5	4	4	5	4
R6	4	3	4	5	4	3	4	5	4	3	3	3	4	3	3	4	3	3	4	3
R7	3	4	3	4	3	4	3	4	3	4	4	4	3	4	4	3	4	4	3	4
R8	5	5	4	5	5	4	5	5	4	5	5	4	5	5	5	4	5	5	5	5
R9	4	4	5	4	4	5	4	4	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
R10	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
R11	4	4	4	5	4	4	4	5	4	4	4	5	4	4	5	4	4	5	4	4
R12	5	5	5	4	5	5	5	4	5	5	5	4	5	5	4	5	5	4	5	5
R13	4	4	3	4	4	3	4	4	3	4	4	3	4	4	3	4	4	3	4	4
R14	5	4	5	5	4	5	5	4	5	5	3	4	3	3	4	3	3	4	3	3
R15	3	3	4	3	3	4	3	3	4	3	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
R16	4	5	5	4	5	5	4	5	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
R17	5	4	4	5	4	4	5	4	4	5	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
R18	4	3	3	4	3	3	4	3	3	4	4	5	4	4	5	4	4	5	4	4
R19	3	4	4	3	4	4	3	4	4	3	5	4	5	5	4	5	5	4	5	5
R20	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	3	4	4	3	4	4	3	4	4
R21	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	3	3	4	3	3	4	3	3
R22	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
R23	4	5	4	4	5	4	4	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
R24	5	4	5	5	4	5	5	4	5	5	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
R25	4	3	4	4	3	4	4	3	4	4	4	5	4	4	5	4	4	5	4	4
R26	3	4	3	3	4	3	3	4	3	3	5	4	5	5	4	5	5	4	5	5
R27	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	3	4	4	3	4	4	3	4	4
R28	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	3	3	4	3	3	4	3	3
R29	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
R30	4	5	4	4	5	4	4	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
R31	5	4	5	5	4	5	5	4	5	5	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
R32	4	3	4	4	3	4	4	3	4	4	4	5	4	4	5	4	4	5	4	4

R33	3	4	3	3	4	3	3	4	3	3	5	4	5	5	4	5	5	4	5	5
R34	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	3	4	4	3	4	4	3	4	4
R35	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	3	3	4	3	3	4	3	3
R36	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
R37	4	5	4	4	5	4	4	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
R38	5	4	5	5	4	5	5	4	5	5	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
R39	4	3	4	4	3	4	4	3	4	4	4	5	4	4	5	4	4	5	4	4
R40	3	4	3	3	4	3	3	4	3	3	5	4	5	5	4	5	5	4	5	5
R41	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	3	4	4	3	4	4	3	4	4
R42	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	3	3	4	3	3	4	3	3
R43	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
R44	4	5	4	4	5	4	4	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
R45	5	4	5	5	4	5	5	4	5	5	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
R46	4	3	4	4	3	4	4	3	4	4	4	5	4	4	5	4	4	5	4	4
R47	3	4	3	3	4	3	3	4	3	3	5	4	5	5	4	5	5	4	5	5
R48	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	3	4	4	3	4	4	3	4	4
R49	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	3	3	4	3	3	4	3	3
R50	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
R51	4	4	5	5	4	4	5	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
R52	5	5	4	4	5	5	4	4	5	5	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
R53	4	4	3	3	4	4	3	3	4	4	4	5	4	4	5	4	4	5	4	4
R54	3	3	4	4	3	3	4	4	3	3	5	4	5	5	4	5	5	4	5	5
R55	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	3	4	4	3	4	4	3	4	4
R56	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	3	3	4	3	3	4	3	3
R57	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
R58	4	4	5	5	4	4	5	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
R59	5	5	4	4	5	5	4	4	5	5	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
R60	4	4	3	3	4	4	3	3	4	4	4	5	4	4	5	4	4	5	4	4
R61	3	3	4	4	3	3	4	4	3	3	5	4	5	5	4	5	5	4	5	5
R62	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	3	4	4	3	4	4	3	4	4
R63	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	3	3	4	3	3	4	3	3
R64	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
R65	4	4	5	5	4	4	5	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4

R66	5	5	4	4	5	5	4	4	5	5	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
R67	4	4	3	3	4	4	3	3	4	4	4	5	4	4	5	4	4	5	4	4
R68	3	3	4	4	3	3	4	4	3	3	5	4	5	5	4	5	5	4	5	5
R69	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	3	4	4	3	4	4	3	4	4
R70	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	3	3	4	3	3	4	3	3
R71	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
R72	4	4	5	5	4	4	5	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
R73	5	5	4	4	5	5	4	4	5	5	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
R74	4	4	3	3	4	4	3	3	4	4	4	5	4	4	5	4	4	5	4	4
R75	3	3	4	4	3	3	4	4	3	3	5	4	5	5	4	5	5	4	5	5
R76	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	3	4	4	3	4	4	3	4	4
R77	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	3	4	3	3	4	3	3	4	3	3
R78	5	4	4	4	4	4	4	5	4	4	4	5	4	4	5	4	5	5	4	4

Responden	SAK1	SAK2	SAK3	SAK4	SAK5	SAK6	SAK7	SAK8	SAK9	SAK10	APK1	APK2	APK3	APK4	APK5	APK6	APK7	APK8	APK9	APK10
R1	4	4	5	4	5	4	4	5	4	5	5	4	5	4	5	4	5	4	5	4
R2	5	5	4	5	4	5	4	5	4	4	4	5	4	5	4	5	4	5	4	4
R3	4	4	3	4	4	3	4	4	3	4	4	3	4	4	3	4	4	3	4	4
R4	4	5	5	4	4	5	4	4	5	4	5	4	5	5	4	5	5	4	5	5
R5	4	4	5	5	4	4	5	5	4	4	4	5	4	4	5	4	4	5	4	4
R6	4	5	4	3	4	5	4	3	4	5	3	4	3	3	4	3	3	4	3	3
R7	3	4	3	4	3	4	3	4	3	4	4	3	4	4	3	4	4	3	5	4
R8	5	4	5	5	4	5	5	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	5
R9	4	5	4	4	5	4	4	5	4	4	5	4	4	5	4	4	4	4	4	4
R10	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
R11	4	5	4	4	4	5	4	4	4	5	5	4	4	5	4	4	5	4	4	5
R12	5	4	5	5	5	4	5	5	5	4	4	5	5	4	5	5	4	5	5	4
R13	4	3	4	4	3	4	4	3	4	4	3	4	4	3	4	4	3	4	4	3
R14	4	5	5	4	5	5	4	5	5	4	4	3	3	4	3	3	4	3	3	4
R15	3	4	3	3	4	3	3	4	3	3	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
R16	5	5	4	5	5	4	5	5	4	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
R17	4	4	5	4	4	5	4	4	5	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
R18	3	3	4	3	3	4	3	3	4	3	5	4	4	5	4	4	5	4	4	5
R19	4	4	3	4	4	3	4	4	3	4	4	5	5	4	5	5	4	5	5	4
R20	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	3	4	4	3	4	4	3	4	4	3
R21	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	4	3	3	4	3	3	4
R22	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
R23	5	4	4	5	4	4	5	4	4	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
R24	4	5	5	4	5	5	4	5	5	4	4	3	3	3	3	4	3	3	3	3
R25	3	4	4	3	4	4	3	4	4	3	5	4	4	5	4	4	5	4	4	5
R26	4	3	3	4	3	3	4	3	3	4	4	5	5	4	5	5	4	5	5	4
R27	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	3	4	4	3	4	4	3	4	5	3
R28	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	4	3	3	4	3	3	4
R29	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
R30	5	4	4	5	4	4	5	4	4	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
R31	4	5	5	4	5	5	4	5	5	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
R32	3	4	4	3	4	4	3	4	4	3	5	4	4	5	4	4	5	4	4	5

R33	4	3	3	4	3	3	4	3	3	4	4	5	5	4	5	5	4	5	5	4
R34	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	3	4	4	3	4	4	3	4	4	3
R35	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	4	3	3	4	3	3	4
R36	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
R37	5	4	4	5	4	4	5	4	4	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
R38	4	5	5	4	5	5	4	5	5	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
R39	3	4	4	3	4	4	3	4	4	3	5	4	4	5	4	4	5	4	4	5
R40	4	3	3	4	3	3	4	3	3	4	4	5	5	4	5	5	4	5	5	4
R41	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	3	4	4	3	4	4	3	4	4	3
R42	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	4	3	3	4	3	3	4
R43	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
R44	5	4	4	5	4	4	5	4	4	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
R45	4	5	5	4	5	5	4	5	5	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
R46	3	4	4	3	4	4	3	4	4	3	5	4	4	5	4	4	5	4	4	5
R47	4	3	3	4	3	3	4	3	3	4	4	5	5	4	5	5	4	5	5	4
R48	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	3	4	4	3	4	4	3	4	4	3
R49	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	4	3	3	4	3	3	4
R50	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
R51	5	5	4	4	5	5	4	4	5	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
R52	4	4	5	5	4	4	5	5	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
R53	3	3	4	4	3	3	4	4	3	3	5	4	4	5	4	4	5	4	4	5
R54	4	4	3	3	4	4	3	3	4	4	4	5	5	4	5	5	4	5	5	4
R55	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	3	4	4	3	4	4	3	4	4	3
R56	4	4	4	4	5	4	4	4	4	4	4	3	3	4	3	3	4	3	3	4
R57	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
R58	5	5	4	4	5	5	4	4	5	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
R59	4	4	5	5	4	4	5	5	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
R60	3	3	4	4	3	3	4	4	3	3	5	4	4	5	4	4	5	4	4	5
R61	4	4	3	3	4	4	3	3	4	4	4	5	5	4	5	5	4	5	5	4
R62	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	3	4	4	3	4	4	3	4	4	3
R63	4	4	4	4	5	4	4	4	4	5	4	3	3	4	3	3	4	3	3	4
R64	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
R65	5	5	4	4	5	5	4	4	5	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4

R66	4	4	5	5	4	4	5	5	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
R67	3	3	4	4	3	3	4	4	3	3	5	4	4	5	4	4	5	4	4	5
R68	4	4	3	3	4	4	3	3	4	4	4	5	5	4	5	5	4	5	5	4
R69	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	3	4	4	3	4	4	3	4	4	3
R70	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	4	3	3	4	3	3	4
R71	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
R72	5	5	4	4	5	5	4	4	5	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
R73	4	4	5	5	4	4	5	5	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
R74	3	3	4	4	3	3	4	4	3	3	5	4	4	5	4	4	5	4	4	5
R75	4	4	3	3	4	4	3	3	4	4	4	5	5	4	5	5	4	5	5	4
R76	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	3	4	4	3	4	4	3	4	4	3
R77	4	5	4	4	3	4	4	4	4	5	4	3	3	4	3	3	4	3	3	4
R78	5	5	4	4	5	4	4	4	4	5	5	4	4	5	4	4	5	4	4	5

Responden	SPIP1	SPIP2	SPIP3	SPIP4	SPIP5	SPIP6	SPIP7	SPIP8	SPIP9	SPIP10
R1	5	4	5	4	4	5	5	5	4	4
R2	5	5	4	5	4	4	4	4	5	5
R3	4	5	3	4	3	4	3	4	4	4
R4	5	5	5	4	5	4	5	4	5	5
R5	4	4	5	5	4	4	5	5	4	4
R6	3	3	4	3	4	5	4	3	4	3
R7	4	4	3	4	3	5	3	4	3	4
R8	5	5	5	5	5	5	5	5	4	5
R9	5	4	5	4	4	4	4	4	5	4
R10	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
R11	4	5	4	4	4	5	4	4	4	5
R12	5	4	5	5	5	3	5	5	5	4
R13	4	3	4	5	4	4	4	4	3	3
R14	3	5	5	4	5	4	5	4	5	4
R15	5	4	3	3	3	4	3	3	4	5
R16	4	5	4	4	4	5	4	5	5	4
R17	4	5	5	4	5	4	5	4	4	3
R18	4	3	4	4	4	3	4	3	3	5
R19	5	4	3	4	3	4	3	4	4	4
R20	4	5	5	4	5	5	5	5	5	3
R21	4	4	5	5	4	4	5	4	4	4
R22	5	3	4	3	3	3	3	3	3	5
R23	4	4	4	5	4	5	4	5	4	4
R24	3	4	4	4	5	4	5	4	5	5
R25	4	4	4	3	4	3	4	3	4	5
R26	5	4	4	4	3	4	3	4	3	4
R27	4	5	4	4	5	5	5	5	5	3
R28	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4
R29	5	3	3	3	3	3	3	3	3	5
R30	4	4	4	3	4	5	4	5	4	4
R31	3	5	5	4	5	4	5	4	5	3
R32	4	4	4	3	4	3	4	3	4	5

R33	5	3	3	4	3	4	3	4	3	4
R34	4	5	5	5	5	5	5	5	5	3
R35	3	4	4	5	4	4	4	4	4	4
R36	5	3	3	3	3	3	3	3	3	5
R37	4	4	4	5	4	5	4	5	4	4
R38	3	5	5	5	5	4	5	4	5	3
R39	4	4	4	3	4	3	4	3	4	5
R40	5	3	3	4	3	4	3	4	3	4
R41	4	5	5	5	5	5	5	5	5	3
R42	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4
R43	5	3	3	3	3	3	3	3	3	5
R44	4	4	4	5	4	5	4	5	4	4
R45	3	5	5	4	5	4	5	4	5	3
R46	4	4	4	3	4	3	4	3	4	5
R47	5	3	3	4	3	4	3	4	3	4
R48	4	5	5	5	5	5	5	5	5	3
R49	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4
R50	5	3	3	3	4	3	3	4	3	5
R51	4	5	4	4	5	5	4	4	5	4
R52	3	4	5	5	4	4	5	5	4	3
R53	4	3	4	4	3	3	4	4	3	5
R54	5	4	3	3	4	4	3	3	4	4
R55	4	5	5	5	5	5	5	5	5	3
R56	3	4	4	3	4	3	4	3	4	4
R57	5	3	3	3	3	3	3	3	3	5
R58	4	5	4	4	5	5	4	5	5	4
R59	3	4	5	5	4	5	5	5	4	3
R60	4	3	4	4	3	3	4	4	3	5
R61	5	4	3	3	4	4	3	3	4	4
R62	4	5	5	5	4	5	5	4	5	3
R63	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4
R64	5	3	3	3	3	3	3	3	3	5
R65	4	5	4	4	5	5	4	4	5	4

R66	3	4	5	5	4	4	5	5	4	3
R67	4	3	4	4	3	3	4	4	3	5
R68	5	4	3	3	4	4	3	3	4	4
R69	4	5	5	4	5	5	5	5	5	3
R70	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4
R71	5	3	3	3	5	3	3	4	4	5
R72	4	5	4	4	5	5	4	4	5	4
R73	3	4	5	5	4	4	5	5	4	3
R74	4	3	4	4	3	3	4	4	3	5
R75	5	4	3	3	4	5	3	3	4	4
R76	4	5	5	5	5	5	4	5	4	3
R77	3	4	4	4	5	4	3	4	4	4
R78	4	5	4	4	5	4	4	4	5	5

Outer loadings

Mean, STDEV, T values, p values

	Original sample (O)	Standard deviation (STDEV)	statistics (O/STDEV)	P values
APK DAERAH1 <- APK DAERAH	0,751	0,046	16,166	0,000
APK DAERAH10 <- APK DAERAH	0,764	0,046	16,647	0,000
APK DAERAH2 <- APK DAERAH	0,907	0,016	55,629	0,000
APK DAERAH3 <- APK DAERAH	0,933	0,007	134,379	0,000
APK DAERAH4 <- APK DAERAH	0,761	0,045	16,867	0,000
APK DAERAH5 <- APK DAERAH	0,909	0,016	57,075	0,000
APK DAERAH6 <- APK DAERAH	0,920	0,013	72,875	0,000
APK DAERAH7 <- APK DAERAH	0,768	0,045	17,079	0,000
APK DAERAH8 <- APK DAERAH	0,907	0,016	55,629	0,000
APK DAERAH9 <- APK DAERAH	0,886	0,030	29,871	0,000
KP1 <- KOMPETENSI	0,958	0,006	166,103	0,000
KP10 <- KOMPETENSI	0,958	0,006	155,419	0,000
KP2 <- KOMPETENSI	0,695	0,053	13,183	0,000
KP3 <- KOMPETENSI	0,935	0,015	62,897	0,000
KP4 <- KOMPETENSI	0,958	0,006	155,419	0,000
KP5 <- KOMPETENSI	0,709	0,052	13,696	0,000
KP6 <- KOMPETENSI	0,925	0,018	51,519	0,000
KP7 <- KOMPETENSI	0,958	0,006	166,103	0,000
KP8 <- KOMPETENSI	0,708	0,052	13,674	0,000
KP9 <- KOMPETENSI	0,935	0,015	62,897	0,000
SAK1 <- SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN	0,836	0,036	23,009	0,000
SAK10 <- SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN	0,797	0,040	19,737	0,000
SAK2 <- SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN	0,859	0,028	30,451	0,000
SAK3 <- SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN	0,864	0,022	40,006	0,000
SAK4 <- SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN	0,793	0,042	18,671	0,000
SAK5 <- SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN	0,861	0,030	28,363	0,000
SAK6 <- SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN	0,868	0,027	32,649	0,000
SAK7 <- SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN	0,806	0,039	20,532	0,000
SAK8 <- SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN	0,848	0,029	29,190	0,000
SAK9 <- SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN	0,888	0,024	37,352	0,000
SPIP1 <- SPIP	-0,643	0,052	12,431	0,000
SPIP10 <- SPIP	-0,732	0,062	11,854	0,000
SPIP2 <- SPIP	0,783	0,060	13,096	0,000
SPIP3 <- SPIP	0,861	0,044	19,510	0,000
SPIP4 <- SPIP	0,762	0,059	12,956	0,000
SPIP5 <- SPIP	0,845	0,048	17,510	0,000
SPIP6 <- SPIP	0,664	0,068	9,803	0,000
SPIP7 <- SPIP	0,881	0,042	20,817	0,000
SPIP8 <- SPIP	0,786	0,057	13,690	0,000
SPIP9 <- SPIP	0,802	0,056	14,404	0,000
TP1 <- TRANSPARANSI	0,929	0,012	76,679	0,000
TP10 <- TRANSPARANSI	0,920	0,016	56,137	0,000
TP2 <- TRANSPARANSI	0,808	0,043	18,862	0,000
TP3 <- TRANSPARANSI	0,846	0,034	24,695	0,000

TP4 <- TRANSPARANSI	0,826	0,038	21,817	0,000
TP5 <- TRANSPARANSI	0,818	0,041	19,745	0,000
TP6 <- TRANSPARANSI	0,897	0,023	38,760	0,000
TP7 <- TRANSPARANSI	0,862	0,032	26,819	0,000
TP8 <- TRANSPARANSI	0,711	0,052	13,761	0,000
TP9 <- TRANSPARANSI	0,915	0,018	51,914	0,000
SPIP x TRANSPARANSI -> SPIP x TRANSPARANSI	1,000	0,000	n/a	n/a
SPIP x KOMPETENSI -> SPIP x KOMPETENSI	1,000	0,000	n/a	n/a
SPIP x SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN -> SPIP x SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN	1,000	0,000	n/a	n/a

Final results

Path coefficients

Mean, STDEV, T values, p values

	Original sample (O)	Standard deviation (STDEV)	t statistics (O/STDEV)	P values
KOMPETENSI -> APK DAERAH	0,870	0,032	27,190	0,000
SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN -> APK DAERAH	-0,027	0,059	0,449	0,033
SPIP -> APK DAERAH	-0,432	0,111	3,905	0,000
TRANSPARANSI -> APK DAERAH	0,350	0,069	5,040	0,000
SPIP x SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN -> APK DAERAH	0,170	0,058	2,942	0,041
SPIP x KOMPETENSI -> APK DAERAH	-0,021	0,015	1,408	0,032
SPIP x TRANSPARANSI -> APK DAERAH	-0,220	0,065	3,389	0,068

Confidence intervals

	Original sample (O)	2.5%	97.5%
KOMPETENSI -> APK DAERAH	0,870	0,811	0,937
SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN -> APK DAERAH	-0,027	-0,145	0,087
SPIP -> APK DAERAH	-0,432	-0,624	-0,181
TRANSPARANSI -> APK DAERAH	0,350	0,205	0,476
SPIP x SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN -> APK DAERAH	0,170	0,077	0,308
SPIP x KOMPETENSI -> APK DAERAH	-0,021	-0,053	0,006
SPIP x TRANSPARANSI -> APK DAERAH	-0,220	-0,372	-0,114

Confidence intervals bias corrected

	Original sample (O)	Bias	2.5%	97.5%
KOMPETENSI -> APK DAERAH	0,870	0,000	0,813	0,938
SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN -> APK DAERAH	-0,027	-0,003	-0,139	0,093
SPIP -> APK DAERAH	-0,432	0,013	-0,639	-0,212
TRANSPARANSI -> APK DAERAH	0,350	-0,010	0,224	0,503
SPIP x SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN -> APK DAERAH	0,170	0,009	0,069	0,289
SPIP x KOMPETENSI -> APK DAERAH	-0,021	-0,003	-0,045	0,016
SPIP x TRANSPARANSI -> APK DAERAH	-0,220	-0,010	-0,351	-0,104



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
PROGRAM PASCASARJANA

UMSU Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024

Jl. Denai No. 217 Medan 20226 Telp. (061) - 88811104 Fax. (061) - 88811111

<https://pascasarjana.umsu.ac.id> pps@umsu.ac.id [f umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [i umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [t umsumedan](https://www.tiktok.com/@umsumedan) [y umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

BERITA ACARA UJIAN TESIS

Pada hari ini, Senin, 04 Agustus 2025 telah dilaksanakan Ujian Tesis bagi mahasiswa Magister Akuntansi Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, sbb:

Nama Mahasiswa : AINUL ALFI SYAHRIN
NPM : 2,320,050,021.00
Prog.Studi/Konsentrasi : Magister Akuntansi / Akuntansi Sektor Publik
Judul Tesis : PENGARUH TRANSPARANSI, KOMPETENSI DAN SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN TERHADAP AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DENGAN PENERAPAN SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL PEMERINTAH SEBAGAI VARIABEL MODERASI (STUDI KASUS KANTOR WALIKOTA LANGSA)

dengan catatan wajib memperbaiki:

Pembimbing I : _____

Pembimbing II : _____

Penguji I : *Perbaiki kembali bab 4 pembahasan.*

Penguji II : _____

Penguji III : *perbaiki sesuai arahan*

Berita acara ini **ditandatangani** setelah tesis diperbaiki sesuai petunjuk/arahan dari Pembimbing dan Penguji/ pembahas.

Medan, _____

1 Assoc. Prof. Dr. IRFAN, S.E., M.M.

Pembimbing I

2 Assoc. Prof. Dr. JANURI, S.E., M.M., M.Si.

Pembimbing II

3 Assoc. Prof. Dr. SYAFRIDA HANI, S.E., M.Si

Penguji I

4 Prof. Dr. MAYA SARI, S.E., Ak., M.Si., CA

Penguji II

5 Dr. Hj. DAHRANI, S.E., M.Si.

Penguji III



PERSETUJUAN PEMBIMBING

Nama : Ainul Alfi Syahrin

Nomor Pokok Mahasiswa : 2320050021

Prodi/Konsentrasi : Akuntansi/Sektor Publik

Judul Tesis : PENGARUH TRANSPARANSI, KOMPETENSI, DAN SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN TERHADAP AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DENGAN PENERAPAN SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL PEMERINTAH SEBAGAI VARIABEL MODERASI (STUDI KASUS KANTOR WALIKOTA LANGSA)

Disetujui untuk disampaikan kepada

Panitia Sidang

Medan,

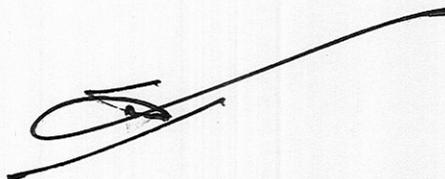
Komisi Pembimbing

Pembimbing I



(Dr. Irfan. S.E., M.M)

Pembimbing II



(Assoc. Dr. Januri, S.E., M.M., M.Si)



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
PROGRAM PASCASARJANA

UMSU Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024

Jl. Denai No. 217 Medan 20226 Telp. (061) - 88811104 Fax. (061) - 88811111

<https://pascasarjana.umsu.ac.id> pps@umsu.ac.id [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.twitter.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

BERITA ACARA SEMINAR HASIL

Pada hari ini, Selasa, tgl. 15 Juli 2025 telah dilaksanakan Seminar Hasil bagi mahasiswa Magister Akuntansi Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, sbb:

Nama Mahasiswa : AINUL ALFI SYAHRIN
NPM : 2320050021
Program Studi : Magister Akuntansi
Konsentrasi : Akuntansi Sektor Publik
Judul Tesis : PENGARUH TRANSPARANSI, KOMPETENSI DAN SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN TERHADAP AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DENGAN PENERAPAN SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL PEMERINTAH SEBAGAI VARIABEL MODERASI (STUDI KASUS KANTOR WALIKOTA ...)

dengan catatan wajib memperbaiki:

1.

Sempurna kembali

2.

3.

Pembimbing I
[Signature]

Assoc. Prof. Dr. IRFAN, S.E., M.M.

Tesis ini telah diperbaiki sesuai petunjuk/arahan dari Pembimbing dan Penguji/ pembahas, untuk selanjutnya dapat disetujui didaftarkan pada panitia Ujian Tesis.

Diketahui oleh:
An. Direktur
Ketua/Sekretaris Prodi,

[Signature]

Dr. EKA NURMALA SARI, S.E., M.Si., Ak., CA.

Medan,

Pembimbing I

[Signature]

Assoc. Prof. Dr. IRFAN, S.E., M.M.





UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
PROGRAM PASCASARJANA

UMSU Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024

Jl. Denai No. 217 Medan 20226 Telp. (061) - 88811104 Fax. (061) - 88811111

<https://pascasarjana.umsu.ac.id> pps@umsu.ac.id [f umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [i umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [t umsumedan](https://www.tiktok.com/@umsumedan) [y umsumedan](https://www.youtube.com/channel/UC...)

BERITA ACARA SEMINAR HASIL

Pada hari ini, Selasa, tgl. 15 Juli 2025 telah dilaksanakan Seminar Hasil bagi mahasiswa Magister Akuntansi Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, sbb:

Nama Mahasiswa : AINUL ALFI SYAHRIN
NPM : 2320050021
Program Studi : Magister Akuntansi
Konsentrasi : Akuntansi Sektor Publik
Judul Tesis : PENGARUH TRANSPARANSI, KOMPETENSI DAN SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN TERHADAP AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DENGAN PENERAPAN SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL PEMERINTAH SEBAGAI VARIABEL MODERASI (STUDI KASUS KANTOR WALIKOTA ...)

dengan catatan wajib memperbaiki:

1. *perbaiki kembali*

2.

3.

Pembimbing II

Assoc. Prof. Dr. JANURI, S.E., M.M., M.Si.

Tesis ini telah diperbaiki sesuai petunjuk/arahan dari Pembimbing dan Penguji/ pembahas, untuk selanjutnya dapat disetujui didaftarkan pada panitia Ujian Tesis.

Medan, _____

Pembimbing II

Diketahui oleh:
An. Direktur
Ketua/Sekretaris Prodi,

Dr. EKA NURMALA SARI, S.E., M.Si., Ak., CA.

Assoc. Prof. Dr. JANURI, S.E., M.M., M.Si.





UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

PROGRAM PASCASARJANA

UMSU Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024

Jl. Denai No. 217 Medan 20226 Telp. (061) - 88811104 Fax. (061) - 88811111

<https://pascasarjana.umsu.ac.id> pps@umsu.ac.id [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.tiktok.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

BERITA ACARA SEMINAR HASIL

Pada hari ini, Selasa, tgl. 15 Juli 2025 telah dilaksanakan Seminar Hasil bagi mahasiswa Magister Akuntansi Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, sbb:

Nama Mahasiswa : AINUL ALFI SYAHRIN
NPM : 2320050021
Program Studi : Magister Akuntansi
Konsentrasi : Akuntansi Sektor Publik
Judul Tesis : PENGARUH TRANSPARANSI, KOMPETENSI DAN SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN TERHADAP AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DENGAN PENERAPAN SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL PEMERINTAH SEBAGAI VARIABEL MODERASI (STUDI KASUS KANTOR WALIKOTA

dengan catatan wajib memperbaiki:

1. *cek kembali bab 1, 2 dan 3. - Identifikasi - terutama pd bagian populasi sampel.*
2. *Bab 4. Gambar rumus! Hasil dan pembel -*
3. *Kesimpulan > Saran.*

Penguji/Pembahas I

Assoc. Prof. Dr. SYAFRIDA HANI, S.E., M.Si

Tesis ini telah diperbaiki sesuai petunjuk/arahan dari Pembimbing dan Penguji/ pembahas, untuk selanjutnya dapat disetujui didaftarkan pada panitia Ujian Tesis.

Medan, _____

Diketahui oleh:
An. Direktur
Ketua/Sekretaris Prodi,

Dr. EKA NURMALA SARI, S.E., M.Si., Ak., CA.

Penguji/Pembahas I

Assoc. Prof. Dr. SYAFRIDA HANI, S.E., M.Si





UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
PROGRAM PASCASARJANA

UMSU Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024

Jl. Denai No. 217 Medan 20226 Telp. (061) - 88811104 Fax. (061) - 88811111

<https://pascasarjana.umsu.ac.id> pps@umsu.ac.id [f umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [ig umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [yt umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan) [tiktok umsumedan](https://www.tiktok.com/umsumedan)

BERITA ACARA SEMINAR HASIL

Pada hari ini, Selasa, tgl. 15 Juli 2025 telah dilaksanakan Seminar Hasil bagi mahasiswa Magister Akuntansi Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, sbb:

Nama Mahasiswa	: AINUL ALFI SYHRIN
NPM	: 2320050021
Program Studi	: Magister Akuntansi
Konsentrasi	: Akuntansi Sektor Publik
Judul Tesis	: PENGARUH TRANSPARANSI, KOMPETENSI DAN SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN TERHADAP AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DENGAN PENERAPAN SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL PEMERINTAH SEBAGAI VARIABEL MODERASI (STUDI KASUS KANTOR WALIKOTA LANGSA

dengan catatan wajib memperbaiki:

1. Pembahasan belum ada penjelasan terkait dgn permasalahan yg muncul, pembahasa hanya sampai di hasil penelitian saja, selanjutnya pembahas bli juga

2. _____
3. _____

Penguji/Pembahas II

Prof. Dr. MAYA SARI, S.E., Ak., M.Si., CA

Tesis ini telah diperbaiki sesuai petunjuk/arahan dari Pembimbing dan Penguji/ pembahas, untuk selanjutnya dapat disetujui didaftarkan pada panitia Ujian Tesis.

Medan,

26 Jul 2025

Penguji/Pembahas II

Diketahui oleh:

An. Direktur

Ketua/Sekretaris Prodi,

Dr. EKA NURMALA SARI, S.E., M.Si., Ak., CA.

Prof. Dr. MAYA SARI, S.E., Ak., M.Si., CA





UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Siswa menandatangani surat ini agar disebarkan
nama dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
PROGRAM PASCASARJANA

UMSU Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Pp/PT/III/2024

Jl. Denai No. 217 Medan 20226 Telp. (061) - 88811104 Fax. (061) - 88811111

<https://pascasarjana.umsu.ac.id> pps@umsu.ac.id [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.linkedin.com/umsumedan)

BERITA ACARA SEMINAR HASIL

Pada hari ini, Selasa, tgl. 15 Juli 2025 telah dilaksanakan Seminar Hasil bagi mahasiswa Magister Akuntansi Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, sbb:

Nama Mahasiswa	: AINUL ALFI SYAHRIN
NPM	: 2320050021
Program Studi	: Magister Akuntansi
Konsentrasi	: Akuntansi Sektor Publik
Judul Tesis	: PENGARUH TRANSPARANSI, KOMPETENSI DAN SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN TERHADAP AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DENGAN PENERAPAN SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL PEMERINTAH SEBAGAI VARIABEL MODERASI (STUDI KASUS KANTOR WALIKOTA

dengan catatan wajib memperbaiki:

1. *perbaiki Bab I & IV* *Siwan*
2. *ltsa jurnal desa*
- 3.

Penguji/Pembahas III

Dr. Hj. DAHRANI, S.E., M.Si.

Tesis ini telah diperbaiki sesuai petunjuk/arahan dari Pembimbing dan Penguji/pembahas, untuk selanjutnya dapat disetujui didaftarkan pada panitia Ujian Tesis.

Medan, _____

Diketahui oleh:

An. Direktur
Ketua/Sekretaris Prodi,

Dr. EKA NURMALA SARI, S.E., M.Si., Ak., CA.

Penguji/Pembahas III

Dr. Hj. DAHRANI, S.E., M.Si.



Agensi Kelayakan Malaysia
Malaysia Qualifications Agency



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
PROGRAM PASCASARJANA**

Jl. Denai No. 217 Medan 20226 Telp. 061 - 88811104 Fax. 061 - 88811111
Website: www.umsu.ac.id - www.pascasarjana.umsu.ac.id
E-mail: pps@umsu.ac.id

LEMBAR BIMBINGAN TESIS

Nama Mahasiswa : AINUL ALFI SYAHFIN
NPM : 2320050021
Program Studi : MAGISTER AKUNTANSI
Konsentrasi : AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK
Judul Tesis : Pengaruh Transparansi, Kompetensi dan Sistem Akuntansi Keuangan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Dengan Peranan SPIP sebagai Variabel Moderasi (Studi Kasus Kantor Walikota Kota Medan)
Tgl. Seminar Proposal : 13. Maret. 2025

No.	Tanggal	Materi Bimbingan	Tanda Tangan
1	24/5-2021	Deskripsi data	
2		Analisa data	
3			
4			
5			
6		acc. Seminar Har 1	

Medan,

Pembimbing I,

Pembimbing II,

ASSOC. PROF. DR. Irfan, S.E., M.M

Diketahui Oleh :
Ketua / Sekretaris,

DR. Elga Normola Sari, S.E., M.Si., Ak. CA





UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
PROGRAM PASCASARJANA**

Jl. Denai No. 217 Medan 20226 Telp. 061 - 88811104 Fax. 061 - 88811111
Website: www.umsu.ac.id - www.pascasarjana.umsu.ac.id
E-mail: pps@umsu.ac.id

LEMBAR BIMBINGAN TESIS

Nama Mahasiswa : Arnold A. Jahon

NPM : 2320050021

Program Studi : Akuntansi

Konsentrasi : Akuntansi Sektor Publik

Judul Tesis : Pengaruh transparansi, kompetensi, dan Sistem Akuntansi keuangan daerah terhadap Akuntabilitas Pesebelah keuangan daerah, dengan perantara SPIP sebagai variabel mediasi (Studi kasus kantor walikota (arsa))

Tgl. Seminar Proposal : 13. Maret 2025

No.	Tanggal	Materi Bimbingan	Tanda Tangan
1	21/6/25	Kelengkapan & Daftar Isi	
2		Isi & Format pm & Daftar Pustaka	
3	26/11/25	Kelaw Kemplan: 6 pertidinan:	
4		Isi : 6 - Aspek	
5		Aspek dan Aspek , Aspek	
6	1/7/25	Isi	

Medan,

Pembimbing I,

Pembimbing II,

ASSOC. PROF. JANORI, SE, MM, M.Si, CMA, CERA

Diketahui Oleh :

Ketua / Sekretaris,

DR. EKA NURWALGA-SATI, S.E., M.Si., Ak. CA



PERSETUJUAN PEMBIMBING

Nama : Ainul Alfi Syahrin
Nomor Pokok Mahasiswa : 2320050021
Prodi/Konsentrasi : Magister Akuntansi
Judul Skripsi : Pengaruh Transparansi, Kompetensi, Dan Sistem Akuntansi Keuangan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Dengan Penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Sebagai Variabel Moderasi (Studi Kasus Kantor Walikota Langsa)

Disetujui untuk disampaikan Kepada

Panitia Seminar Proposal

Medan, 2025

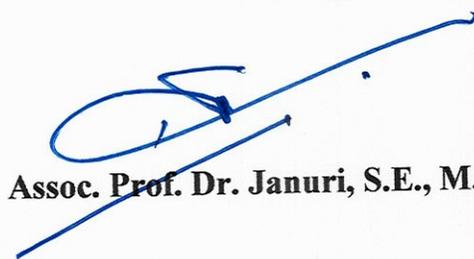
Komisi Pembimbing

Pembimbing I



Dr. Irfan, S.E., M.M

Pembimbing II



Assoc. Prof. Dr. Januri, S.E., M.M., M.Si



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
PROGRAM PASCASARJANA

UMSU Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024

Jl. Denai No. 217 Medan 20226 Telp. (061) - 88811104 Fax. (061) - 88811111

<https://pascasarjana.umsu.ac.id> pps@umsu.ac.id [f umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [i umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [t umsumedan](https://www.twitter.com/umsumedan) [y umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

BERITA ACARA SEMINAR KOLOKIUUM

Pada hari ini, Rabu, tgl.12 Maret 2025 telah dilaksanakan Seminar Kolokium secara bagi mahasiswa Magister Akuntansi Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, sbb:

Nama Mahasiswa : AINUL ALFI SYAHRIN
NPM : 2320050021
Prog.Studi/Konsentrasi : Magister Akuntansi / Akuntansi Sektor Publik
Judul Proposal Tesis : PENGARUH TRANPARANSI, KOMPETENSI DAN SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN TERHADAP AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DENGAN PENERAPAN SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL PEMERINTAH SEBAGAI VARIABEL MODERASI (Studi Kasus kantor Walikota Langsa)

dengan catatan wajib memperbaiki:

1. Revisi
- 2.
- 3.

Pembimbing I

Assoc. Prof. IRFAN, S.E., M.M., Ph.D.

Proposal ini *ditandatangani* setelah diperbaiki sesuai petunjuk/arahan dari Pembimbing dan Penguji/Pembahas, selanjutnya dapat disetujui untuk diteruskan menjadi sebuah tesis.

Medan,

Diketahui oleh:
An. Direktur
Ketua/Sekretaris Prodi,

Dr. EKA NURMALA SARI, S.E., M.Si., Ak. CA

Assoc. Prof. IRFAN, S.E., M.M., Ph.D.





UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
PROGRAM PASCASARJANA

UMSU Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024

Jl. Denai No. 217 Medan 20226 Telp. (061) - 88811104 Fax. (061) - 88811111

<https://pascasarjana.umsu.ac.id> pps@umsu.ac.id [f umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [i umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [t umsumedan](https://www.twitter.com/umsumedan) [y umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

BERITA ACARA SEMINAR KOLOKIUUM

Pada hari ini, Rabu, tgl.12 Maret 2025 telah dilaksanakan Seminar Kolokium secara bagi mahasiswa Magister Akuntansi Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, sbb:

Nama Mahasiswa : AINUL ALFI SYAHRIN
NPM : 2320050021
Prog.Studi/Konsentrasi : Magister Akuntansi / Akuntansi Sektor Publik
Judul Proposal Tesis : PENGARUH TRANPARANSI, KOMPETENSI DAN SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN TERHADAP AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DENGAN PENERAPAN SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL PEMERINTAH SEBAGAI VARIABEL MODERASI (Studi Kasus kantor Walikota Langsa)

dengan catatan wajib memperbaiki:

1. Perbaikan Ilmu Arakan Pembantu.
- 2.
- 3.

Pembimbing II

Assoc. Prof. Dr. JANURI, S.E., M.M., M.Si., CMA., CERA.

Proposal ini **ditandatangani** setelah diperbaiki sesuai petunjuk/arahan dari Pembimbing dan Penguji/Pembahas, selanjutnya dapat disetujui untuk diteruskan menjadi sebuah tesis.

Medan, _____

Diketahui oleh:

An. Direktur
Ketua/Sekretaris Prodi,

Dr. EKA NURMALA SARI, S.E., M.Si., Ak. CA

Pembimbing II

Assoc. Prof. Dr. JANURI, S.E., M.M., M.Si., CMA., CERA.





UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
PROGRAM PASCASARJANA

UMSU Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024

Jl. Denai No. 217 Medan 20226 Telp. (061) - 88811104 Fax. (061) - 88811111

<https://pascasarjana.umsu.ac.id> ✉ pps@umsu.ac.id [umsu.medan](https://www.facebook.com/umsu.medan) [umsu.medan](https://www.instagram.com/umsu.medan) [umsu.medan](https://twitter.com/umsu.medan) [umsu.medan](https://www.youtube.com/umsu.medan)

BERITA ACARA SEMINAR KOLOKIUUM

Pada hari ini, Rabu, tgl.12 Maret 2025 telah dilaksanakan Seminar Kolokium secara bagi mahasiswa Magister Akuntansi Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, sbb:

Nama Mahasiswa : AINUL ALFI SYAHRIN
NPM : 2320050021
Prog.Studi/Konsentrasi : Magister Akuntansi / Akuntansi Sektor Publik
Judul Proposal Tesis : PENGARUH TRANPARANSI, KOMPETENSI DAN SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN TERHADAP AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DENGAN PENERAPAN SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL PEMERINTAH SEBAGAI VARIABEL MODERASI (Studi Kasus kantor Walikota Langsa)

dengan catatan wajib memperbaiki:

1. LBM dipertegas dengan fenomena pd masing variabel =
uraikan deskripsi sistematis & perbaikan 'identifikasi' masalah
2. Grand theory disesuaikan
3. Daftar Pustaka. ditambahkan dgn jurnal = bereputasi

Pembanding

Assoc. Prof. Dr. SYAFRIDA HANI, S.E., M.Si

Proposal ini **ditandatangani** setelah diperbaiki sesuai petunjuk/arahan dari Pembimbing dan Penguji/Pembahas, selanjutnya dapat disetujui untuk diteruskan menjadi sebuah tesis.

Medan, _____

Diketahui oleh:

An. Direktur
Ketua/Sekretaris Prodi,

Dr. EKA NURMALA SARI, S.E., M.Si., Ak. CA

Pembanding

Assoc. Prof. Dr. SYAFRIDA HANI, S.E., M.Si





UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
PROGRAM PASCASARJANA

Jl. Denai No. 217 Medan 20226 Telp. 061 - 88811104 Fax. 061 - 88811111
Website: www.umsu.ac.id - www.pascasarjana.umsu.ac.id
E-mail: pps@umsu.ac.id

Keputusan dan surat resmi diterbitkan
melalui dan terdapat logo

LEMBAR BIMBINGAN PROPOSAL TESIS

Nama Mahasiswa : AINUL ALEI SYAHRI
NPM : 2320050021
Program Studi : MAGISTER AKUNTANSI
Konsentrasi : AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK
Judul Tesis : Pengaruh Transparansi, Kompetensi, dan Sistem Akuntansi Keuangan Terhadap Akuntansi Pengelolaan Keuangan Daerah Penerimaan Penghasilan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah sbg Variabel Moderasi

No.	Tanggal	Materi Bimbingan	Tanda Tangan
1		- Masalah perumitan - Rumus dasar	
2		- Kertas konsep	
3		metode perumitan	
4			
5			
6			

Medan,

Pembimbing I,

Pembimbing II,

(ASOC. PROF. DR. IREAN S.E., M.M.)

(ASOC. PROF. DR. JANURI S.E., M.M., M.Si.)

Diketahui Oleh :
Ketua / Sekretaris,





MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
PROGRAM PASCASARJANA

Jl. Denai No. 217 Medan 20226 Telp. 061 - 88811104 Fax. 061 - 88811111
 Website: www.umsu.ac.id - www.pascasarjana.umsu.ac.id
 E-mail: pps@umsu.ac.id

LEMBAR BIMBINGAN PROPOSAL TESIS

Nama Mahasiswa : AINUL ALFI SYAHRIN
 NPM : 2320050021
 Program Studi : Magister Akuntansi
 Konsentrasi : AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK
 Judul Tesis : Pengaruh transparansi, kompetensi, dan sistem akuntansi keuangan terhadap Akuntabilitas Persepsi Keuangan Daerah dengan Penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah sebagai Variabel Moderasi

No.	Tanggal	Materi Bimbingan	Tanda Tangan
1	08/02/2025	Bab I : - Latar belakang - Identifikasi masalah	
2		Bab II : - Kerangka konseptual harus jelas - Dasar teori penelitian terdahulu	
3		: - Hipotesis adanya hubungan penelitian lain	
4	17/02/2025	Bab III = Disesuaikan.	
5			
6			

Medan,

Pembimbing I,

Pembimbing II,

Assoc.....

Assoc. Prof. Dr. Januri, S.E., M.M., M.Si.....

Diketahui Oleh :

Ketua / Sekretaris,

Dr. Ewa Nurmalia Sari, S.E., M.Si., Ak., CA.....





UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

PROGRAM PASCASARJANA

UMSU Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024

Jl. Denai No. 217 Medan 20226 Telp. (061) - 88811104 Fax. (061) - 88811111

<https://pascasarjana.umsu.ac.id> ✉ pps@umsu.ac.id [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)

SURAT PERSETUJUAN

Nomor : 70 /II.3.AU/UMSU-PPs/F/2025

Tentang:

**JUDUL TESIS DAN DOSEN PEMBIMBING MAHASISWA
PROGRAM STUDI MAGISTER AKUNTANSI
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

Nama Mahasiswa : **AINUL ALFI SYAHRIN**
NPM : 2320050021
Prodi / Konsentrasi : Magister Akuntansi / Akuntansi Sektor Publik
Judul Tesis : **PENGARUH TRANSPARANSI, KOMPETENSI DAN SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN TERHADAP AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DENGAN PENERAPAN SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL PEMERINTAH SEBAGAI VARIABEL MODERASI PADA KANTOR WALIKOTA LANGSA**
Pembimbing I : Assoc. Prof. Dr. Irfan, S.E., M.M
Pembimbing II : Assoc. Prof. Dr. Januri, S.E., M.M., M.Si.

Surat persetujuan ini berlaku sampai tanggal 17 Januari 2026, Apabila hingga batas tersebut yang bersangkutan belum menyelesaikan Tesisnya, maka Surat Persetujuan ini dinyatakan batal.

Medan, 17 Rajab 1446 H
17 Januari 2025 M



Direktur,

Prof. Dr. Triono Eddy, S.H., M.Hum
NIDN. 1012125601

Tembusan:

1. Ketua Prodi MAKSI UMSU;
2. Dosen Pembimbing I dan II;
3. Pertinggal.

